



PROGRAM
Community Development

**Perusahaan Industri dan Dampaknya
Pada Masyarakat Sekitar**

Studi Kasus di PT RAPP Riau

©2008 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog dalam Terbitan

Program *Community Development* Perusahaan Industri dan Dampaknya pada Masyarakat Sekitar (Studi Kasus di PT. RAPP, Riau/Ujud Tahajuddin, DTP. Kusumawardhani, M. Azzam Manan, Jakarta: LIPI Press, 2008

x + 170 hlm; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-356-6

1. Community Development - Industri

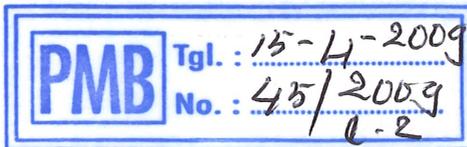
307. 14

Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota IKAPI



L I P I

*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232 Fax.: 021-5701232



KATA PENGANTAR

Salah satu kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI) pada Tahun Anggaran 2008 adalah Penelitian Program *Community Development* Perusahaan Industri dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Sekitar. Penelitian ini mengambil Kasus di PT Riau Andalan Pulp & Paper (PT. RAPP) merupakan. Penelitian tentang program *Community Development* ini merupakan penelitian tahun ketiga, setelah penelitian yang pertama (2006) dengan tema Evaluasi Program *Community Development* di Lingkungan Perusahaan Industri Air Mineral di Jawa Timur dan Jawa Barat. Dan penelitian Program *Community Development* Perusahaan Industri dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Sekitar di PT. Chevron Pacific Indonesia yang dilakukan pada tahun 2007.

Tema penelitian ini menjadi penting karena keberadaan perusahaan industri terhadap masyarakat sekitar selalu menjadi sorotan para pemerhati industrialisasi, baik dari kalangan akademisi, pemerintah maupun LSM. Bahkan agar perusahaan industri tersebut memberikan dampak yang positif, pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan yang mewajibkan perusahaan industri menjalankan kegiatan *community development* terhadap masyarakat di sekitar lokasi perusahaan industri yang bersangkutan. Dengan adanya program *community development* yang dilakukan perusahaan, maka diharapkan masyarakat sekitar dapat turut merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan tersebut di wilayah mereka. Sebaliknya perusahaan industri yang bersangkutan dapat meningkatkan performance perusahaannya.

Laporan penelitian ini memperlihatkan pola perencanaan dan manajemen pelaksanaan *community development* yang dilakukan oleh perusahaan industri yang diteliti dengan berbagai keunggulan dan kelemahannya. Dari Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi akumulasi pengetahuan yang dapat membantu untuk pelaksanaan

kegiatan penelitian berikutnya. Dengan penelitian yang bersifat time series ini diharapkan tujuan utama penelitian untuk memformulasikan model *community development* yang efektif dapat dicapai sehingga dapat menjadi acuan bagi perusahaan industri dalam melaksanakan program *community development* yang efektif.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Riau Andalan Pulp & Paper baik yang berada di Jakarta maupun di Riau, instansi pemerintah khususnya Dirjen Agro dan Kimia Departemen Perindustrian, Departemen Khutanan, Pemprov Riau dan Pemkab/kota di Propinsi Riau, LSM, masyarakat maupun individu yang telah memberikan dukungan dan kerja sama kepada peneliti selama kegiatan penelitian berjalan. Kami menyadari bahwa penelitian ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan/dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak.

Meskipun laporan hasil penelitian ini telah dibahas secara mendalam dalam seminar hasil-hasil penelitian PMB-LIPI, kami menyadari bahwa hasil penelitian ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kami menghargai dan menerima kritik dan saran yang disampaikan dengan senang hati untuk penyempurnaan laporan penelitian PMB-LIPI di masa yang akan datang. Kami mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para akademisi maupun praktisi.

Akhir kata kami ucapkan, selamat membaca dan semoga memberikan manfaat.

Jakarta, Desember 2008

Kepala Pusat Penelitian
Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI

Ttd.

Drs. Abdul Rachman Patji, Ma

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL, DIAGRAM DAN GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Masalah Penelitian	9
1.3. Tujuan dan Sasaran	9
1.4. Ruang Lingkup	10
1.5. Metodologi	18
1.5.1. Pendekatan	18
1.5.2. Metode Pengumpulan Data	18
1.5.3. Analisis Data	18
1.5.4. Lokasi Penelitian	19
BAB II GAMBARAN UMUM.....	21
2.1. Kewilayahan	21
2.2. Kependudukan	22
2.3. Pendidikan	30
2.4. Ketenagakerjaan	31
2.5. Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi	32
2.6. RTRWP Riau	36
2.7. Dana Reboisasi	37
2.8. PT RAPP	38
2.8.1. Profil Perusahaan	38
2.8.2. Persoalan Seputar Kehadiran PT RAPP	41
2.8.2.1. Aspek ekologi	41
2.8.2.2. Eksploitasi dan Masa Depan Hutan Riau	42
2.8.2.3. Berbagai Pelanggaran	44
2.8.2.4. Izin HTI/IUPHHK Tanpa Kendali	46
2.8.2.5. RAPP dan Pasokan Bahan Baku	48

BAB III PROGRAM CSR DAN COMMUNITY

DEVELOPMENT PT RAPP	51
3.1. PT RAPP dan Deforestasi	51
3.2. Pemahaman PT RAPP Tentang CSR	55
3.3. Organisasi Pelaksana CSR PT RAPP	58
3.4. Manajemen Perencanaan dan Pengawasan Program CSR/CD	66
3.5. Mekanisme Pemberdayaan Menuju Kemandirian 70	
3.6. Monitoring dan Evaluasi	73
3.7. <i>Budget</i> Program CSR	74
3.8. Perkembangan Historis Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT RAPP	75
3.9. Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT RAPP	76
3.10. <i>Community Development Program</i> PT RAPP (Program Pengembangan Masyarakat PT RAPP)	88
3.10.1. <i>Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Program</i> (Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/UMKM)	88
3.10.2. <i>Small and Medium Enterprises (SMEs) Program</i> (Program Usaha Kecil dan Menengah/UKM)	89
3.10.3. <i>Integrated Farming System (IFS)</i> (Program Sistem Pertanian Terpadu)	90
3.10.4. <i>Training Development and Capacity Building Program</i>	93
3.10.5. <i>Community Based Business Development (CBBD) Program</i>	94
3.10.6. <i>Education Program</i>	94
3.10.7. <i>Community Health Program</i>	95
3.11. Implementasi <i>Community Development Program</i> (CD) PT RAPP	97
3.11.1. Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	106
3.11.2. Budidaya Cabe	108
3.11.3. Budidaya Kacang Panjang	109
3.11.4. Budidaya Salak Pondoh	109
3.11.5. Budidaya Perikanan	111
3.11.6. Pengembangan Industri Kecil	112
3.11.7. S a p i.....	113

3.11.8. Pelelangan Sapi	114
3.11.9. Pendampingan	116
BAB IV ANALISIS	131
BAB V KESIMPULAN	159
DAFTAR PUSTAKA	167

DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN DIAGRAM

Tabel

Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau	23
Tabel 2.2.	Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Miskin Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau	25
Tabel 2.3.	Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Bantuan yang Pernah Diterima di Provinsi Riau, 2005	28
Tabel 2.4.	Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang dimiliki dan Jenis Kelamin di Provinsi Riau	31
Tabel 2.5.	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2001-2005 Provinsi Riau (%)	33
Tabel 2.6.	Distribusi PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku 2001-2005 Provinsi Riau (%)	34

Gambar

Gambar 1	Pabrik PT RAPP yang megah	53
Gambar 2	Business Platform PT RAPP	57
Gambar 3	Salah seorang anggota peneliti bersama Pejabat Pembuat Komitmen PMB-LIPI pada saat diterima oleh Tim CECOM <i>Foundation</i>	65
Gambar 4	Asrama Balai Pelatihan dan Pengembangan Usaha Terpadu (BPPUT)	66

Gambar 5	Terlihat dua orang <i>Field Officer</i> bersama karyawan PT RAPP yang sedang berpose di wilayah Kelompok Tani Jaya Makmur, Kabupaten Siak, yang merupakan Mitra Binaan PPMR PT RAPP69
Gambar 6	Mahasiswa D3 penerima beasiswa CSR PT RAPP bersama tenaga ahli asing, peneliti dan Pejabat Pembuat Komitmen PMB-LIPI78
Gambar 7	Terlihat Gedung SDN 028 Simpang Kualo dan Gedung SMA79
Gambar 8	Peneliti PMB-LIPI mengunjungi anggota kelompok IFS bidang peternakan sapi dan perkebunan salak, didampingi oleh petugas CECOM <i>Foundation</i>90
Gambar 9	Warga desa berdiri bersama Pejabat Pembuat Komitmen PMB-LIPI di depan kandang tempat menampung kotoran sapi yang akan diolah menjadi kompos91
Gambar 10	Dua di antara bangunan masjid yang didanai oleh program pemberdayaan PT RAPP96
Gambar 11	H. Zamhur sedang memberikan petunjuk kepada karyawannya di bengkel kerja pembuatan pallet, merupakan salah satu jenis usaha dalam Program SMEs100
Gambar 12	Pengembangbiakan sapi dalam program IFS103
Gambar 13	Anggota masyarakat sedang mengadakan pertemuan rutin Simpan Pinjam di Kelompok Tani Panca Karya105
Gambar 14	Kelompok tani program IFS bidang hortikultura sedang memanen sayur dan buah semangka107
Gambar 15	Petani cabe program IFS dengan hasil panennya108

Gambar 16	Peneliti PMB-LIPI tengah memetik salak hasil program IFS	110
Gambar 17	Terlihat salak jenis Pondoh yang kecil-kecil buahnya, namun manis rasanya, siap dipanen	110
Gambar 18	Kelompok tani program IFS bidang perikanan sedang memanen ikan gurami	112
Gambar 19	Madu Hutan Riau yang sudah dikemas hasil industri kecil dalam program IFS, siap dipasarkan di bawah label “Rumah Madu”	113
Gambar 20	Pemeriksaan kesehatan sapi hasil penggemukan dalam program IFS oleh dokter hewan CECOM <i>Foundation</i> sebelum ditimbang dan dilelang	115
Gambar 21	Seorang tenaga pendampingan dari CECOM <i>Foundation</i> sedang memberikan motivasi dan pengarahan kepada warga yang terlibat dalam program IFS	116
Gambar 22	Peserta pelatihan manajemen KUD, Tata Boga, Ukiran dan Mekanik Elektro sedang mengikuti pembukaan pelatihandi BLPT PPMR Pangkalan Kerinci	118
Gambar 23	Puluhan <i>Field Officer</i> CECOM mengikuti pelatihan tanggap flu burung di Gedung BPPUT PT RAPP Pangkalan Kerinci	119
Gambar 24	Pengobatan massal dan imunisasi, merupakan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PT RAPP melalui CECOM <i>Foundation</i>	121
Gambar 25	Operasi katarak juga merupakan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PT RAPP melalui CECOM <i>Foundation</i>	121

- Gambar 26 Warga masyarakat desa sedang menikmati bacaan koleksi perpustakaan “Taman Bacaan Kita” yang disediakan oleh CECOM *Foundation* 122
- Gambar 27 Anak-anak yang mengikuti sunatan massal, yang diadakan oleh CD PT RAPP 127

Diagram

- Diagram 2.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 2002-2005 di Provinsi Riau24
- Diagram 2.2. Kepala Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kotadi Provinsi Riau, 2005 (%)26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam membangun ekonomi masyarakat terdapat asumsi bahwa untuk dapat melakukan pemerataan ekonomi harus didahului oleh pertumbuhan ekonomi dan baru kemudian didistribusikan melalui *trickle down effect*, karena bila tidak, maka yang akan terjadi adalah pemerataan kemiskinan. Sebagaimana dikatakan oleh Sutikno¹ industrialisasi sebenarnya suatu jalur kegiatan untuk meningkatkan taraf hidup manusia dalam kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya. Industrialisasi mempunyai peran ganda dalam hal meningkatkan taraf hidup manusia. Secara "vertikal" industrialisasi berperan semakin memperbesar nilai tambah pada kegiatan ekonomi, sementara secara "horisontal" industrialisasi memperluas lapangan kerja produktif bagi penduduk yang semakin bertambah. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi tersebut Pemerintah mengorientasikan upayanya untuk membangun sektor industri. Atas dasar upaya tersebut akhirnya berhasil melahirkan beberapa industri besar yang kemudian menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun desain ekonomi yang diorientasikan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi semacam itu ternyata tidak serta merta melahirkan pemerataan ekonomi. Selain itu aktivitas industri seringkali mengganggu kualitas lingkungan, baik ekosistem maupun sosial. Bahkan berimplikasi terjadinya ketimpangan baik secara geografis, sektoral, maupun ketimpangan pendapatan antara orang kaya dengan orang miskin. Sebagai contoh, industri penambangan timah di Pulau Bangka mengakibatkan munculnya ribuan kolong (lubang besar) bekas penggalian biji timah sehingga sangat merusak

¹ Sutikno & Maryunani (2006), *Ekonomi Sumber Daya Alam*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, hal. 67-68.

lingkungan. Lebih jauh dari itu, secara sosial ekonomi kegiatan industri tersebut telah mendorong masyarakat yang semula menjadi petani lada beralih profesi menjadi penambang liar (TI) karena usaha penambangan tersebut meskipun merusak lingkungan namun menjanjikan keuntungan yang besar bagi pengelolanya.²

Secara makro kelemahan model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan tersebut tidak begitu tampak, karena keberhasilan pembangunan ekonomi diukur dengan menggunakan produk domestik bruto (PDB) dan pendapatan per kapita yang merupakan parameter yang bersifat agregatif. Implikasinya pembangunan ekonomi yang umumnya menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat kecil seperti sektor pertanian dan sektor industri kecil dan menengah menjadi terbengkalai. Dengan kata lain, pertumbuhan industri besar tersebut tidak memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu tidak jarang masyarakat menolak kehadiran suatu industri yang didirikan di sekitar wilayah mereka.

Membicarakan dampak perusahaan industri terhadap masyarakat sekitarnya selalu menarik dan tidak pernah menjadi usang bagi para pengamat industrialisasi, terlebih lagi sekarang ini selalu digaungkan bahwa pembangunan di Indonesia harus pro-rakyat. Selalu *up to date* nya masalah dampak industrialisasi ini karena terkait dengan banyak dimensi yang menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dampak yang ditimbulkannya cukup bervariasi, dari mulai adanya perkembangan ekonomi sebagai *multiplier effect* aktivitas industri, sampai pada relatif banyaknya biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat akibat terjadinya industrialisasi seperti keterasingan masyarakat sekitar terhadap

² Lihat Ujud Tahajuddin dkk, (2003), *Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Dalam Implementasi Otonomi Daerah: Peluang, Kendala dan Implikasi*, Pengembangan Riset Kompetitif Program Isu, LIPI, Jakarta. Juga lihat Ir. Achmad Subardja Djakamihardja dkk. (2004), *Akuntabilitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup*, Riset Kompetitif Pengembangan IPTEK, LIPI, Jakarta

industrialisasi, kerugian masyarakat karena limbah industri dan adanya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat akibat berlangsungnya industrialisasi.

Berbagai kajian juga telah menggambarkan banyaknya perselisihan yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya. Sebagai ilustrasi diperlihatkan oleh hasil kajian Iskandar Zulkarnain dkk tentang konflik yang terjadi di daerah pertambangan yang menunjukkan bahwa telah terjadi konflik antara PT. ANTAM, yang menguasai produksi tambang emas di daerah Pongkor dan Cikotok, *versus* masyarakat (*society*).” Walaupun persoalan konflik yang mengalir di permukaan lebih berwujud pada ketegangan yang terjadi antara PETI (Penambangan Tanpa Ijin) dengan perusahaan PT. Aneka Tambang Tbk, tetapi jauh pada level yang lebih dalam, bibit konflik tersebut telah tumbuh dalam bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap perusahaan yang dianggap tidak mampu meningkatkan kesejahteraan mereka, di wilayah halamannya sendiri”.³ Banyaknya perselisihan antara perusahaan dengan masyarakat antara lain juga tampak dari penegasan yang diungkapkan David Crowther yang mengatakan bahwa “*The decade has seen protests concerning the actions of organisations, exposures of corporate exploitation and unfolding accounting scandals.*”⁴ Sementara hasil penelitian Iskandar Zulkarnaen dkk. (2005: 5) menunjukkan bahwa: “Konflik terbuka juga telah terjadi beberapa kali antara perusahaan dengan masyarakat yang melakukan penambangan di kawasan penambangan perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian di kedua belah pihak. Pernah terjadi bentrokan antara PT. Koba Tin dengan masyarakat sekitar di Koba, karena masyarakat dianggap telah memasuki areal penambangan perusahaan.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (2005:16):

³ Iskandar Zulkarnain, dkk, (2004), *Konflik Di Daerah Pertambangan*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.

⁴ David Crowther, Professor of Corporate Social Responsibility, De Montfort University, UK, *special issue of Social Responsibility Journal*, Homepage of the Social Responsibility Research Network (SRRNet)

setidaknya ada empat issue yang dikonflikkan di kawasan pertambangan, walaupun intensitasnya berbeda dari satu kawasan ke kawasan lainnya, yakni:

- (a) Persoalan dalam mengakses sumberdaya tambang
- (b) Persoalan lahan yang terkena aktivitas pertambangan
- (c) Persoalan terjadinya degradasi lingkungan dan
- (d) Persoalan pemberdayaan masyarakat.

Bagi industri itu sendiri berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap masyarakat sekitar akan memberikan *negative feed back* terhadap *performance* perusahaan. Implikasi dari perselisihan yang terjadi seringkali mengakibatkan terganggu atau terhentinya aktivitas perusahaan industri tersebut. Sebagai contoh diperlihatkan oleh kasus perselisihan yang terjadi di awal tahun 2006 antara PT. Freeport dengan masyarakat sekitarnya di daerah Timika yang berakhir dengan pemblokiran akses masuk ke PT. Freeport oleh masyarakat Timika, sehingga mengakibatkan terhentinya operasi perusahaan. Bahkan ketika konflik yang terjadi akan dijembatani penyelesaiannya oleh MRP dan DPRP, berakhir dengan peristiwa pengrusakan terhadap 20 unit kendaraan⁵

Untuk meredam atau mengurangi terjadinya perselisihan semacam itu berbagai upaya telah dilakukan, baik dalam skala mikro oleh perusahaan industri seperti pemberian quota prioritas dalam merekrut karyawan yang berasal dari daerah sekitarnya, maupun dalam skala makro oleh Pemerintah seperti ketentuan tentang pengelolaan limbah industri⁶ dan kewajiban melakukan *Community Development* bagi perusahaan-perusahaan tertentu⁷. Bahkan melalui

⁵ Lihat surat kabar “Kompas” terbitan 22, 23, 24 Pebruari, dan 15 Maret 2006.

⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷ SKMBUMN Nomor 236/MBU/ Tahun 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan; dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

pemberlakuan Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemerintah mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan CSR. Semua upaya tersebut dilakukan supaya perusahaan industri tetap dapat melanjutkan aktivitasnya, dan masyarakat sekitarnya juga memperoleh *benefit* dari adanya perusahaan industri di wilayahnya. Dengan demikian terjadi hubungan yang simbiose mutualistik di antara kedua belah pihak. Hal tersebut sangat substansial seperti diungkapkan dalam hasil penelitian Iskandar Zulkarnaen (2005: 17) bahwa: konflik di kawasan pertambangan secara umum adalah sebuah konflik yang asimetris akibat adanya ketimpangan posisi di antara para *stakeholder* (perusahaan - masyarakat - Pemerintah), karena itu pengelolaan konflik di kawasan pertambangan akan dapat dilakukan dengan menyeimbangkan posisi di antara para *stakeholder* tersebut. Dalam konteks tersebut, melalui *Community Development* yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan dapat memposisikan mereka dalam posisi yang relatif seimbang. Adanya komitmen terhadap *Community Development* tentunya tidak memungkinkan perusahaan untuk mengutamakan salah satu stakeholder berada pada posisi yang lebih tinggi dari yang lainnya, meskipun mungkin saja suatu saat terjadi salah satu kelompok mendapatkan benefit dengan mengorbankan yang lainnya. Namun demikian pada dasarnya manajemen harus memelihara keseimbangan hubungan di antara para pemangku kepentingan. Karena bila tidak maka akan membahayakan perusahaan.⁸ Melalui proses *empowerment*, masyarakat diharapkan akan menjadi mandiri, sejahtera dan partisipatif.

Upaya melakukan *Community Development* seharusnya tidak menjadi beban bagi perusahaan karena pada gilirannya akan bermanfaat bagi perusahaan. *Benefit* ini secara jelas tampak dari apa yang diungkapkan David Crowther, yakni "*At the same time ethical behaviour and a concern for the environment have been shown to have a positive correlation with corporate performance. The nature*

⁸ Lihat Tom L. Beauchamp & Norman E. Bowie, editor, (1997), *Ethical Theory and Business*, Fifth Edition, Prentice Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey, p. 71

of corporate social responsibility is therefore a topical one for business and academics"⁹. Berdasarkan hasil studi Peters dan Waterman hampir semua perusahaan yang sangat bagus memiliki reputasi yang baik di dalam komunitas.¹⁰

Program-program *Community Development* merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya. Dengan adanya *Community Development*, diharapkan masyarakat sekitarnya turut mendapat manfaat dari eksistensi perusahaan yang ada di wilayahnya. Dari sisi lain, pada dasarnya aktivitas *Community Development* merupakan hal positif untuk mendekatkan perusahaan dengan masyarakat sekitarnya, karena perusahaan yang bersangkutan tidak saja memberikan keuntungan kepada masyarakat, melainkan secara sosial juga memberikan manfaat yang lebih bermakna bagi lingkungan sekitarnya yang membedakannya dari perusahaan lainnya. Dalam konteks ini John Mackey mengatakan, "*What the world wants business to do is to care about more than just making money. And that's what business must evolve to do.*"¹¹ Melalui kegiatan *Community Development* tersebut pada gilirannya menjadi salah satu resolusi konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

Secara ideal *Community Development* yang dilakukan oleh perusahaan sudah seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Masalahnya seringkali program *Community Development* yang dijalankan perusahaan kurang mengacu secara ketat pada ide dasar tentang maksud dan tujuan *Community Development*. Program-program *Community Development* sering dilakukan tanpa arah yang jelas,¹² sehingga walaupun program ini sudah berjalan relatif lama, pada umumnya masih belum memberikan hasil yang nampak secara

⁹ David Crowther, Ibid.

¹⁰ Lihat T. Peter and Waterman, (1982), *In Search of Excellence*, Harper and Row, New York

¹¹ John Cavanagh and Sarah Anderson, 1999, *Field Guide to the Global Economy*: 68, New York: New Press.

¹² Lihat Ujud Tahajuddin, et al, 2005, "Community Development Industri Petrokimia", *Internal Report*, Pranata Pola Cipta, Jakarta.

nyata. “Pola perguliran program *Community Development* hanya berorientasi jangka pendek dan cenderung digunakan untuk mengamankan jalannya operasi perusahaan. Keinginan untuk membantu mewujudkan masyarakat yang mandiri masih belum dilihat sebagai sebuah tanggungjawab sosial yang mesti diterima dan dilaksanakan. Tidak adanya mekanisme dan ruang komunikasi dialogis antara masyarakat dengan perusahaan menyebabkan pelaksanaan *Community Development* tersebut dari tahun ke tahun masih belum bisa memberikan nilai positif yang signifikan kepada masyarakat, walaupun dana yang dikeluarkan sudah mencapai milyaran rupiah. Di samping itu, program bantuan *Community Development* itu lebih banyak bersifat hibah (*charity*) daripada sebuah program yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat”.¹³ Hasil penelitian PMB-LIPI pun memperlihatkan adanya ketidakpedulian yang relatif tinggi baik pada pihak industri maupun pihak masyarakat untuk proaktif melakukan kerjasama yang bersifat simbiose mutualistik dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat.¹⁴ Implikasinya, ide *Community Development* yang esensinya untuk mengembangkan kemampuan agar tercapai kemandirian masyarakat sekitarnya tidak tercapai. Hal ini¹⁵ terjadi antara lain karena pelaksanaan program *Community Development* tidak disertai perencanaan yang matang dan komprehensif, di samping itu monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program *Community Development* pun masih kurang atau tidak dilakukan baik oleh perusahaan maupun oleh Pemerintah. Padahal evaluasi itu penting untuk memperoleh umpan balik (*feedback*) yang dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan implementasi program-program *Community Development*.

¹³ Iskandar Zulkarnain, *Op. Cit.*

¹⁴ Lihat Ujud Tahajuddin, ed., 2006, *Peran Community Development Perusahaan Industri dan Dampaknya Pada Masyarakat Sekitarnya: Studi Kasus di PT. Ades Waters Indonesia dan PT. Aqua Golden Missisipi*, LIPI Press, Jakarta.

¹⁵ *Ibid.*

Untuk kepentingan peningkatan efektivitas dan efisiensi program, beberapa perusahaan yang relatif besar seperti PT. Freeport dan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) memang telah mulai melakukan evaluasi terhadap program-program *Community Development* yang mereka lakukan. Tetapi secara makro, persentase perusahaan yang melakukan evaluasi terhadap program *Community Development* nya relatif rendah. Bahkan dari pihak Pemerintah, belum pernah melakukan evaluasi terhadap efektivitas program-program *Community Development* yang diimplementasikan perusahaan-perusahaan industri tersebut. Padahal sebenarnya ide tentang *Community development* memiliki nilai yang sangat strategis. Bila seluruh program *Community development* tersebut direncanakan dan dilakukan secara benar, akan dapat berperan sebagai embrio dalam melakukan transformasi kemampuan dan kemandirian masyarakat. Dalam konteks ini baru Kementerian Perumahan Rakyat yang mulai menyadari adanya potensi ekonomi yang dapat disinergikan untuk menciptakan kemandirian masyarakat melalui penyediaan perumahan rakyat dengan memanfaatkan dana *Community Development* yang dikeluarkan perusahaan, karena biaya kumulatif program *Community development* yang dialokasikan perusahaan dapat dikatakan relatif besar. Sementara instansi lainnya masih belum mampu menangkap nilai strategis semacam itu.

Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap berbagai program *Community Development* dari perusahaan-perusahaan industri agar dapat mengetahui bagaimana program tersebut direncanakan dan diimplementasikan, menemukan berbagai keunggulan, kelemahan dan bahkan penyimpangan-penyimpangan, untuk kemudian menyelaraskannya dengan ide tentang maksud dan tujuan *Community Development* yang sebenarnya. Dengan demikian dapat dilakukan upaya mereposisi program-program *Community Development* agar mencapai efektivitas optimal.

1.2. Masalah Penelitian

Dari deskripsi terdahulu tampak adanya penyimpangan dalam implementasi *Community Development*. Hal tersebut terjadi karena masih belum adanya suatu model panduan bagi perusahaan-perusahaan industri dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring, dan evaluasi suatu program *Community Development* bagi masyarakat sekitar yang terarah untuk mendorong terciptanya kemandirian dan proses pemberdayaan masyarakat sekitar.

Mengacu pada masalah di atas maka penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- (1) Bagaimana kondisi unit kerja pelaksana *Community Development* di perusahaan, yang menyangkut perencanaan program, kewenangan, mekanisme tata kerja, personalia, dan biaya operasional ?
- (2) Bagaimana kesesuaian antara pelaksanaan program *Community Development* dengan perencanaan yang mempertimbangan kebutuhan masyarakat sekitar terkait dengan tujuan dasar program *Community Development* yang mengarah pada pengembangan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat?
- (3) Bagaimana respon masyarakat terhadap program *Community Development* yang menyangkut persepsi, sikap tanggapan masyarakat terhadap program *Community Development* perusahaan?
- (4) Bagaimana peranan Pemerintah daerah dan kalangan LSM dalam keikutsertaannya dalam perencanaan dan pelaksanaan *Community Development* yang dilakukan oleh perusahaan?

1.3. Tujuan dan Sasaran

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pelaksanaan *Community Development* yang pernah dan sedang dilakukan perusahaan dalam relasinya dengan para *stakeholders*, serta menganalisis berbagai kelebihan dan kelemahan di setiap aspeknya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka yang menjadi sasaran penelitian ini adalah pola perencanaan dan pelaksanaan *Community*

Development yang diimplementasikan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan. Dasar pertimbangannya ialah karena perusahaan perkebunan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam secara massif seperti perusahaan-perusahaan AMDK, pertambangan, sehingga akan mempengaruhi kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitarnya.

1.4. Ruang Lingkup

Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program-program *Community Development* di lingkungan perusahaan industri dipengaruhi oleh beberapa aspek. Oleh karena itu lingkup kerja penelitian ini paling tidak akan terkait dengan beberapa aspek seperti kondisi unit kerja di perusahaan yang melaksanakan *Community Development*, termasuk di dalamnya kewenangan, mekanisme tata kerja, personalia, dan biaya operasionalisasi *Community Development*; kualitas program *Community Development* yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan dan tujuan *Community Development*; respon masyarakat terhadap program *Community Development* termasuk di dalamnya persepsi, sikap tanggapan masyarakat terhadap program *Community Development*; posisi Pemerintah daerah dan kalangan LSM dalam perencanaan dan pelaksanaan *Community Development*. Pada prinsipnya lingkup penelitian ini terfokus pada area penelitian yang diperlukan untuk menjawab berbagai permasalahan penelitian.

1.5. Kerangka Konseptual

Ide *Community Development* adalah untuk mengembangkan kemampuan agar tercapai kemandirian masyarakat. Melalui implementasi kegiatan *Community Development* masyarakat sekitar yang menjadi sasaran kegiatan diharapkan menjadi tidak tergantung kepada perusahaan pemberi *Community Development*. Implikasinya, dalam pengembangan program *Community Development*, upaya yang dilakukan harus diorientasikan untuk memposisikan masyarakat

sebagai pelaku utama (aktor, subyek) pembangunan, tidak hanya sekedar sebagai obyek pembangunan.

Dalam konteks di atas, pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat *“people centered, participatory, empowering and sustainable.”* (Chambers, 1983: 32). Memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk melepaskan masyarakat dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Menurut *Alberta Community Development* (1999:14):

“Community Development aims at getting people together to identify their own needs and make decisions regarding leadership, source and use of resources and priorities.

Dalam konteks di atas, penyelenggara *Community Development* mengambil peran untuk menyediakan bantuan dan dukungan teknis dalam rangka mendorong inisiatif, menolong diri sendiri, dan saling tolong menolong di antara partisipan. Sementara *UN ad hoc Group of experts on Community Development* (1963: 4) memberikan penjelasan:

“Community Development is the process by which the efforts of the people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economic, social and cultural conditions of communities to integrate these communities into the life of the nation, and to enable them to contribute fully to national progress. This complex of processes is therefore, made up of two essential elements: the participation by the people themselves in efforts to improve their level of living, with as much reliance as possible on their own initiative and the provision of technical and other services in ways which encourage: initiative, self-help and mutual help and make these more effective. It is expressed in programs designed to achieve a wide variety of specific improvements.”

Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan (Craig dan Mayo, 1995). Sebaiknya, orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan berpartisipasi. Persoalannya, pola kebijakan yang selama ini dilaksanakan lebih kuat datang dari atas ke bawah (*top-down*) daripada dari bawah ke atas (*bottom-up*), sehingga partisipasi masyarakat pun menjadi tereliminasi.

Secara substansial, program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat dibedakan dalam tiga kategori:

- Pertama* : Program yang dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif terhadap komunitas (kompensasi dan rehabilitasi)
- Kedua* : Program yang menguntungkan kedua pihak, baik industri maupun komunitas (misalnya *joint business*)
- Ketiga* : Program yang terutama menguntungkan komunitas (misalnya program bantuan pembangunan gedung sekolah).

Namun sesungguhnya hanya dua jenis terakhir saja yang benar-benar dapat dianggap sebagai program pengembangan masyarakat, karena jenis yang pertama lebih cenderung sebagai program rehabilitasi. Meskipun demikian semua jenis program tersebut merupakan wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan yang berdampak langsung dan tidak langsung terhadap pengembangan perusahaan. Bahkan berdampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan, terutama pada perusahaan yang berada di tengah-tengah komunitas dengan perbedaan struktur ekonomi, sosial dan budaya yang ekstrim.

Untuk mengetahui apakah suatu program pengembangan masyarakat berhasil atau tidak, maka diperlukan *assessment* yang akurat. Sehingga temuan dan rekomendasi dari *assessment* ini dapat

bermanfaat bagi kegiatan pengembangan masyarakat dan kelangsungan hidup perusahaan, guna terciptanya korelasi yang harmonis antara masyarakat dan perusahaan.

Gambaran yang akurat dari suatu program pengembangan masyarakat yang berhasil/sukses harus menggunakan indikator-indikator pencapaian (**Monev: Monitoring dan Evaluasi**) yang dapat menunjukkan jumlah pihak yang berpartisipasi dalam program, peningkatan penghasilan atau ketersediaan fasilitas tertentu. Tanpa indikator-indikator tersebut kita tidak dapat secara pasti menyimpulkan apakah kegiatan-kegiatan tertentu sudah mencapai target atau melebihi target. Dalam ketiadaan indikator-indikator tersebut kita masih dapat menggunakan indikator-indikator dan penilaian subyektif yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam program. Hal ini termasuk pemberian rating terhadap program dengan konsep-konsep seperti “sukses”, “tidak ada perbedaan” dan “gagal”.

Penilaian tersebut masih harus dilanjutkan dengan analisa lebih jauh untuk mengetahui apakah kegagalan terjadi dalam bentuk program atau hanya dalam perencanaan atau pelaksanaannya. Analisis yang lebih lanjut biasanya dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya empat faktor dalam pelaksanaan *Community Development*. *Pertama*, adanya proses *bottom-up* yang asli; *Kedua*, peran dari penasehat terpercaya dan instruktur; *Ketiga*, mekanisme *discentive*; dan *Keempat*, koordinasi dengan badan-badan lainnya.

Di dalam pengembangan masyarakat (*Community Development*), perusahaan yang melakukan kegiatan atau program *Community Development* pertama-tama diharapkan dalam tahap perencanaan kegiatannya harus memasukkan analisis terhadap berbagai unsur yang ada dalam masyarakat, khususnya kebutuhan nyata bagi pengembangan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat yang bersangkutan, sebagai sasaran kegiatan pengembangan masyarakat (*Community Development*) itu sendiri. Dalam konteks *Community Development*, banyak kegunaan penerapan teknik pada bagian-bagian tertentu proses *Community*

Development. Dalam *Community Development*, diperlukan teknik-teknik khusus untuk meneliti dan menganalisa suatu situasi, membuat perencanaan dan keputusan, untuk memecahkan masalah dan meresolusi konflik, membangun kelompok dan membangkitkan kesadaran masyarakat sebagai sasaran kegiatan.

Secara konseptual, pada saat dimulainya proses *Community Development*, perusahaan yang melakukan kegiatan *Community Development* harus siap membangun hubungan dengan pihak-pihak yang terkait dan masyarakat sekitar untuk mempertahankan komitmen dan kohesifitasnya. Dua prinsip dasar dalam membangun komunitas adalah menciptakan hubungan-hubungan dan kemudian membuat kesepakatan bersama untuk melakukan aksi bersama. Sebelum membangun hubungan-hubungan, fasilitator harus mengklarifikasi peran mereka sendiri dalam proses. Ketika menjalin kontak dengan anggota masyarakat, perusahaan harus memperoleh persetujuan mereka atas kehadiran perusahaan yang bersangkutan.

Tahap selanjutnya dalam metode adalah mendengarkan isu-isu yang dimunculkan dengan pikiran terbuka, tidak untuk menghakimi atau menyarankan pemecahan. Hal ini membutuhkan disiplin dan sangat memakan waktu, tetapi esensial untuk membangun hubungan. Teknik mendengarkan secara aktif dapat diterapkan di sini. Kita bisa menanggapi apa yang sedang dibicarakan, dengan mengulang dan memastikan bahwa yang kita dengar adalah apa yang dibicarakan dan mungkin berbagi pengalaman kita sendiri. Dengan cara ini kita menciptakan dialog dan membangun ikatan tentang kesepahaman bersama. Kesepahaman bersama tentang isu-isu ini diperluas dengan cara menghubungkannya dengan orang-orang yang mempunyai perhatian sama.

Namun ikatan antara individu juga seringkali tidak cukup untuk membangun masyarakat berdaya dengan aksi publik. Pada beberapa tahap, semua pembicaraan perlu dijadikan kesepahaman bersama tentang isu apa yang diangkat. Setelah itu baru dapat disatukan secara bersama untuk melakukan aksi publik guna memfasilitasi isu-isu tersebut. Penting dalam tahap ini, untuk

memastikan bahwa semua komunitas terlibat, khususnya mereka yang di pinggiran, atau tidak diuntungkan. Mereka harus yang pertama didekati, karena merekalah yang paling banyak akan memperoleh manfaat dari *Community Development*.

Analisa komunitas akan memberikan dasar-dasar untuk diskusi dan teknik pengambilan keputusan yang dapat digunakan dalam mencapai kesepakatan. Setelah ada kesepakatan tentang isu-isu yang dihadapi komunitas, isu tersebut diprioritaskan dan perlu dicapai kesepakatan untuk menentukan mana yang akan dilaksanakan sebelum memutuskan taktik dan aksi yang dapat dibuat. Penerapan metode yang baik dapat membangun sebuah komunitas atau menggerakkan sebuah komunitas dari kemacetan. Walaupun metode adalah dasar dalam membangun komunitas, masih diperlukan sedikit analisa dan taktik untuk menjadikannya sebuah proses yang seimbang.

Singkatnya, program pengembangan komunitas yang sukses memerlukan koordinasi antar badan di dalam proyek, mendorong “keikutsertaan *bottom-up* yang asli”, dengan instruktur/penasehat yang profesional dan dipercaya yang bertindak sebagai fasilitator, dan “menerapkan suatu mekanisme *discentive* yang sah”, menempatkan program dalam suatu “hubungan sinergis dan harmonis” dengan lembaga-lembaga lainnya.

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa seyogyanya suatu kegiatan atau program *Community Development* yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan industri haruslah didukung oleh suatu sistem manajerial dan organisasional yang memadai, dimulai dengan unsur perencanaan program, sistem kewenangan, mekanisme tata kerja, personalia, dan biaya operasionalisasi *Community Development* yang matang, serta penjaminan melalui monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan program *Community Development* dengan perencanaan yang mempertimbangan kebutuhan masyarakat sekitar terkait dengan tujuan dasar program *Community Development* yang mengarah pada pengembangan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Dalam operasionalnya organisasi pelaksana *Community*

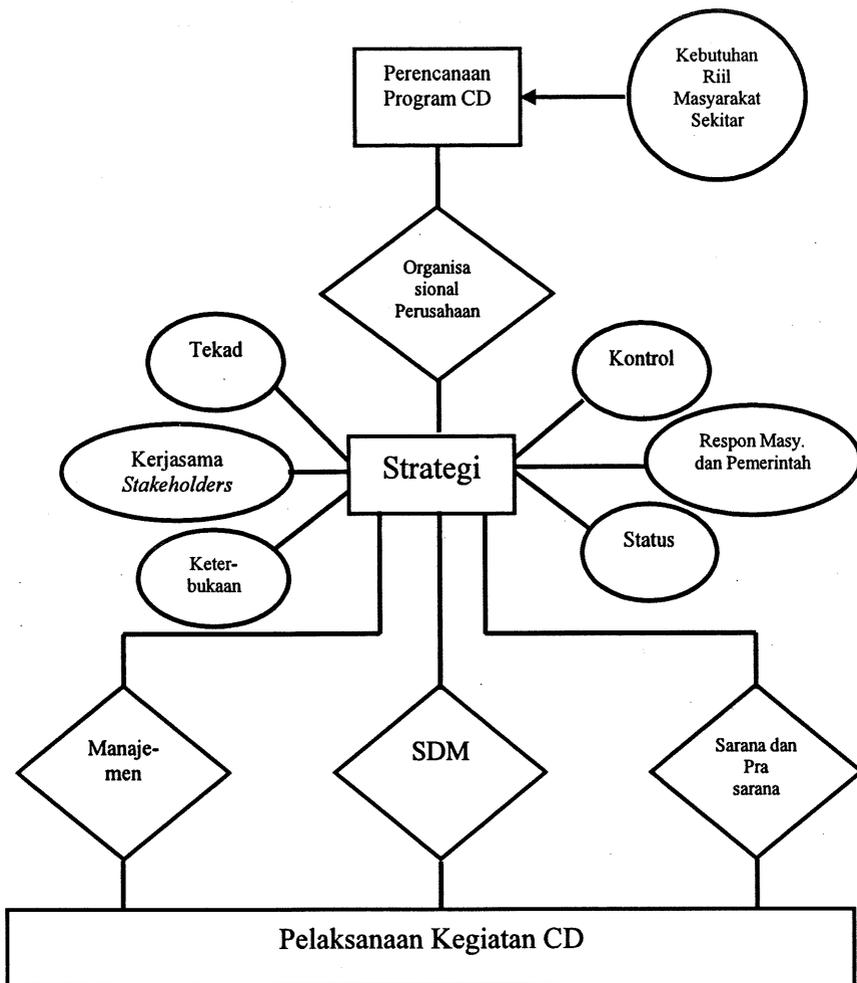
Development perlu menggalang hubungan yang sinergis dan harmonis dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan *Community Development* tersebut, seperti hubungan dengan Pemerintah daerah dan kalangan LSM.

Dari pola pikir yang telah diuraikan pada bagian atas mengindikasikan bahwa seyogyanya program *Community Development* yang akan dirancang harus menjamin bahwa kebutuhan riil masyarakat sekitar, sebagai sasaran kegiatan, dapat ditampung dan diejawantahkan dalam *Community Development* yang bersangkutan. Untuk itu kegiatan awal dari suatu *Community Development* haruslah dimulai dengan pendekatan dan pemahaman kebutuhan dari sasaran *Community Development* itu sendiri. Dengan demikian program yang akan dilaksanakan tidak lagi tergantung pada apa yang dipikirkan oleh pihak perusahaan sebagai suatu hal yang baik, tetapi berdasar pada apa yang memang dibutuhkan dan nantinya bermanfaat bagi masyarakat sekitar untuk menuju pada peningkatan kemandirian dan pemberdayaan mereka.

Langkah selanjutnya ialah bahwa rancangan program *Community Development* tersebut haruslah dapat dituangkan atau dioperasionalisasikan dalam suatu sistem organisasional perusahaan yang memadai, dalam arti didukung oleh suatu sistem manajemen yang mengarah pada upaya tercapainya tujuan dasar dari program *Community Development* itu sendiri.

Untuk memudahkan pemahaman, kerangka konseptual di atas dapat dibangun dalam bentuk bagan seperti di bawah ini:

Konsep Model Kegiatan *Community Development*



1.5. Metodologi

1.5.1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Artinya, data yang diperoleh di lapangan digunakan untuk memverifikasi dan mengembangkan konsep dan teori yang telah ada. Sementara itu, unit analisisnya terdiri dari organisasi perusahaan yang mengelola *Community Development*, program *Community Development*, masyarakat sekitar yang menjadi sasaran program *Community Development* dan LSM yang terkait.

1.5.2. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan diperoleh dengan cara pengumpulan data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa dokumen-dokumen yang menyangkut ketentuan tentang unit pelaksana *Community Development* dan program-program *Community Development*. Sementara itu data primer akan diperoleh dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan di daerah yang dipilih secara *purposive*, seperti pejabat dan karyawan yang terlibat dalam implementasi *Community Development*, pejabat Pemda yang berkaitan dengan implementasi *Community Development*, LSM, para tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam program *Community Development*. Adapun instrumen penelitian yang akan dipakai adalah *interview guide* dan *focus group discussion (FGD)*.

1.5.3. Analisis Data

Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Data dan informasi yang berhasil dihimpun dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kerangka analisis seperti telah diuraikan di atas pada bagian kerangka konseptual. Hasil analisis penelitian tahun 2008 ini akan dijabarkan dengan hasil-hasil penelitian pada tahun-tahun sebelum dan selanjutnya untuk menjadi bahan dalam menyusun model implementasi *Community*

Development yang dapat meningkatkan efektivitas *Community Development*.

1.5.4. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan skenario besar penelitian ini, pada tahun 2008 lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Riau. Lokasi tersebut dipilih karena di propinsi tersebut terdapat perusahaan perkebunan dalam skala besar yang sudah mengembangkan program *Community Development*. Melalui penelitian yang lebih mendalam terhadap program-program *Community Development* yang telah dan sedang dilakukan di lokasi tersebut diharapkan akan berguna bagi pengembangan program *Community Development*.



BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Kewilayahan

Dengan disahkannya Undang-undang No.25 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, maka Provinsi Riau telah menjadi dua Provinsi, yakni Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Riau saat ini terdiri dari 11 kabupaten/kota yang semula 16 Kabupaten/Kota. Kabupaten/kota yang masih bergabung dengan Provinsi Riau adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir serta Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.

Peta Provinsi Riau



Sumber: *Atlas Indonesia dan Dunia*, CV Pusaka Agung Harapan, Surabaya.

Sebelum terjadi pemisahan tersebut Provinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan. Di daerah perairan terdapat 3.214 pulau besar dan kecil. Sebanyak 743 pulau telah memiliki nama dan sisanya belum. Mayoritas pulau-pulau kecil yang tersebar di perairan Laut Cina Selatan belum berpenghuni. Dengan luas sekitar 329.867,61 km², sebesar 71,33% merupakan daerah perairan/lautan. Daerah lautan yang berbatasan dengan negara lain diperkirakan secara ZEE (Zone Ekonomi Eksklusif) adalah 379.000 km². Setelah ada pemisahan, terjadi perubahan luas wilayah yang dimiliki Provinsi Riau. Saat ini luas Provinsi Riau, terdiri dari daratan 104.957,24 km² (data sementara) dan luas lautannya kurang lebih 29.991,04 km².

2.2. Kependudukan

Berdasarkan data Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, penduduk yang tersebar di Kabupaten/Kota dari tahun 2002 – 2005 sebagian besar adalah para transmigran yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan pengungsi Aceh. Sedangkan pada tahun 2006 belum diperoleh data lagi mengenai realisasi penempatan transmigrasi di Provinsi Riau. Namun demikian, jumlah penduduk Provinsi Riau Tahun 2007 tercatat 4.764.205 jiwa, dengan persebaran penduduk yang tidak merata di masing-masing Kabupaten/Kota. Bila dilihat dari Kabupaten/ Kota di mana PT RAPP beroperasi di Riau, maka kota Pekanbaru memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 754.448 jiwa, diikuti Kabupaten Kampar 555.146 jiwa, Kabupaten Siak 302.132 jiwa dan Kabupaten Indragiri Hulu 295.291 jiwa. Sementara Kabupaten Pelelawan yang menjadi konsentrasi operasional PT RAPP, hanya berpenduduk 253.308 jiwa, masih di atas jumlah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi. Persebaran jumlah penduduk pada masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat secara rinci pada Tabel 2.1 berikut:

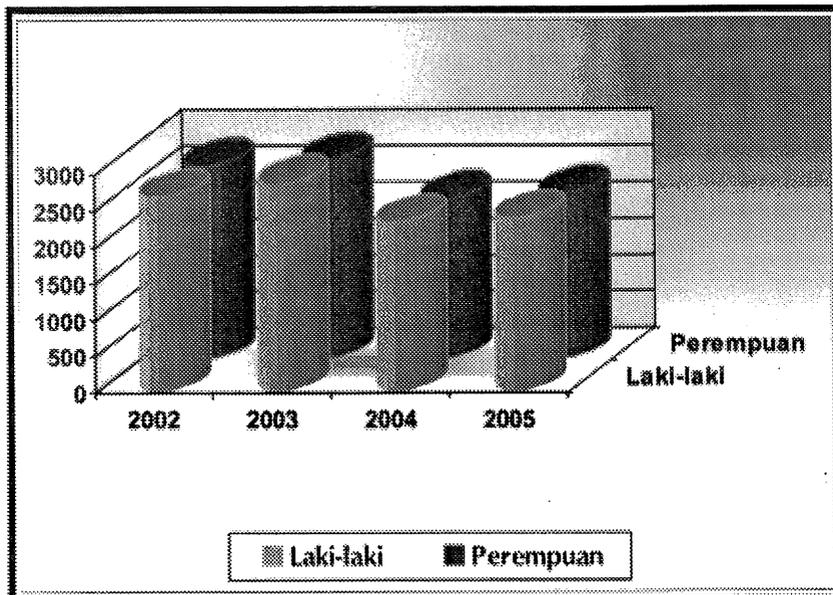
Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/
Kota di Provinsi Riau

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kuantan Singingi	249.606
2.	Indragiri Hulu	295.291
3.	Indragiri Hilir	647.512
4.	Pelalawan	253.308
5.	S i a k	302.132
6.	K a m p a r	555.146
7.	Rokan Hulu	346.848
8.	Bengkalis	708.363
9.	Rokan Hilir	421.310
10.	Pekanbaru	754.448
11.	D u m a i	230.191
Jumlah		4.764.205

Sumber: Riau Dalam Angka 2007, BPS.

Berdasarkan pendataan penduduk 2002-2005 oleh BPS, maka melalui Diagram 2.1. berikut akan terlihat perkembangan penduduk menurut jenis kelamin. Terlihat bahwa di tahun 2003 terjadi kecenderungan pola yang sama dalam hal bertambahnya penduduk laki-laki maupun perempuan. Sementara di tahun 2005 bahkan terjadi penurunan jumlah penduduk, di mana perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan juga sama polanya dengan yang terjadi pada tahun 2004. Kendati terjadi penurunan jumlah penduduk di tahun 2005, namun ada sedikit pertambahan penduduk laki-laki maupun perempuan dari tahun 2004.

Diagram 2.1.
 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 2002-2005
 di Provinsi Riau



Sumber: Riau Dalam Angka 2006, BPS.

Tidak dapat dipungkiri bahwa di setiap daerah ataupun Kabupaten/Kota selalu ada sebagian penduduk yang tergolong miskin. Berdasarkan data dari BPS (2006), 1.008.321 jiwa (22,3%) dari total penduduk Riau adalah penduduk miskin. Sementara dari 977.288 Rumah Tangga, 231.508 di antaranya adalah tergolong Rumah Tangga Miskin. Kendati Kota Pekanbaru memiliki jumlah penduduk terbanyak di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, ternyata hanya 10,91% dari penduduknya tergolong miskin.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Miskin Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah RT	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah RT Miskin
1.	Kuantan Singingi	243.768	56.923	66.920	16.764
2.	Indragiri Hulu	296.712	65.793	93.297	21.340
3.	Indragiri Hilir	624.450	136.385	199.497	46.235
4.	Pelalawan	220.887	51.320	40.631	10.064
5.	S i a k	286.245	64.127	62.715	13.331
6.	K a m p a r	532.493	113.921	122.504	30.626
7.	Rokan Hulu	340.732	76.492	71.006	17.878
8.	Bengkalis	637.103	126.081	140.463	29.617
9.	Rokan Hilir	440.894	92.296	95.932	21.155
10.	Pekanbaru	704.517	148.532	76.841	16.158
11.	D u m a i	215.783	45.418	38.515	8.340
Jumlah		4.543.584	977.288	1.008.321	231.508

Sumber: Riau Dalam Angka 2006, BPS.

Sebaliknya di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu, bahkan masing-masing 31,95% dan 31,44% dari total penduduknya tergolong miskin. Demikian pula halnya di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Bengkalis, masing-masing 23,01% dan 22,02% dari total penduduknya tergolong miskin. Di antara seluruh penduduk miskin tersebut, sebanyak 607.976 orang (60.3%) berada di 7 kabupaten/kota di mana PT RAPP beroperasi.

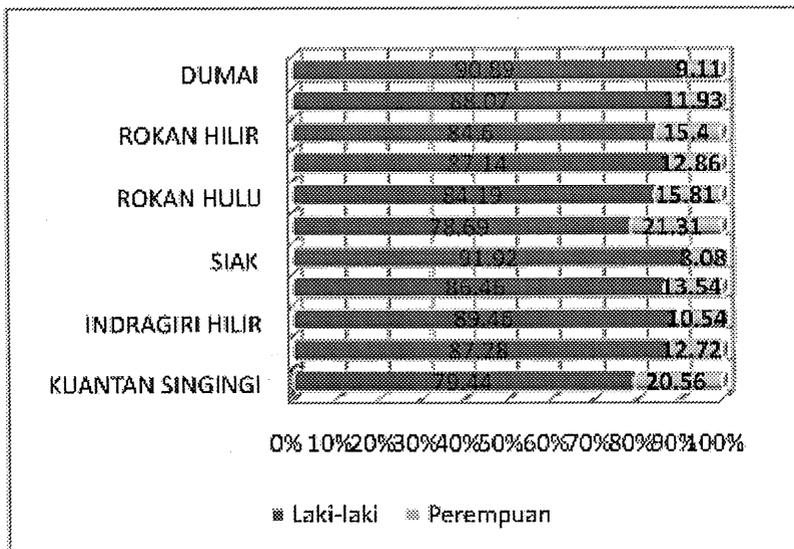
Melihat perbandingan jumlah Rumah Tangga Miskin dari total Rumah Tangga di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, terlihat berturut-turut Kabupaten Indragiri Hilir (33,90%), Kabupaten Indragiri Hulu (32,44%) dan Kabupaten Kuantan Singingi (29,45%) yang memiliki persentase tinggi.

Terkait dengan rumah tangga miskin, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau telah melakukan pendataan penduduk/keluarga miskin berdasarkan jenis kelamin pada tahun

2005. Adapun persentase jumlah persebaran rumah tangga miskin berdasarkan jenis kelamin dapat dicermati melalui Diagram 2.2 berikut.

Diagram 2.2.

Kepala Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2005 (%)



Sumber: Pendataan Penduduk/Keluarga Miskin 2005, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau.

Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak orde baru sampai era reformasi sekarang ini pada dasarnya bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Tujuan ini semakin mengemuka sejak otonomi daerah mulai dicanangkan. Dengan pemberian otonomi yang lebih luas, daerah mempunyai wewenang yang lebih besar untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pekerjaan besar daerah saat ini adalah mengangkat penduduk/keluarga miskin dari kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Riau yang sangat tinggi seperti terlihat dalam tabel 2.2 di atas sepatutnya mendorong Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten/kota untuk memfokuskan kegiatan pengentasan kemiskinan dalam program-program pembangunan yang mereka susun. Pemprov Riau memang telah meluncurkan banyak program pengentasan kemiskinan, baik yang bersifat sentralistik maupun yang spesifik lokal. Program pengentasan kemiskinan yang bersifat sentralistik seperti Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), sedang yang bersifat lokal seperti Program bantuan modal melalui Ekonomi Kerakyatan.

Pada era 1990an, Pemerintah Pusat telah meluncurkan Program IDT, yang merupakan program bantuan modal secara bergulir pada kelompok masyarakat. Program ini tidak berjalan lama, dan pada tahun ketiga pelaksanaannya dihentikan. Selanjutnya pada pertengahan tahun 1997, Indonesia mengalami awal krisis ekonomi yang berdampak terhadap segala aspek kehidupan masyarakat. Dampak dari kondisi tersebut sangat dirasakan oleh penduduk, terutama kelompok sosial ekonomi rendah atau miskin.

Berbagai program pengentasan kemiskinan diluncurkan kembali oleh pemerintah, antara lain Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Salah satu programnya antara lain adalah Operasi Pasar Khusus (OPK) beras. Namun, program ini hanya berlangsung beberapa tahun saja, kemudian program yang hampir serupa juga dilaksanakan namun dengan nama yang berbeda, yaitu Program Beras Miskin. Program-program pengentasan kemiskinan lainnya adalah Pemberian Bea Siswa, Kartu Sehat, Dana Bergulir, dan lain-lain.

Berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan itu nampak belum membuahkan hasil yang maksimal. Ini ditandai dengan jumlah penduduk miskin di Riau yang masih tinggi sampai sekarang. Untuk mencapai hasil yang maksimal, Pemprov Riau dan penda/pemkot sepatutnya melibatkan perusahaan-perusahaan yang memiliki badan CSR guna menyusun program-program pemberdayaan masyarakat secara integral. Berbagai perusahaan yang telah memiliki badan CSR tersebut pada

umumnya telah memiliki kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam program *Community Development* yang dilaksanakan setiap tahun. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi dan penda/pemkot dapat mengikutsertakan PT RAPP dalam musrenbang yang mereka adakan. Dengan demikian, peran program *Community Development* PT RAPP sebagai pendukung program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun penda/pemkot akan berjalan sebagaimana mestinya.

Secara umum, berbagai program bantuan bagi penduduk miskin mempunyai tujuan yang sangat baik, namun apapun program yang telah dilaksanakan selalu mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya. Hal ini bisanya tidak hanya menyangkut sasaran program, tetapi juga pelaksanaan program itu sendiri di lapangan.

Dari hasil pendataan penduduk/keluarga miskin di Provinsi Riau tahun 2005 juga dimonitor pelaksanaan program bantuan kemiskinan terhadap keluarga miskin. Hasilnya adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3. berikut.

Tabel 2.3. Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Bantuan yang Pernah Diterima di Provinsi Riau, 2005

No.	Kabupaten/Kota	Tdk dapat Bantuan	Jenis Bantuan yang diterima					
			Beras Miskin	Bea Siswa	Dana Bergulir	Kartu Sehat	Sertifikat Lahan	Lainnya
1.	Kuantan Singingi	673	14.822	979	233	5.093	668	221
2.	Indragiri Hulu	2.462	16.907	1.390	870	2.397	873	990
3.	Indragiri Hilir	10.526	30.859	1.659	467	3.819	1.566	1.998
4.	Pelalawan	2.204	6.958	350	148	578	128	494
5.	S i a k	6.501	4.799	880	416	913	1.258	1.479
6.	K a m p a r	7.547	20.778	600	661	5.635	1.221	1.063
7.	Rokan Hulu	2.199	14.251	833	373	1.720	1.656	503
8.	Bengkalis	3.465	24.321	1.143	313	1.564	259	603
9.	Rokan Hilir	8.829	8.840	814	281	2.368	441	1.700
10.	Pekanbaru	6.016	8.499	1.038	442	1.678	372	354
11.	D u m a i	3.777	3.882	461	99	668	51	238
Jumlah		54.199	154.916	10.147	4.303	26.433	8.493	8.164

Sumber: Pendataan Penduduk/Keluarga di Provinsi Riau 2006, BPS.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat lebih dari 54.000 rumah tangga miskin yang belum pernah mendapat bantuan dalam bentuk apapun, sebaliknya yang pernah mendapat bantuan Program Beras Miskin hanya 154.916 rumah tangga. Sungguh menarik jika angka ini dibandingkan dengan jumlah rumah tangga miskin yang sudah diidentifikasi.

Berkaitan dengan program redistribusi lahan untuk rumah tangga miskin, dari 231.508 rumah tangga miskin (lihat Tabel 2.3.) yang telah teridentifikasi pada kegiatan pendataan penduduk/keluarga miskin, ada sekitar 8.493 rumah tangga telah mendapatkan sertifikat lahan yang tersebar di seluruh Provinsi Riau. Kabupaten/Kota yang paling banyak menerimanya adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Siak, Kampar dan Rokan Hulu.

Program bantuan kemiskinan yang telah dilaksanakan, sebagaimana yang berhasil dimonitor melalui kegiatan ini, sangat dirasakan manfaatnya oleh yang menerimanya. Bentuk kemiskinan yang paling banyak diungkapkan masyarakat adalah kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, sehingga dalam kaitan ini, Program Beras Miskin merupakan solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan terhadap program-program di atas. *Pertama*, adalah munculnya berbagai penilaian bahwa program ini banyak salah sasaran. *Kedua*, adalah bahwa bantuan pangan, beasiswa, kartu sehat seyogyanya merupakan bantuan yang sifatnya sementara dan hanya untuk keadaan darurat. Bantuan semacam itu, terutama beras miskin, hanya diperlukan pada saat terjadi bencana atau kesulitan pangan sebagai bagian dari perlindungan sosial, dan bukan program yang dapat mengangkat masyarakat miskin dari jerat kemiskinan.

Terkait dengan pemberian bantuan pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah seyogyanya juga proaktif memberikan bantuan dalam bentuk pemberdayaan secara arif, dalam arti memberi kail bukan ikannya kepada penduduk miskin, didukung dengan bimbingan serta pendampingan yang berkesinambungan. Pemerintah daerah

berkewajiban menyusun *Master Plan* pengembangan wilayah yang di dalamnya secara khusus terdapat rencana pengembangan atau pembangunan kapasitas masyarakat (mencakup pembangunan ekonomi, SDM, kualitas kesehatan dan aspek sosial politik) yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan adanya *Master Plan* diharapkan program-program pemerintah, melalui dinas-dinas terkait yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, dalam pelaksanaan pemberdayaan tidak bersifat sektoral dan parsial.

Pemerintah daerah dalam upaya memberikan bantuan kepada penduduk miskin tentunya dapat bekerjasama dengan *stakeholder* (para pemangku kepentingan) baik dalam bentuk pendanaan, konsultasi/advokasi, maupun dalam bentuk lainnya. Misalnya pembiayaan program pemberdayaan masyarakat dari alokasi dana dalam APBD dapat disinergikan dengan dana pemberdayaan yang berasal dari perusahaan dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah terkait dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan kepada masyarakat/penduduk miskin dapat diberikan semaksimal mungkin dan mencapai sasaran serta tujuan yang diinginkan.

2.3. Pendidikan

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Pendidikan yang semakin maju akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan jika pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

Terkait dengan kondisi pendidikan di Provinsi Riau, berdasarkan data Tahun 2006, provinsi ini memiliki 722 Sekolah Taman Kanak-Kanak, 3.507 Sekolah Dasar dengan jumlah murid masing-masing sebanyak 43.622 siswa dan 724.132 siswa dengan rasio murid terhadap guru masing-masing, 14,42 dan 25,93. Sedangkan untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tercatat 1.079

sekolah dengan jumlah murid 260.714 siswa dan rasio murid terhadap guru sebesar 26,98. Untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas tercatat 225 sekolah, dengan jumlah murid 42.067 siswa tanpa diketahui rasio murid terhadap guru.

Dilihat dari penduduknya yang memiliki ijazah tertinggi, mayoritas berpendidikan Sekolah Dasar (1.219.543), dan jumlah tertinggi kedua adalah mereka yang bahkan tidak memiliki ijazah (826.517) karena mungkin memang tidak pernah mengenyam pendidikan atau tidak pernah menamatkan pendidikan hingga Sekolah Dasar. Persebaran jumlah penduduk lainnya yang memiliki ijazah dapat dilihat secara rinci pada Tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang dimiliki dan Jenis Kelamin di Provinsi Riau

No.	Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Tidak Punya	383.092	443.425	826.517
2.	Sekolah Dasar	603.241	616.302	1.219.543
3.	SLTP (umum dan Kejuruan)	400.693	322.754	723.447
4.	SMU (Umum)	294.572	270.265	564.837
5.	SMU (Kejuruan)	87.414	46.340	133.754
6.	Diploma I/II	8.048	17.390	25.438
7.	Akademi/Diploma III	20.124	17.231	37.355
8.	Universitas/Diploma IV/S2/S3	46.287	34.040	80.327
Jumlah		1.843.471	1.767.747	3.611.218

Sumber: Riau Dalam Angka Tahun 2006, BPS.

2.4. Ketenagakerjaan

Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Karena itu tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan berpengaruh pada tingginya tuntutan akan penyediaan (*supply*) lapangan kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa

diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran dan setengah pengangguran.

Hasil survei Angkatan Kerja Nasional 2005 mencatat bahwa komposisi antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja untuk penduduk berusia 10 tahun ke atas di Provinsi Riau tidak jauh berbeda di semua Kabupaten/Kota. Persamaan ini terlihat pada nilai persentase angkatan kerja yang tidak jauh berbeda dengan persentase bukan angkatan kerja, berkisar di antara 50%. Kabupaten dengan persentase angkatan kerja terbesar adalah Kuantan dan Singingi dan Siak, masing-masing sebesar 55,29% dan 54,47%. Sedangkan Kabupaten dengan nilai persentase angkatan kerja terkecil adalah Kampar dan Rokan Hilir, masing-masing sebesar 47,87% dan 49,10%.

Dari total angkatan kerja yang bekerja, sebagian besar terserap di sektor pertanian (52,24%), diikuti oleh sektor perdagangan, rumah makan, dan hotel serta jasa-jasa, masing-masing sebesar 13,69% dan 12,65%.

Sementara jumlah pencari kerja pada tahun 2005 tercatat 12.303 orang, terdiri dari 6.934 pencari kerja laki-laki dan 5.369 orang perempuan. Dari jumlah tersebut sebanyak 11.642 orang (94,63%) di antaranya berusia antara 10-29 tahun dan sisanya 661 orang (5,37%) berusia 30 ke atas.

2.5. Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan PDRB Provinsi Riau pada tahun 2005 tercatat sebesar 8,53%, sedikit mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 9,01%. Pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor pertambangan non migas karena peningkatan produksi batu bara, sementara sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menempati urutan kedua. Pertumbuhan sektor pertambangan yang mencapai 27,24% di tahun 2005 disebabkan sedang dilakukannya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan batu bara di daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu yang

diprediksi di masa mendatang pertambangan batu bara ini akan menjadi salah satu komoditas primadona Riau selain minyak bumi.

Sementara itu, pertumbuhan tertinggi kedua terjadi di sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, yang bila dicermati disebabkan oleh pertumbuhan aktivitas sub sektor bank yang meningkat tajam. Pertumbuhan ekonomi sub sektor bank mencapai 49,76% kendati sedikit melambat dibanding tahun yang lalu sebesar 52,78%.

Selain kedua sektor di atas, beberapa sektor lainnya mengalami pertumbuhan yang tinggi pula. Beberapa sektor dengan pertumbuhan ekonomi di atas 9% seperti sektor angkutan dan komunikasi; sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri dan sektor listrik dan air bersih, yang masing-masing tumbuh sebesar 10,29%, 9,08% dan 9,20%.

Tabel 2.5. Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2001-2005 Provinsi Riau (%)

No.	Sektor	2001	2002	2003	2004	2005
1.	Pertanian	6,08	6,06	6,32	7,00	6,77
2.	Pertambangan dan Penggalian	8,97	12,47	19,63	34,07	27,24
3.	Industri Pengolahan	9,95	8,88	9,89	10,14	9,08
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	8,14	8,05	3,10	10,44	9,20
5.	Bangunan	12,59	7,69	6,34	9,10	7,15
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	9,00	9,20	10,81	9,37	10,15
7.	Angkutan dan Komunikasi	10,81	11,50	11,20	11,85	10,29
8.	Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan	12,31	12,96	12,86	18,92	18,18
9.	Jasa-jasa	8,13	8,06	6,87	9,06	7,89
Total PDRB		8,18	7,80	8,17	9,01	8,53

Sumber: Pendapatan Regional Riau Menurut Lapangan Usaha 2001-2005, BPS.

Sektor lainnya yang memiliki pertumbuhan cukup tinggi, yaitu sektor pertanian. Kendati tumbuh di atas 6%, namun dibanding sektor-sektor lainnya, sektor pertanian memiliki pertumbuhan paling kecil, yaitu 6,77%. Pertumbuhan yang lambat terjadi pada sub sektor tanaman bahan makanan karena rendahnya produksi tanaman bahan makanan akibat alih fungsi lahan serta melambatnya sub sektor kehutanan akibat adanya peraturan *illegal logging* yang menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan di sektor ini.

Struktur ekonomi Provinsi Riau secara sektoral menggambarkan kontribusi atau peran setiap sektor ekonomi terhadap total perekonomian di Provinsi Riau. Melalui kontribusi ini, maka dapat diukur seberapa besar kemampuan dari setiap sektor ekonomi dalam menggerakkan roda perekonomian.

Tabel 2.6. Distribusi PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku 2001-2005 Provinsi Riau (%)

No.	Sektor	2001	2002	2003	2004	2005
1.	Pertanian	38,18	36,61	37,51	36,66	38,17
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,61	0,60	0,61	0,72	0,85
3.	Industri Pengolahan	27,13	30,63	31,79	32,68	31,86
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	0,45	0,43	0,46	0,41	0,38
5.	Bangunan	5,49	5,66	5,35	4,88	4,39
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	13,33	11,81	11,16	11,47	11,54
7.	Angkutan dan Komunikasi	4,29	4,02	3,69	3,56	3,40
8.	Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan	2,07	2,49	2,64	3,07	3,25
9.	Jasa-jasa	8,45	7,75	6,79	6,54	6,17
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Pendapatan Regional Riau Menurut Lapangan Usaha 2001-2005, BPS.

Dari Tabel 2.6. tampak bahwa struktur ekonomi tanpa migas di Provinsi Riau pada tahun 2005 masih didominasi oleh tiga sektor, yaitu sektor pertanian (38,17%), sektor industri (31,86%), dan sektor perdagangan (11,54%), yang kesemuanya memberikan kontribusi sebesar 81,47%. Dengan memperhatikan peran yang besar dari ketiga sektor tersebut diharapkan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah diarahkan untuk dapat mempertahankan sekaligus mendorong berputarnya roda perekonomian dari ketiga sektor ini.

Kontribusi terbesar terhadap perekonomian Provinsi Riau berasal dari sektor pertanian. Perkembangan pesat pada sektor perkebunan dan sub sektor perikanan memberi banyak kemajuan pada sektor pertanian secara keseluruhan. Selanjutnya, diikuti oleh peran industri terutama akibat kemajuan yang dicapai pada industri pengolahan kertas, industri pengolahan kayu, dan industri pengolahan kelapa sawit.

Tabel 2.6. juga menunjukkan bahwa peran sektor perdagangan, hotel dan restoran cukup besar, yaitu 11,54%. Hal ini terutama disebabkan oleh kegiatan sub sektor perdagangan besar dan eceran yang perputaran barang dan jasanya cukup cepat, seperti kendaraan bermotor, barang elektronik. Selain itu mungkin bermunculannya pusat-pusat perbelanjaan baru menjadikan perputaran barang semakin cepat.

Sementara itu, sektor jasa pada tahun 2005 memberikan kontribusi sebesar 6,17% terhadap perekonomian di Provinsi Riau. Kendati memiliki kontribusi terbesar keempat, namun kontribusinya cenderung menurun dalam beberapa tahun belakangan, yang di antara lain disebabkan oleh menurunnya kontribusi sub sektor pemerintahan umum.

Sektor pertambangan non migas yang memiliki pertumbuhan tertinggi, ternyata memberikan kontribusi yang kecil, yaitu sebesar 0,84%. Hal ini mungkin karena produksi komoditi batu bara masih pada tahun awal dieksploitasi dan dieksplorasi.

2.6. RTRWP Riau

UU Nomor 24 Tahun 1992 menetapkan, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dilakukan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun untuk jangka waktu 25 tahun, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) untuk jangka waktu 10 tahun, dan RTRWP itu sendiri untuk jangka waktu 15 tahun. Revisi dapat dilakukan setiap lima tahun. Sebelum ada RTRWP, pengaturan mengenai Kerungan Wilayah daratan Riau mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173, tahun 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Dalam TGHK dan RTRWP Riau tersebut, luas daratan Riau adalah 9.456.160 hektar (termasuk Provinsi Kepulauan Riau sekarang). Dalam TGHK, pembagian pemanfaatan ruang didasarkan pada lima klasifikasi fungsi hutan, yaitu Hutan Suaka Alam dan Wisata, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi tetap, dan Hutan Produksi Konversi. Sementara itu, RTRWP membagi pemanfaatan ruang menjadi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung meliputi Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Hutan Suaka Alam, Kawasan Perlindungan Setempat, dan kawasan yang memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya. Sementara Kawasan Budidaya meliputi Kawasan Hutan Produksi, Perkebunan, Industri, Pariwisata, Pertanian, Pemukiman dan lain-lain, dan Kawasan Prioritas.

RTRWP Riau yang disusun tahun 1994 untuk jangka waktu 1994-1999 telah direvisi sejak tahun 2001 hingga tahun 2005. Dalam RTRWP Revisi, diketahui 1.146.533 dari total 1.942.744 hektar Kawasan Lindung RTRWP 1994 hilang. Jumlah terluas yang hilang terjadi pada Kawasan Lindung Gambut di Semenanjung Kampar dan Kawasan Lindung Bukit Betabuh. Namun demikian, ditemukan pula kawasan baru yang dijadikan kawasan lindung seluas 701.413 hektar. Bagaimanapun, dalam RTRWP revisi final, kawasan lindung yang semula dihilangkan dimasukkan kembali menjadi kawasan lindung, hingga luas keseluruhannya menjadi 2.342.059 hektar.

Penataan ruang ini penting agar setiap kebijakan pembangunan yang disusun Pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota tidak keluar dari arahan pemanfaatan ruang yang sudah ada. Tata Ruang secara implisit juga memuat pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal penetapan perubahan status kawasan hutan, pemberian izin alokasi ruang untuk investasi maupun pengembangan pemukiman/perkotaan dan pedesaan, dan lain-lain. Dari perspektif ekologis, tata ruang berfungsi untuk memberikan kepastian bagi perlindungan/pelestarian terhadap kawasan, ekosistem, dan habitat yang memiliki nilai ekologis tinggi. Maknanya semakin luas bila dilihat dari pendekatan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

2.7. Dana Reboisasi

Dana reboisasi merupakan kompensasi terhadap kubikasi kayu hutan alam yang hilang akibat dieksploitasi oleh perusahaan industri kehutanan, yang dibayarkan kepada Pemerintah sesuai dengan kuantitas dan kualitas hutan yang akan dieksploitasinya. Dana tersebut didistribusikan oleh Pemerintah melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) ke setiap daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proporsi pembagian DAK disesuaikan dengan luas hutan yang dimiliki suatu daerah atau luas hutan yang telah dieksploitasi. Jumlah dana tersebut cenderung meningkat setiap tahun sesuai dengan peningkatan luas lahan kritis akibat eksploitasi. Total DAK-DR Riau tahun 2001-2003 adalah 295 miliar dengan rincian 81.7 miliar tahun 2001, 113.2 miliar tahun 2002, dan 100.5 miliar tahun 2003. Tambahan pula, terdapat dana Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) bernilai 64.8 miliar. Realitanya, luas tutupan hutan di Riau semakin menurun meskipun dana reboisasi mengucur ke daerah-daerah karena dana tersebut sebagian diduga dikorupsi oleh pejabat Kab/Kota, pimpinan proyek, dan kontraktor pelaksana reboisasi.

2.8. PT RAPP

2.8.1. Profil Perusahaan

Saat ini PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) yang dimiliki oleh *Asia Pacific Resources International Holding Limited* (APRIL) didirikan pada tahun 1992 di bawah konglomerasi Raja Garuda Mas (RGM) beroperasi di lima daerah Kabupaten dan satu Kota yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kota Pekanbaru. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah operasi PT RAPP di Provinsi Riau cukup luas.

Kegiatan rutin *Plant site* (pabrik) yang dilaksanakan oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper Indonesia berada di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, berjarak 75 km dari Pekanbaru. Untuk mencapainya dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam perjalanan dengan mobil. Kehadiran perusahaan ini mendorong pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi lokal sehingga menjadi sebuah kota yang berkembang pesat. Eksistensi PT RAPP juga menstimulasi perwujudan gagasan pembentukan Kabupaten Pelalawan sebagai pemekaran dari Kabupaten Kampar pada 1999.

Daerah Pangkalan Kerinci awalnya adalah sebuah dusun yang dibangun oleh Pemda Riau untuk menampung 150 KK korban bencana alam banjir yang berasal dari Kuala Terusan. Pembangunan pertama dimulai dengan membangun 150 unit rumah yang disediakan bagi mereka. Meskipun sebelum PT RAPP berdiri sudah terdapat perusahaan perkebunan sawit di daerah ini, akan tetapi pengaruhnya bagi kemajuan daerah tidak signifikan karena lokasinya jauh di dalam/pedalaman. Kehadiran PT RAPP pada tahun 1993 telah mempercepat laju perkembangan daerah ini seiring dengan kehadiran kontraktor-kontraktor dan pekerja yang terlibat dengan aktivitas perusahaan. Perusahaan menjamin semua bisnis yang berkualitas mendapat kesempatan memasok dan melayani kontrak kerja dengan prioritas kepada perusahaan kontrak lokal. Misalnya, pengangkutan kayu dari HTI ke pabrik, Riau Pulp melakukan kontrak dengan sejumlah perusahaan transportasi milik perusahaan lokal. Tidak lama

kemudian, jumlah penduduknya meningkat dengan cepat, terutama para migran yang kemudian menjadi penduduk permanen. Fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang dibutuhkan sebuah kota besar seperti jalan, penerangan jalan, transportasi, sudah tersedia dalam waktu relatif singkat.

Kerjasama PT RAPP dengan Pemda Provinsi Riau dan Pemda Kabupaten Palawan menyebabkan daerah ini berkembang lebih cepat. Perusahaan ini mensuplai 7 megawatt kebutuhan daya listrik kawasan ini dari sekitar 340 megawatt daya listrik PT RAPP, yang disalurkan terlebih dahulu kepada PLN dengan biaya/ yang lebih rendah. Di samping itu, sekitar 11 Km jalan Lintas Timur di Palalawan dan sekitar 300 Km jalan di sekitar Indragiri Hulu, Siak, Kuansing yang dibangun oleh PT RAPP dapat juga diakses oleh masyarakat umum, kecuali oleh mereka yang dengan sengaja membawa kayu-kayu *illegal logging*. Dalam perspektif CSR, pada dasarnya pemasangan daya listrik dan pemanfaatan jalan oleh masyarakat termasuk bagian dari implementasi CSR perusahaan.

Selain pembangunan infrastruktur, keberadaan perusahaan ini turut meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat setempat yang mengandalkan kehidupan dari sektor pertanian. Hasil pertanian seperti sayur-mayur mereka jual ke pasar untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang jumlahnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Selain dari sektor pertanian, penduduk Pangkalan Kerinci memperoleh pendapatan dari rumah-rumah sewa yang mereka sewakan kepada buruh atau karyawan perusahaan tersebut.

Riau Pulp adalah produsen pulp terbesar di dunia, sebagian besar hasil produksinya untuk ekspor. Pabrik PT RAPP berada dalam Riau Komplek, menempati areal seluas 1.750 hektar, termasuk *mill area* (kawasan pabrik), komplek pemukiman karyawan, sebuah hotel berbintang tiga untuk melayani pelanggan dan masyarakat umum, fasilitas ibadah, sarana olah raga, plus fasilitas lainnya untuk karyawan dan masyarakat sekitar. Pabrik ini menggunakan teknologi pulp dan kertas mutakhir. Sebagai perusahaan *multipurpose* (kertas

multiguna), salah satu produksinya yang terkenal adalah Paper One yang berkualitas tinggi dan sudah mendunia.

PT RAPP berkembang dengan pesat. Sejak tahun 2002 hingga kini, kapasitas terpasang industrinya meningkat dari 1,3 juta ton ketika awal berdiri menjadi 2 juta ton atau setara dengan kebutuhan bahan baku kayu 9,5 juta ton m³ setiap tahun. Bahan baku yang dibutuhkan industri perusahaan pulp and paper adalah kayu Akasia. Bahan baku ini diperoleh dari konsesi 160.000 hektar hutan tanaman industri (HTI) miliknya yang tersebar di empat kabupaten di Riau. Lokasi *Forestry* (Hutan Tanaman Industri) tersebar di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Pekanbaru. Sebagian besar hutan tanaman tersebut berada di atas rawa gambut dan beberapa sektor berdekatan dengan kawasan konservasi penting, di antaranya adalah Suaka Margasatwa Kerumutan, Suaka Margasatwa Bukit Rimbang-Bukit Baling, Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil, dan Taman Nasional Tesso-Nillo¹. Sejak Oktober 2004 konsesi HTI-nya meningkat menjadi 235.000 hektar setelah memperoleh ijin prinsip bagi penambahan 75.000 hektar lagi.

PT RAPP berusaha dari waktu ke waktu untuk mengurangi ketergantungan bahan baku industri dari hutan alam. Riau Mandiri, 3 November 2003, hal. 15, menurunkan berita sebagai berikut:

“Menurut Munoz, Manajer Lingkungan APRIL, bahan baku RAPP bersumber dari penanaman akasia di areal HTI RAPP sendiri seluas netto 192.000 hektar. Areal HTI kemitraan dengan perusahaan lain seluas 150.000 hektar serta lokasi HTR [HTI] seluas 39.000 hektar. Dengan demikian, RAPP telah memiliki kesatuan lahan seluas 381.000 hektar. Padahal untuk pemenuhan kapasitas 2 juta ton pulp per tahun hanya dibutuhkan 300.000 hektar. Realisasi penanaman akasia hingga September 2003 mencapai 187.000 hektar (62%) dari keseluruhan areal

¹ FWI, 2004. Diolah dari Peta HTI & Kawasan Konservasi, Dishut Provinsi Riau, 2003.

yang direncanakan. Diperkirakan pada tahun 2008 RAPP tidak lagi memanfaatkan bahan baku Serpih (BBS) dari IPK atau *Land Clearing* hutan alam”.

Untuk menjawab tuntutan konsumen dunia terhadap produk-produk industri kayu dari hutan tropis PT. RAPP mengajukan permohonan sertifikasi produksi hutan tanaman lestari (Sertifikasi PHTL). Dilihat dari tiga faktor yang menjadi prasyarat untuk mendapatkan Sertifikasi PHTL memberi kesan bahwa optimisme RAPP tersebut terkesan berlebihan. Meskipun berhasil memenuhi ketentuan Pemerintah tentang realisasi penanaman sekurang-kurangnya 60% dari keseluruhan areal hutan tanaman miliknya, namun untuk pemenuhan bahan baku hanya mendekati 5,5 juta m³ sehingga RAPP tetap kesulitan memperoleh tambahan bahan baku sebesar 4 juta m³ untuk menghasilkan 2 juta ton pulp setiap tahun. Selain faktor produksi, Sertifikasi PHTL mensyaratkan pula faktor ekologi dan sosial untuk memperoleh sebutan pengelolaan hutan tanaman yang lestari dan bebas konflik.

2.8.2. Persoalan Seputar Kehadiran PT RAPP

2.8.2.1. Aspek ekologi

Persebaran satwa hutan rawa gambut di kawasan hutan tanaman RAPP sangat terbatas dan tak dapat diabaikan begitu saja. Misalnya, Sungai Kampar yang merupakan muara beberapa anak sungai yang berhulu di Cagar Alam Bukit Bungkok dan Suaka margasatwa Bukit Rimbang-Bukit Baling pernah meluap pada awal April 2003 dan menenggelamkan 1.362 bangunan yang tersebar di 39 desa di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan². Luapan Sungai kampar tersebut berkaitan erat dengan perilaku pengelolaan daerah tangkapan air terutama di kawasan hulu, misalnya penggunaan lahan dan tutupan vegetasinya. Selain itu, terdapat persoalan seputar interaksi RAPP sebagai perusahaan hutan tanaman dengan masyarakat lokal seperti dengan masyarakat Desa Kuntu di sebelah

² Media Indonesia, 4 April 2003.

Utara kawasan Suaka Margasatwa bukit Rimbang-Bukit Baling. Disepakati bahwa PT RAPP menggunakan 1.500 hektar tanah ulayat masyarakat adat Kuntu, tetapi hasil pemetaan yang dilakukan masyarakat menunjukkan lahan yang digunakannya mencapai 1800 hektar. Persoalan lain adalah belum adanya tanggapan perusahaan atas tuntutan masyarakat adat Kuntu terhadap biaya *pancung alas* senilai sepuluh ribu rupiah atas setiap ton kayu akasia yang ditebang dari tanah ulayat Kuntu. Biaya *pancung alas* adalah biaya penggantian atas hasil bumi yang diambil untuk kepentingan komersial, dan akan dikembalikan ke alam dalam bentuk pengelolaan.³

Kasus lain adalah konflik RAPP dengan masyarakat Desa Situgai yang dapat diselesaikan oleh BPN Kabupaten Kuantan Sengingi dengan mengharuskan RAPP memberikan ganti rugi dalam bentuk pembangunan Balai Desa dan jalan. Tuntutan masyarakat atas biaya pancung alas, pembangunan rumah adat, dan bantuan sapi belum terpenuhi. Konflik terbuka kedua pihak terjadi pula pada awal November 2004 dalam bentuk pengrusakan rumah-rumah masyarakat Desa Koto Baru oleh karyawan RAPP. Kehadiran RAPP menimbulkan pula kecemburuan antar desa lantaran masyarakat Desa Petai memperoleh *fee* senilai seribu rupiah bagi setaip ton kayu akasia yang lewat di desa tersebut.

Jelaslah bahwa masalah seputar Sertifikasi PHTL perusahaan pulp ini berkaitan dengan lima prinsip penyelenggaraan kehutanan sebagaimana tertera dalam Pasal 2 UU Nomor 41 Tahun 1999, yaitu asas manfaat dan lestari, asas kerakyatan dan keadilan, asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan masih perlu dipertanyakan.

2.8.2.2. Eksploitasi dan Masa Depan Hutan Riau

Kondisi kritis hutan alam Riau sepanjang tahun 2004-2005 disebabkan eksploitasi hebat oleh penebangan liar (*illegal logging*)

³ Buletin Alam Sumatera, Vol. I No. 4, hal. 10.

dan perusahaan pemegang izin konsesi (*legal logging*). Akibatnya, timbul bencana banjir dan kabut asap lantaran tutupan hutan alam berkurang seluas 200 ribu hektar. Selama kurun waktu 1982-2005, tutupan hutan alam Riau yang sudah hilang mencapai 3,7 juta hektar. Pada tahun 1982, tutupan hutan alamnya masih meliputi 78% (6.415.655 hektar) dari 8.225.199 hektar luas daratan Riau (8.265.556,15 hektar setelah dimekarkan). JIKALAHARI mencatat tutupan hutan alam Riau tahun 2005 hanya tersisa seluas 3.210.563,139 hektar atau 35% (data lain menyebut 2.743.198 hektar atau 33%) dari 8,98 juta hektar total luas daratan Provinsi Riau. Sejak 1984 hingga 2005, hutan alam Riau rata-rata hilang seluas 150 ribu hektar per tahun. Menurut WWF Indonesia, tutupan hutan alam yang tersisa tersebut tersebar di 8 blok, yaitu Rokan Hilir, Giam Siak Kecil, Libo, Semenanjung Kampar, Kerumutan, Bukit Tigapuluh, Rimbang baling, Tesonilo.

Eksplorasi hutan dipastikan akan terus berlangsung karena sebagian besar hutan alam yang tersisa sudah dikuasai oleh perusahaan besar swasta bidang perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Perusahaan Bubur Kertas, APRIL (*Asia Pacific Resources Holdings Limited*), yaitu induk PT RAPP (*Riau Andalan Pulp and Paper*), menguasai 278.371 hektar, dan perusahaan APP (*Asia Pulp and Paper*), yaitu induk PT IKPP (*Indah Kiat Pulp and Paper*) beserta mitranya menguasai 511,331 hektar, 390.471 hektar dikuasai oleh perusahaan perkebunan, dan 834,249 hektar oleh 19 perusahaan HPH. Sementara itu, aktivitas penebangan liar sudah mulai masuk ke kawasan Lindung.

Pada tahun 2000, misalnya, industri kehutanan legal yang beroperasi di Riau berjumlah 312 unit yang terdiri dari 19 unit industri kayu lapis (*plywood*), 270 unit *sawmill*, 27 unit *moulding*, 3 unit *chip mill*, dan 2 unit industri *pulp and paper*. Keseluruhannya berkapasitas produksi 4,9 juta ton per tahun dengan kebutuhan bahan kayu mencapai 15,8 juta meter kubik per tahun. Kemampuan produksi hutan alam saat ini hanya sekitar 1,1 juta meter kubik. Pada tahun 2005, jumlah perusahaan industri meningkat menjadi 559 unit.

Industri pulp and paper pertama di Riau adalah PT Indah Kiat Pulp and Paper (APP Group) yang beroperasi pertama kali pada tahun 1980-an di Parawang, kabupaten Siak (dulunya Kabupaten Bengkalis). Kemudian pada tahun 1993 diikuti oleh PT RAPP (APRIL Group) yang beroperasi di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan (dulunya Kabupaten Kampar). Kedua perusahaan ini membutuhkan 18 juta meter kubik kayu per tahun untuk memproduksi 4 juta ton pulp. Dapat dipastikan kekurangan bahan bakunya dipenuhi dengan melakukan konversi hutan menjadi hutan tanaman industri (HTI) melalui konsesi hutan atau disuplai dari hutan alam selama bertahun-tahun. Dari 1,6 juta hektar hutan konsesi yang mereka kuasai, 543.000 hektar merupakan kawasan milik masyarakat adat.

2.8.2.3. Berbagai Pelanggaran

Berdasarkan RTRWP Riau 1994 sekitar 38.877 hektar areal HTI PT RAPP sektor Pelalawan berada di kawasan lindung. Ini sangat bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi.⁴

Keseluruhan areal HTI PT RAPP Sektor Pelalawan berada pada kawasan hutan gambut yang memiliki kedalaman lebih dari 3 meter. Ini jelas bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab IV Pokok-pokok Kebijaksanaan Kawasan Lindung, Bagian Pertama Kawasan yang memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya, Pasal 10, Kriteria kawasan bergambut adalah tanah

⁴ Jikalahari, 15 Januari 2007, *Tanggapan Sertifikasi Bertahap Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari PT RAPP Sektor Pelalawan di Kabupaten Pelalawan dan Siak Propinsi Riau*, PHTL RAPP Pelalawan.

bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa.⁵

Areal HTI PT RAPP Sektor Pelalawan berada di kawasan hutan alam. Ini bertentangan dengan penjelasan UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 28, usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam, serta pelanggaran-pelanggaran ketentuan perundangan-undangan lainnya.⁶

Terobosan hukum yang cukup penting dalam sektor kehutanan adalah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 (18 Maret 2005) tentang pemberantasan *illegal logging* dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia. Regulasi ini dilanjutkan dengan pembentukan satuan Operasi Lapangan yang disebut Operasi Hutan Lestari (OHL) dengan melibatkan semua instansi terkait di setiap tingkatan. Selain itu, Pemprov Riau mengeluarkan SK Gubernur tentang Tim Pemberantasan Illegal Logging yang diketuai oleh Wakil Gubernur pada tanggal 21 Oktober 2005. Realisasinya, inspeksi mendadak (sidak) ke titik-titik rawan *illegal logging* dilakukan secara intensif, seperti di kawasan Sungai Gaung, Kab. Indragiri Hilir dan kawasan Sungai Giam Siak Kecil, Kab. Bengkalis. Meskipun berhasil mengamankan ribuan tual kayu gelondongan dan kayu olahan, akan tetapi pihak kepolisian gagal menangkap para cukong pelaku utamanya.

Menyikapi hal ini, Gubernur Riau membuat surat edaran ke seluruh Bupati/Walikota pada tanggal 14 Desember 2005. Butir-butir pentingnya adalah perintah pembentukan Tim Pemberantasan *illegal logging* di tingkat Kab/Kota, instruksi agar Bupati/Walikota dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang ada di daerah patuh pada ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau, dan instruksi agar menindak tegas pelaku yang mengeluarkan SKT atau sertifikat di atas kawasan hutan. Hal ini penting karena

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

SKSHH sering dijadikan tameng oleh cukong atau aktor intelektual illegal pelaku kejahatan kehutanan (*forest crime*). Lebih-lebih lagi terdapat banyak SKSHH palsu di Riau.

Penegakan hukum yang terkesan lamban dan setengah hati terhadap pelaku kejahatan kehutanan seperti illegal logging, korupsi dana reboisasi dan lain sebagainya, dan ambisi Pemerintah untuk terus menarik investasi diprediksi akan semakin memperparah kerusakan hutan alam Riau pada tahun 2006.

2.8.2.4. Izin HTI/IUPHHK Tanpa Kendali

Pemerintah Pusat melalui Menteri Kehutanan M. S. Ka'ban pada tanggal 14 Juni 2005 telah menentukan target pembangunan Hutan Tanaman Industri di Indonesia hingga mencapai 5 juta hektar pada tahun 2009. Luas HTI saat ini adalah 2,16 juta hektar. Kebijakan ini dalam konteks Riau memerlukan penjelasan lebih lanjut, karena perusahaan bubuk kertas, APRIL/RAPP dan APP/IKPP Group yang berkapasitas produksi 4 juta ton per tahun, tidak pernah serius menanam HTI untuk memenuhi kebutuhan bahan baku yang telah mencapai 18 juta meter kubik per tahun. Saat ini, APRIL/RAPP dengan 12 tahun operasi memiliki izin seluas 681.788 hektar dan APP dengan 23 tahun operasi memiliki izin seluas 1.137.028 hektar, tetapi mereka baru mampu membangun 30% dari 4 juta ton total kebutuhan industri terpasangnya per tahun. Artinya, mereka hanya mau mengeksploiasi hutan alam untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Ada indikasi mereka melakukan apa saja untuk mendapatkan kayu alam, dan terus mengajukan izin perluasan konsesi di atas hutan alam. APRIL, misalnya, terus *melobby* Pemerintah untuk menguasai Hutan Alam Gambut Dalam di Semenanjung Kampar dan Pulau Padang seluas 215.790 hektar untuk mengeksploasi kayu alamnya. Kedua perusahaan ini juga memanfaatkan secara maksimal kewenangan Kepala daerah dalam mengeluarkan izin HTI atau IUPHHK-HK melalui mitra-mitra mereka untuk mendapatkan izin eksploitasi hutan alam.

Luas keseluruhan Konsesi HTI yang sudah memiliki izin di Riau saat ini adalah 1.600.399,50 hektar. 50% daripadanya (819.955,32 hektar) masih berupa hutan alam yang segera akan dikonversi menjadi HTI oleh APP (511.331,30 hektar), NI (30.252,68 hektar), dan APRIL (278.371,34 hektar). Sementara itu, 1.457.379,57 hektar hutan alam akan hilang untuk arahan pemanfaatan HTI (Hutan Produksi).⁷

Sehubungan dengan izin HTI yang terkendali, telah terjadi banyak pertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Pasal 5, Ayat 1 berbunyi: "Areal hutan yang dapat diusahakan sebagai areal HTI adalah kawasan hutan produksi tetap yang tidak produktif." PP Nomor 34 Tahun 2002, Ayat 3: "Usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar di hutan produksi." Demikian pula dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000, tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, seperti pada Pasal3, ayat 1:

"Areal hutan yang dapat dimohon untuk Usaha Hutan Tanaman adalah areal kosong di dalam kawasan hutan produksi dan/atau areal hutan yang akan dialih fungsikan menjadi kawasan Hutan Produksi serta tidak dibebani hak-hak lain. Ayat 2, Dalam hal alih fungsi kawasan hutan menjadi kawasan hutan produksi, maka prosedurnya harus berkoordinasi dengan DPRD dan disetujui Menteri atas rekomendasi Gubernur. Ayat 3, Keadaan topografi dengan kelerengan maksimal 25% dan topografi pada kelerengan 8% sampai dengan 25% harus diikuti dengan upaya konservasi tanah. Ayat 4, Penutupan vegetasi berupa non hutan (semak belukar, padang alang-alang, dan tanah kosong) atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat berdiameter 10 cm untuk semua

⁷ Jikalahari, RTRWP & Masa Depan Hutan Alam Riau: Sebuah Masukan dan Bahan Pertimbangan Untuk Revisi Perda No. 10 Tahun 1994 Tentang RTRWP Riau, Hal 7, www.jikalahari.Org

jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5 m³ per hektar. Ayat 5, terdapat masyarakat di sekitar hutan sebagai sumber tenaga kerja. Ayat 6, Pada prinsipnya tidak dibenarkan melakukan penebangan hutan alam di dalam Usaha Hutan Tanaman, kecuali untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana yang tidak dapat dihindari dengan luas maksimum 1% dari seluruh luas Usaha hutan Tanaman melalui peraturan yang berlaku. Ayat 7, Bagian-bagian yang masih bervegetasi hutan alam di dalam areal usaha hutan tanaman, *dienclave* sebagai blok konservasi untuk diadakan pengamanan oleh pemegang izin usaha hutan tanaman yang bersangkutan dari berbagai gangguan sehingga dapat berkembang menjadi hutan alam yang baik.”⁸

2.8.2.5. RAPP dan Pasokan Bahan Baku

Terdapat dua pernyataan yang saling berlawanan tentang kecukupan bahan baku bagi produksi RAPP. Pertama, pernyataan dari Direktur Eksekutif Greenomics, Elfian Effendi. Ia menyatakan bahwa perusahaan pulp and paper PT RAPP sepanjang tahun 2007 diketahui mengalami kelebihan bahan baku hingga sekitar 1,56 juta meter kubik, bukan defisit seperti yang mereka akui. Pasokan bahan baku konsumsi PT RAPP yang disetujui Departemen Kehutanan adalah 9 juta meter kubik, namun realisasinya mencapai 10,57 juta meter kubik. Ia menilai ini merupakan bentuk pembohongan publik (*laying of public*) dari manajemen RAPP. “Data resmi realisasi pemenuhan bahan baku yang dikeluarkan pihak RAPP justru menunjukkan mereka surplus bahan baku.” Karena itu, Greenomics akan meminta Departemen Kehutanan melakukan audit terhadap kelebihan bahan baku RAPP tersebut, dan meminta Komisi IV DPR-RI mengklarifikasi data realisasi RAPP tahun 2007 tersebut karena RAPP dianggap telah melakukan provokasi publik. Pernyataan ini sekaligus membantah pernyataan manajemen RAPP yang mengaku sangat kekurangan bahan baku akibat operasi pemberantasan

⁸ Ibid.

pembalakan liar di kawasan HTI di Provinsi Riau sepanjang tahun 2007.⁹

Pembohongan publik juga terlihat dari somasi sejumlah LSM sehubungan dengan *release* dan pemasangan iklan oleh PT RAPP di berbagai media nasional dan lokal, yang tidak jujur menjelaskan nilai dari 3 aspek yang dijadikan dasar penilaian yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, ekologi, dan produksi, sehingga publik tidak pernah tahu dengan pasti akan kelemahan dan kekurangan PT RAPP dan nilai akhir sertifikasinya. Berbeda dengan RAPP, ia mengatakan bahwa PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) justru kekurangan bahan baku sebesar 3,8 juta meter kubik karena hanya mampu mengonsumsi bahan baku sebesar 10,2 juta meter kubik dari 14 juta meter kubik pasokan yang disetujui Departemen Kehutanan.¹⁰

⁹ Greenomics, (2008) RAPP Kelebihan Bahan Baku, Jakarta, Antara 25/3

¹⁰ Ibid.

BAB III

PROGRAM CSR DAN COMMUNITY DEVELOPMENT PT RAPP

3.1. PT RAPP dan Deforestasi

PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) merupakan salah satu industri bubur kertas dan kertas terbesar di Riau. PT RAPP merupakan anak perusahaan APRIL Group (*Asia Pacific Resources International Holding Limited*) yang memproduksi serat (fiber), bubur kertas dan kertas dan merupakan bagian dari Raja Garuda Mas International (RGMI) milik taipan Sukanto Tanoto (Tan Kaung Ho). PT RAPP memiliki areal konsesi seluas 326.340 hektar yang tersebar di empat kabupaten yakni Kampar, Pelalawan, Siak dan Kuantan Singingi. Selain itu RAPP juga memiliki areal Hutan Tanaman Industri (HTI). Kemitraan seluas 379.213 hektar dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 39.786 hektar, sehingga total luas areal mencapai 745.339 hektar.

“Pelestarian lingkungan menjadi perhatian, yang diintegrasikan dalam setiap aspek pengelolaan HTI. Dengan diraihnya ISO 14001, sistem manajemen lingkungan perusahaan menyediakan kerangka kerja bagi pihak manajemen untuk meminimalisir dampak buruk dari proses pembibitan kayu Akasia, penanaman, pemotongan kayu (*log*), dan sampai proses produksi, dengan *Environment Management System*.

Sebagai bukti tingginya komitmen terhadap lingkungan, perusahaan mensosialisasikan laporan manajemen tentang lingkungan untuk tahun 2002 yang dilaporkan tahun 2003, tentang keadaan lingkungan di sekitar *site plan* untuk tahun 2003 dilaporkan tahun 2004. Dalam publikasi resmi berjudul *APRIL Fact Sheet*, PT RAPP melaporkan tentang *sustainability, community development, Illegal logging, conservation management, sustainable wood supply*, dan *land dispute*. Laporan ini sebagai akuntabilitas penanganan aspek

sosial dan lingkungan kepada publik, sehingga kemajuan dan kekurangan dalam pengelolaan dapat diketahui secara luas.

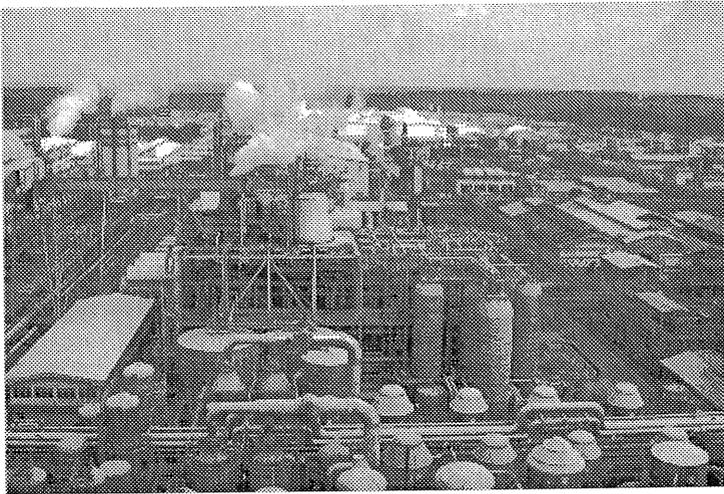
Dalam proses produksi yang menggunakan teknologi tinggi, PT RAPP mematuhi standardisasi nasional dan internasional untuk meminimalisir dampak limbah terhadap udara, air, dan tanah, dan secara terus menerus menanamkan pengetahuan kepada karyawan terhadap pentingnya kelestarian lingkungan, karena mereka beroperasi dan tinggal di tengah kebun yang sekelilingnya hutan alam yang besar pengaruhnya terhadap ekosistem, yang dimulai dari lingkungan tempat tinggal (perumahan), lingkungan kerja (kantor HTI, pabrik), dan tempat pelayanan umum lainnya.

Perusahaan pun membuat kebijakan tertulis tentang pelestarian lingkungan, yang disosialisasikan kepada *stakeholder*, termasuk kepada Tim Bapedalda Kabupaten Pelalawan yang mengunjungi lokasi (*site*) untuk mengadakan investigasi di lapangan, mendapat hasil laboratorium, dan hasilnya bagus.

Perusahaan pun memiliki prosedur dan program khusus di lokasi pabrik untuk menurunkan dampak lingkungan melalui operasinya. Karyawan mendapat pelatihan yang memadai untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan rajin memeriksa kondisi lingkungan di sekitar pabrik.

“Riau Pulp mengikuti kerangka acuan *Global Reporting Initiative* (GRI), yang membuat *sustainability report*, penilaian secara independen tentang lingkungan, dengan mengundang sebuah organisasi sertifikasi dan kualitas internasional, *Bureau Veritas*, untuk melakukan audit terhadap pengelolaan lingkungan, sekaligus membuktikan Riau Pulp memperlihatkan transparansi dan akuntabilitas kepada stakeholder dalam pengelolaan lingkungan.”¹

¹ Departemen Sosial RI, (2000) Pemetaan Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.



Gambar 1
Pabrik PT RAPP yang megah.

Seperti telah diungkapkan terdahulu, PT RAPP merupakan salah satu industri pulp terbesar di dunia dengan kapasitas produksi industri sebesar 2.000.000 ton/tahun dengan kebutuhan bahan baku kayu mencapai 9.000.000 m³/tahun. Yang menjadi persoalan adalah pasokan bahan baku kayu serpih untuk kebutuhan produksi sebesar itu tidak dapat dipenuhi seluruhnya dari hutan tanaman industri. HTI hanya mampu memenuhi sekitar 45% dari seluruh kebutuhan bahan baku PT RAPP. Implikasinya, dengan kapasitas produksi yang besar dan keterbatasan bahan baku, PT RAPP harus berupaya mencari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya.

Bila dilihat dari Siaran Pers dari *Illegal Logging Watch*², salah satu kelompok masyarakat sipil di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Propinsi Riau sebagai salah satu kawasan hutan alam terluas

² ©2008 Situs Portal Resmi Yayasan Satu Dunia, Juli 2008, *Pencabutan/Pembekuan Ijin Konsesi HTI RAPP Dan Tangkap Para Pejabat Yang Terlibat Illegal Logging Di Riau*, Siaran Pers Illegal Logging Watch, Jakarta.

di Indonesia, saat ini mengalami proses deforestasi yang paling massif. Kehadiran industri pulp dan kertas semakin mempercepat pemusnahan hutan alam di kawasan tersebut.” Dalam hal ini dikatakan bahwa “PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) merupakan salah satu industri bubur kertas dan kertas terbesar yang melakukan deforestasi hutan alam di Riau”. Tampaknya mereka menduga bahwa dalam upaya mencari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tersebut RAPP menggunakan pula bahan baku dari hasil konversi hutan alam dan penebangan yang merusak hutan (*illegal logging*).

Dugaan yang cenderung menuduh tersebut tampaknya cukup beralasan karena “sejak awal tahun 2007 PT RAPP tengah diusut oleh pihak kepolisian akan skandal pembalakan liar sehingga mengakibatkan kerusakan hutan yang diduga dilakukan oleh perusahaan ini di Riau. PT RAPP (bersama PT Indah Kiat Pulp and Paper yang juga tengah diusut dalam kasus penebangan liar) merupakan dua perusahaan pabrik bubur kertas besar di Indonesia yang berlokasi di Propinsi Riau, di mana kedua perusahaan ini memproduksi sekitar 62 persen dari total kapasitas industri pulp di Indonesia. Kerusakan hutan di Riau diperkirakan sebesar 3 juta hektar hutan alamnya (dari sekitar 5.000.000 hektar hutan yang ada di Riau) selang waktu antara tahun 1984-2005”.³ Menurut *Illegal Logging Watch* “Terbongkarnya kasus *illegal logging* yang melibatkan RAPP, Gubernur Riau, dan Bupati Pelalawan membuktikan bahwa telah terjadi persekongkolan antara aparat Pemerintahan, elit politik dan RAPP untuk menghancurkan hutan alam Riau secara sistematis.” Dengan adanya kasus ini tentu saja menjadi ironi karena pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PT RAPP dapat dikatakan cukup progresif namun kenyataannya untuk menciptakan profitnya tidak dilakukan melalui operasi bisnis yang bijaksana sehingga mengorbankan kelestarian lingkungan.

³ Tempo, 16/09/2007, dikutip dari Harian Komentor, “CSR: Antara Profit, Masyarakat dan Lingkungan(4)” Tampanatu PF Sompie.

Dalam konteks ini, jajaran Direksi PT RAPP membantah telah melakukan kegiatan *illegal logging* dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk keperluan produksi pabriknya. Setiap operasional PT RAPP dalam pemanfaatan dan pengelolaan kayu telah dilengkapi perizinan yang sah dan dilengkapi dokumen pengangkutan yang legal. Bantahan ini disampaikan pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI. Sebaliknya, ditegaskan PT RAPP justru ikut aktif dalam penanggulangan *illegal logging*. Yakni melalui penerapan *wood supply tracking dan chain of custody* yang melibatkan SGS, Smartwood dan WWF Indonesia. RAPP juga aktif dalam *task force* pengamanan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). "Sebagai industri pulp, PT RAPP mendukung pemenuhan bahan baku yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Makanya ketika dilarang, kita gunakan kayu akasia dari areal hutan tanaman, untuk mempertahankan operasional pabrik," jelasnya.⁴ Meski perusahaan menerima kayu dari para pemasok, tetapi tidak membeli bila kayu yang mereka jual tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

3.2. Pemahaman PT RAPP Tentang CSR

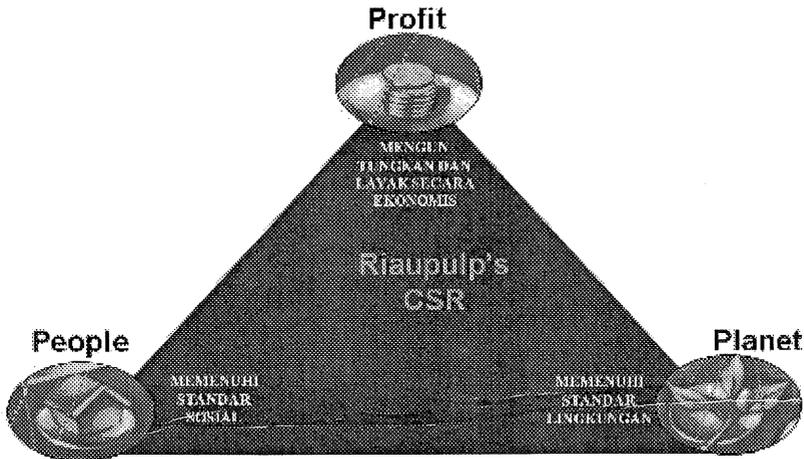
Visi PT RAPP adalah "menjadi salah satu perusahaan bubur kertas dan kertas di dunia dengan manajemen terbaik, paling menguntungkan, berkesinambungan, serta merupakan pilihan bagi para pelanggan dan para karyawan".

Kesadaran filosofis mengenai perlunya CSR di PT RAPP datang langsung dari pihak *owner* PT RAPP yang menjadi *Top Management* perusahaan ini. PT RAPP memiliki pemahaman tentang CSR sebagaimana yang didefinisikan oleh *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) di mana PT RAPP menjadi salah satu anggotanya yaitu, "CSR adalah komitmen dunia usaha untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang

⁴ Lihat, Riau Terkini, 2007, RAPP dan IKPP Bantah Terlibat Illog, 26 November.

berkelanjutan; bekerja dengan para karyawan dan keluarganya, masyarakat tempatan dan masyarakat secara luas dalam meningkatkan kualitas hidup mereka”. Oleh karena itu *Top Management* perusahaan berkomitmen untuk menjadikan perusahaan ini sebagai bagian dari komunitas masyarakat, bukan sebagai tamu (*we are not the guest, but part of community*). Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, PT RAPP tidak menggunakan pendekatan *subcontractor based community development* (bentuk pemberdayaan yang memberi kepercayaan kepada kontraktor dan subkontraktor dalam pembangunan infrastruktur sosial), tetapi lebih menekankan pendekatan *community based participation*, yakni memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring, dan evaluasi dalam program pembangunan dan infrastruktur sosial. PT RAPP mengakui adanya interdependensi perusahaan dengan kesejahteraan dan kemandirian komunitas lokal dan masyarakat luas. PT RAPP mengupayakan agar peningkatan produktivitas perusahaan berjalan seiring dengan peningkatan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Perusahaan mengupayakan agar terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri, melalui kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan Pemerintah Daerah (Pemda), Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Artinya, kesejahteraan terwujud bila ada partisipasi oleh masyarakat, Pemda, Perguruan Tinggi, dan LSM. Maka dari itu, slogannya adalah “Tumbuh dan Berkembang Bersama Masyarakat”. Membangun kemandirian masyarakat dalam pengembangan aspek ekonomi; mengembangkan sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan; meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) dan entitas sosial budaya. Untuk merealisasikan slogan tersebut, manajemen berkesimpulan bahwa dalam melakukan usaha perlu adanya *sustainability* dan untuk itu perlu memperhatikan tiga elemen utama tiga P yaitu *people, profit, dan planet*, yakni keseimbangan di antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan secara berkesinambungan.

Tiga Domain Keberlanjutan PT Riaupulp



Gambar 2
Business Platform PT RAPP

Dalam kaitan dengan *sustainability*, PT RAPP berupaya untuk mengembangkan *competitiveness* agar perusahaan dapat bersaing di dunia bisnis dengan baik sehingga kinerja perusahaan dapat menghasilkan *profit* yang layak untuk kelangsungan hidupnya. Namun, *profit* saja tidak cukup untuk keberlanjutan perusahaan. Karena itu, PT RAPP juga perlu mengembangkan atau memberdayakan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada di sekitar daerah operasinya, agar kehadiran perusahaan di tempat tersebut bermanfaat bagi masyarakat setempat (*people*). Dengan demikian dapat diharapkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut pada gilirannya kondusif untuk pengembangan perusahaan selanjutnya. Jadi secara konseptual dalam konteks pemberdayaan masyarakat tersebut, *profit* yang diperoleh PT RAPP diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, transfer keahlian kepada penduduk lokal, dan pembangunan infrastruktur lokal. Di samping kedua elemen tersebut, PT RAPP juga menyadari

bahwa untuk kemajuan perusahaan perlu pula memperhatikan *planet* dalam artian masalah lingkungan hidup dan lingkungan global, agar kehadiran perusahaan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang pada gilirannya berimplikasi pada keberlanjutan PT RAPP. Untuk kepentingan menjaga lingkungan tersebut, PT RAPP selalu berupaya memenuhi standard lingkungan dengan mengadopsi konsep *Green Industry* dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Seiring dengan pemahaman CSR di atas, *Owner* dan manajemen PT RAPP memandang bahwa CSR sebagai *business case* dalam artian bahwa CSR adalah merupakan bagian dari bisnis sehingga perlu dilakukan, baik diatur maupun tidak diatur dalam undang-undang. Terlebih lagi bisnis PT RAPP ini berbasis sumberdaya alam yang dalam operasionalnya selalu dilakukan bersama masyarakat dan berdampak bagi kehidupan mereka, sehingga melakukan CSR sudah merupakan keharusan bagi perusahaan. Dengan begitu eksistensi PT RAPP dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Sementara bagi perusahaan, pelaksanaan CSR tersebut memberikan manfaat karena dapat membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi operasional perusahaan. Pada prinsipnya semakin banyak operasional perusahaan berhubungan dengan masyarakat, maka semakin banyak CSR yang harus dilakukan perusahaan bersangkutan. Semakin tidak kondusif daerah tersebut dalam artian tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin banyak CSR yang harus dilakukan perusahaan. Untuk merealisasikan hal itu, aktivitas ekonomi masyarakat diupayakan dapat bersinergi dengan kegiatan perusahaan, sehingga eksistensi dan perkembangan perusahaan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

3.3. Organisasi Pelaksana CSR PT RAPP

Untuk kepentingan pelaksanaan CSR yang lebih terfokus, PT RAPP telah membentuk atau memiliki divisi/departemen khusus yang mengelola aktivitas CSR. Departemen CSR PT RAPP ini memiliki

visi “Menjadi salah satu perusahaan yang terbaik melaksanakan kepedulian sosial di Asia”. Untuk merealisasikan visi tersebut Departemen CSR ini menderivasikan visi tersebut ke dalam dua misi utama yaitu, **pertama**, memberdayakan ekonomi komunitas lokal berbasis penguatan partisipasi masyarakat. **Kedua**, membangun kemitraan dan persebatian yang berkualitas antara Riaupulp, karyawan, dan masyarakat tempatan, serta masyarakat secara luas.

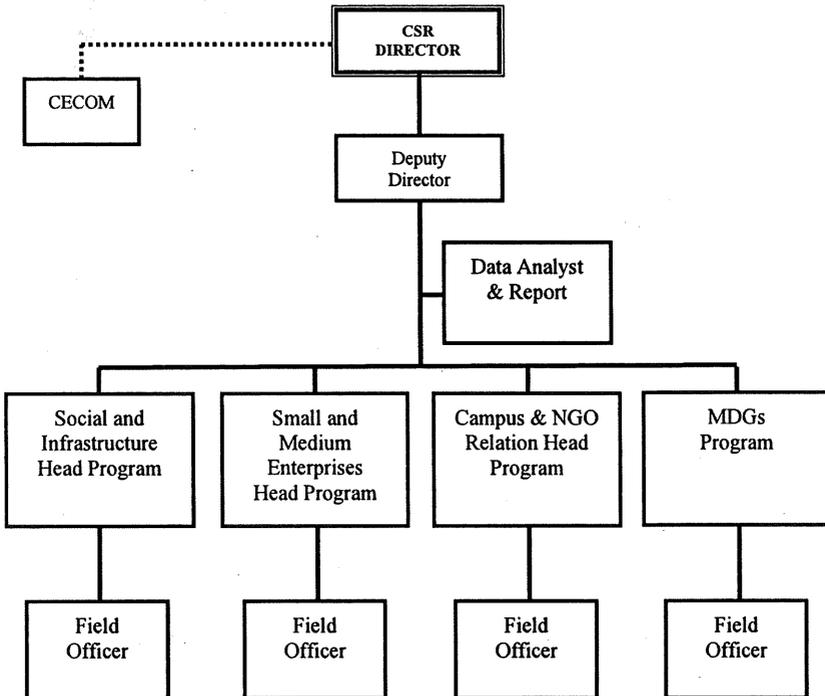
Deskripsi kerja dari Departemen CSR adalah:

- (1) Bertanggung jawab atas pencapaian semua program CSR
- (2) Membantu perusahaan dalam rangka pencapaian *business* yang berkelanjutan
- (3) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada berbagai pihak untuk berkolaborasi melakukan berbagai program pemberdayaan masyarakat
- (4) Menjadikan program CSR terintegrasi dengan Departemen terkait, dan menempatkan CSR sebagai kebutuhan bagi semua pihak, melalui pendekatan partisipatif.

Untuk itu implementasi program CSR difokuskan untuk menangani:

- (1) Ketidakberuntungan struktural (*structural disadvantage*)
- (2) Kebutuhan (*needs*)
- (3) Hak (*rights*)
- (4) Kedamaian dan non-kekerasan (*peace and non-violence*)
- (5) Demokrasi partisipatif (*participatory democracy*)
- (6) Pemberdayaan (*empowerment*).

CSR RIAUPULP ORGANIZATION CHART 2008



Dari sudut pandang *organization development* organisasi pengelola CSR ini berkembang dalam 3(tiga) periode:

- (1) Periode 1993-1998 CSR yang aktualisasinya antara lain berbentuk program *Community Development* diposisikan di bawah Departemen Humas (*Public Relation*).
- (2) Periode 1999 - 1 Juli 2005, program *Community Development* dikeluarkan dari Departemen Humas dan kemudian dilaksanakan oleh departemen khusus yakni Program Pemberdayaan Masyarakat Riau (PPMR) PT RAPP. Dasar dibentuknya PPMR, karena perusahaan memerlukan mekanisme untuk memberikan

pelayanan sumberdaya dukung untuk membantu masyarakat agar dapat mengentaskan dirinya dari kemiskinan. Fokus PPMR bertitik tolak pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

PPMR aktif mengembangkan Program kewirausahaan untuk mendorong masyarakat menciptakan industri rumah tangga dan barang-barang kerajinan. Untuk itu PT RAPP memberikan pelatihan kepada remaja putra dan putri untuk produksi tempe dan tahu, batu bata merah, pertukangan kayu, usaha eceran, makanan dan minuman, salon kecantikan, menjahit kain adat Melayu, bengkel, sablon, pembuatan perabot rumah tangga, mekanik elektronika, mekanik otomotif, dinamo, ukiran, mengemudi, tata boga, manajemen koperasi.

- (3) Mulai tanggal 1 Juli 2005 sampai dengan sekarang program *Community Development* PT RAPP dikoordinasikan oleh Departemen CSR, tetapi dilaksanakan oleh yayasan independen yakni Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) atau lebih dikenal dengan lembaga CECOM (*Care and Empowerment for Community*) *Foundation*.

Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) atau CECOM *Foundation* merupakan Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat yang dibentuk pada 1 Juli 2005 oleh PT RAPP. CECOM lahir melalui proses kajian yang panjang dan matang yang melibatkan segenap *stakeholders* seperti *founder* dan manajemen PT RAPP, LSM Pemberdayaan Masyarakat, Konsultan dan Praktisi *Community Development Foundation*, para karyawan perusahaan, dan masyarakat dampingan perusahaan. Yayasan ini dibentuk dengan harapan bahwa misi pemberdayaan dari PT RAPP dapat dijalankan lebih efisien, efektif dan profesional bila ditangani oleh lembaga yang lebih mandiri. Yayasan CECOM sebagai perpanjangan tangan perusahaan didirikan dengan tujuan agar ia bisa menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti PT Permodalan Nasional Madani sebagai lembaga keuangan bukan bank untuk mendukung kebutuhan modal petani karena perusahaan tidak mungkin melakukan hal itu.

Yayasaan ini memiliki enam departemen yang mencerminkan bidang tugas masing-masing, yaitu:

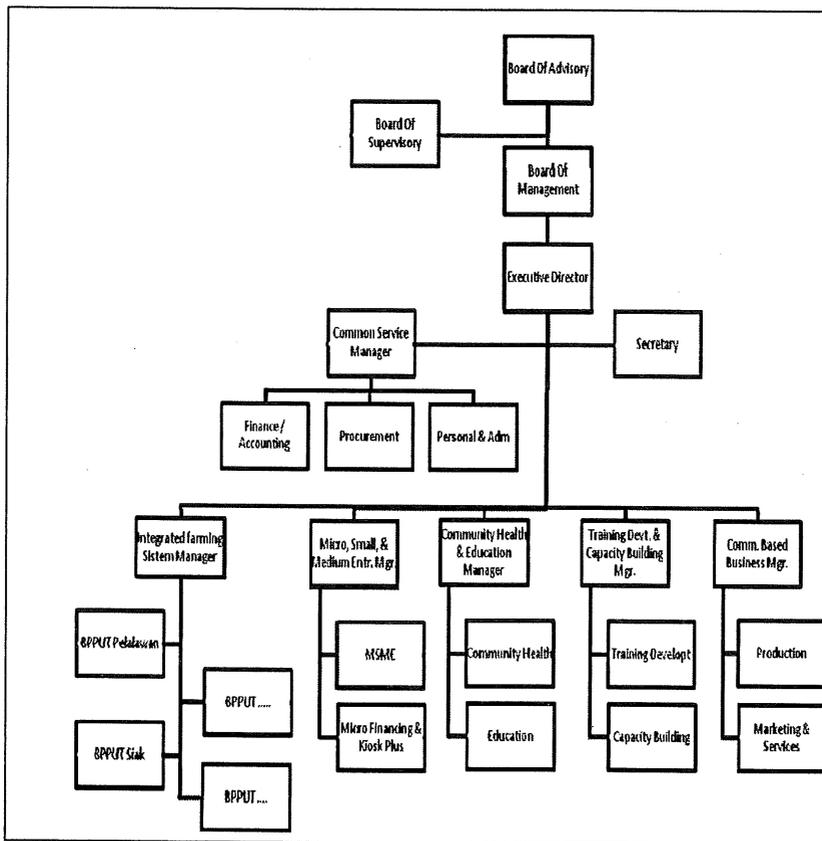
- *Integrated Farming System (IFS)*
- *Community Base Business Development (CBBB)*
- *Micro and Small Medium Enterprises (MSME)*
- *Training Development and Capacity Building*
- *Community Health and Education*
- *Support Services, seperti HRD, dsb.*

Setiap departemen dipimpin oleh seorang *manager*, dan dibantu oleh beberapa orang kepala/*head*. Selain *manager*, Departemen IFS dibantu oleh empat orang kepala/*head* sesuai daerah kerja: seorang di Kabupaten Palawan, seorang di Kabupaten Siak, seorang di Kabupaten Kampar, Kabupaten Rohul, dan Kota Pekanbaru, dan seorang lagi di Kabupaten Kuala Sengingi. Para kepala tersebut dibantu pula di lapangan oleh para *field officer* yang berfungsi sebagai pendamping mitrabinaan di sentra-sentra kegiatan/program. Setiap sentra dapat membawahi beberapa desa. Para *field officer* tersebut merupakan tenaga *out-sourcing* yang berasal dari masyarakat sendiri (bukan tenaga yayasan), dan digaji oleh yayasan.

Mengenai rekrutmen pengelola dan pelaksana di CECOM *Foundation*, pada mulanya 50 orang personal yang tergabung dalam yayasan ini merupakan karyawan PT RAPP yang bekerja di Departemen CSR. Namun dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas, serta profesionalisme dalam menangani pemberdayaan masyarakat, mereka kemudian di *spin off* dari karyawan PT RAPP menjadi karyawan CECOM *Foundation*. Pada saat itu, prosesnya, mereka diminta mundur dari PT RAPP, dan selanjutnya dipekerjakan di CECOM *Foundation*. Ketika itu memang sempat terjadi kegelisahan di antara mereka terkait dengan masa depannya. Namun karena kondisi yang ditawarkan bahwa mereka tetap diperhatikan seperti karyawan PT RAPP dan dengan kesejahteraan yang kurang lebih sama dengan apa yang diterima dari PT RAPP, maka mereka bersedia di *spin off* dari karyawan PT RAPP menjadi karyawan

CECOM *Foundation* dan digaji oleh yayasan. Berbeda dengan awal pendiriannya, sekarang ini CECOM *Foundation* sudah melakukan rekrutmen dan penggajian sendiri untuk para pegawai baru, di luar tanggungan PT RAPP.

ORGANIZATION STRUCTURE – 2007 CARE AND EMPOWERMENT FOR COMMUNITY FOUNDATION (CECOM)



Dalam organisasinya CECOM *Foundation* memiliki visi dan misi sendiri, meskipun bila dicermati masih tampak kental keterkaitannya dengan visi dan misi departemen CSR PT RAPP. Visi CECOM *Foundation* adalah “Menjadi *Center of Excelent* dalam Pemberdayaan Masyarakat”. Sementara misinya adalah:

- (1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengembangkan sikap hidup positif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya.
- (2) Menumbuhkembangkan potensi ekonomi lokal yang berbasis partisipasi masyarakat.
- (3) Mengembangkan kemitraan sosial ekonomi dalam meningkatkan akses menuju masyarakat sejahtera mandiri.
- (4) Mendorong partisipasi dan kerelawanan masyarakat melalui program aksi secara kolaboratif dalam kerangka pembangunan sosial dan lingkungan secara berkelanjutan,

Tujuan utama pembentukan CECOM *Foundation* adalah pemberdayaan masyarakat Riau secara terstruktur dan terintegrasi, dengan tujuan-tujuan yang terkuantifikasi dan terukur sesuai dengan Visi dan misi CECOM *Foundation* yang telah disepakati bersama seluruh pemangku kepentingan. Secara lebih rinci tujuan tersebut meliputi:

- (1) Pengentasan kemiskinan masyarakat marjinal
- (2) Peningkatan pendapatan usaha masyarakat
- (3) Penguatan kapasitas kelompok mitrabinaan
- (4) Pengembangan usaha berbasis partisipasi masyarakat
- (5) Peningkatan kualitas pendidikan anak (usia sekolah)
- (6) Pelayanan kesehatan masyarakat (khususnya ibu hamil dan balita)

Untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut CECOM memiliki beberapa strategi yaitu:

- (1) Mengembangkan sentra-sentra ekonomi produktif unggulan masyarakat
- (2) Mendorong keswadayaan dan kemandirian kelompok mitrabinaan
- (3) Meningkatkan sumberdaya lokal yang kompetitif

- (4) Memperluas kerjasama dan kolaborasi dengan pihak lain (jejaring sosial)
- (5) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan.



Gambar 3

Salah seorang anggota peneliti bersama Pejabat Pembuat Komitmen PMB-LIPI pada saat diterima oleh Tim CECOM *Foundation*.

Untuk mendukung kegiatan di atas, perusahaan membangun empat unit Balai Pelatihan dan Pengembangan Usaha Terpadu (BPPUT), di Kabupaten Pelalawan, Kuantan Singingi, Siak, dan Rokan, untuk mentransfer teknologi pertanian serta transformasi nilai-nilai *entrepreneurship* kepada masyarakat. Fungsi BPPUT menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan petani Mitrabina, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Pusat Informasi Pasar dan Keuangan, *Home Base* aktivitas CECOM *Foundation*.



Gambar 4

Asrama Balai Pelatihan dan Pengembangan Usaha Terpadu (BPPUT).

3.4. Manajemen Perencanaan dan Pengawasan Program CSR/CD

Dalam perencanaan programnya Departemen CSR PT RAPP telah memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP). Di situ diatur bahwa dalam penyusunan program harus mengikuti mekanisme Penetapan Program, Penentuan Anggaran, dan Pelaporan Kegiatan CSR. Pengaturan ini dibuat untuk memastikan bahwa program telah disusun secara efisien dan efektif serta tepat sasaran. Dengan adanya mekanisme yang jelas maka akan memudahkan dalam melakukan monitoring dan *controlling* sebagai bentuk evaluasi program.

Dalam perencanaan program CSR, PT RAPP menggunakan metode pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan *Participatory Rapid Rural Appraisal* (PRRA) untuk menangkap apa yang menjadi keinginan masyarakat. *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dilakukan dengan melakukan kajian terhadap masalah dan kebutuhan yang ada di masyarakat, kemudian melakukan kajian

potensi untuk kepentingan perencanaan kegiatan dan membangun alternatif kegiatan.

Namun agar tidak terjebak pada keinginan masyarakat semata yang belum tentu menjadi kebutuhan, maka konsentrasi program aksi (*action plan*) didasarkan pada aspek *community empowerment* yang bertitik tolak dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dan yang penting adalah bahwa baik dalam proses perencanaan maupun implementasinya harus mengandung elemen yang dapat mengubah dan mengembangkan kesadaran, cara dan arah berfikir, serta pola sikap hidup positif bagi komunitas yang mengikuti program pemberdayaan ini.

Untuk kegiatan yang sifatnya donasi sosial, setiap tahun PT RAPP menyediakan dan menyalurkan dana sosial untuk kegiatan sosial. Masyarakat yang membutuhkan mengajukan permohonan dengan proposal. Perusahaan akan mengabulkan bila aktivitas yang diajukan bermanfaat bagi masyarakat. Perusahaan memprioritaskan dukungan dana untuk kegiatan yang menyangkut skala nasional, kedaerahan, dan peristiwa nasional. Dana sosial diatur oleh direktur perusahaan. Di lapangan, para manajer *Superintendent*, *Supervisor*, dan *Field Officer*, bertanggungjawab atas pengeluaran dana, sesuai program yang mengacu kepada aspirasi dan harapan masyarakat, dan pengarahan dari manajemen. Donasi diarahkan dalam bentuk *in-kind* (barang) sesuai kebutuhan.⁵

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga dilakukan oleh CECOM *Foundation*. Dalam menyusun perencanaan programnya CECOM *Foundation* menggunakan metode pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan *Participatory Rapid Rural Appraisal* (PRRA). Perencanaan program bertumpu kepada aspirasi dan kebutuhan masyarakat, khususnya mereka yang tidak beruntung secara struktural, dilandasi kedamaian dan non-kekerasan, serta berkonsentrasi pada asas pemberdayaan yang demokratis partisipatif.

⁵ Departemen Sosial RI, (2000), *Pemetaan Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha*, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.

Setelah aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya teridentifikasi barulah melangkah pada perencanaan kegiatan dengan terlebih dulu mengkaji potensi yang ada. Berdasarkan kajian tersebut muncul alternatif kegiatan yang kemudian dipilih untuk menjadi program kegiatan *Community Development*.

Pendekatan Perencanaan yang digunakan CECOM *Foundation* untuk implementasi *Community Development* adalah pemberdayaan berbasis kelompok, khususnya dalam pengembangan kelompok-kelompok tani mitrabinaan. Komunitas yang menjadi sasaran program adalah komunitas marjinal dalam masyarakat Riau yang berada di sembilan kabupaten dan dua kota, khususnya yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Walaupun berada di luar wilayah operasional perusahaan, maka harus memenuhi persyaratan tertentu seperti wilayah rawan bencana atau rawan pangan.

Setiap desa dapat memiliki dua kelompok. Mereka yang terlibat dalam program *Community Development* tidak harus yang benar-benar miskin atau kelompok marjinal karena jarang ditemukan. Sebelum melaksanakan program, mereka yang berminat dan memiliki potensi dilatih terlebih dulu untuk mengetahui sumberdaya dan potensi yang mereka miliki dengan maksud agar bentuk program yang dipilih disesuaikan dengan kehendak dan kemampuan mereka sendiri. Masyarakat sasaran program *Community Development* berikutnya dipilih oleh kelompok-kelompok yang terdapat di 100 desa binaan yang sudah *sustained*. Dalam menjalankan kegiatan, mereka didampingi oleh tenaga ahli/*field officer* yang terdiri dari sarjana pertanian, dokter hewan, dan keluaran sekolah pertanian yang berasal dari yayasan CECOM. Mereka berdiskusi dengan *field officer* untuk menentukan jenis kegiatan yang akan dipilih oleh masing-masing kelompok sehingga tidak semua akan melakukan jenis kegiatan yang sama.

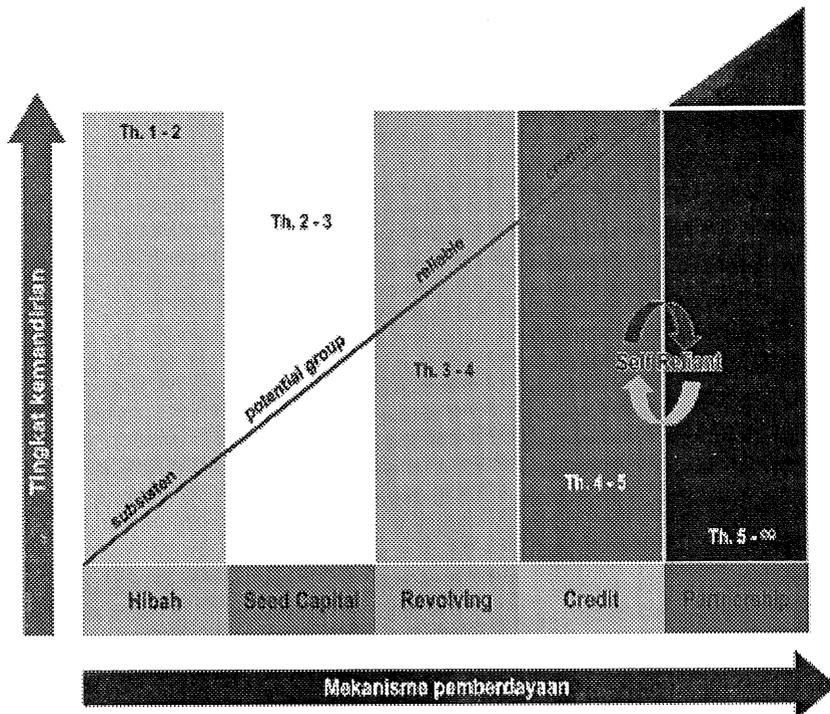


Gambar 5

Terlihat dua orang *Field Officer* bersama karyawan PT RAPP yang sedang berpose di wilayah Kelompok Tani Jaya Makmur, Kabupaten Siak, yang merupakan Mitra Binaan PPMR PT RAPP

Namun demikian ditemukan hambatan dalam pelaksanaan program yang bermuara ke konflik kepentingan. Hal ini terjadi karena keputusan program ditetapkan secara bersama-sama oleh para pamong desa, tokoh pemuda, yayasan, sementara semua warga ingin diri mereka dilibatkan dan menjadi prioritas penerima bantuan program. Dalam hal ini, identitas sebagai penduduk asli/pribumi dan pendatang sempat dimunculkan. Konflik timbul terutama karena perbedaan sudut pandang warga dalam melihat program bantuan yayasan, antara yang melihatnya sebagai kebutuhan (*need*), keinginan (*willingness*), dan kepentingan (*personal interest*). Kriteria utama yang dijadikan ukuran dalam menentukan penerima program adalah pengalaman dalam bidang program yang akan digulir, seperti bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.

3.5. Mekanisme Pemberdayaan Menuju Kemandirian



Sasaran akhir dari program *Community Development* tersebut adalah memberdayakan masyarakat dari yang semula marjinal menjadi masyarakat mandiri. Untuk mencapai kemandirian tersebut tentunya ada tahapan yang harus dilalui. Oleh karena itu dalam melakukan pemberdayaan masyarakat CECOM Foundation membagi kelompok masyarakat dampingan ke dalam lima tahap perkembangan kelompok yaitu: kelompok *subsisten*, kelompok *potensial*, kelompok *reliable*, kelompok *credible*, dan kelompok *sustainable (self reliant)*. Adapun aspek yang dijadikan indikator untuk melihat perkembangan kelompok meliputi:

- (1) Organisasi
- (2) Administrasi
- (3) Keuangan
- (4) Kegiatan
- (5) Pendidikan
- (6) Jejaring

Dalam kategorisasi di atas, kelompok mitrabinaan yang *subsisten* merupakan kategori terbawah di dalam perkembangan kelompok. Kelompok ini realitasnya tidak memiliki kemampuan untuk meretas lingkaran ketidakberdayaan atau kemiskinan yang membelenggunya. Oleh karena itu kelompok ini menjadi target sasaran utama dalam program *Community Development CECOM Foundation*. Untuk percepatan pengembangan kelompok bagi kelompok *subsisten* ini, dalam memberdayakannya diterapkan pola hibah. Berdasarkan pengalaman dari CECOM, umumnya kelompok ini mampu berubah menjadi kelompok potensial setelah melalui pendampingan yang dilakukan selama satu sampai dengan dua tahun.

Kelompok berikutnya adalah kelompok *potensial*. Kelompok ini telah mengalami perkembangan dalam aspek kelembagaan kelompok sehingga memiliki basis untuk mencapai kemandirian. Mengacu pada enam bidang pokok yang menjadi indikator perkembangan kelompok, kelompok ini sudah memiliki prasyarat untuk berkembang lebih maju karena sudah memiliki aturan-aturan kelompok, kepemimpinan dalam kelompok, kedisiplinan anggota yang mau mentaati aturan kelompok, menghadiri pertemuan kelompok, dan memiliki rasa kebersamaan. Oleh karena itu untuk kelompok potensial mulai diberikan pola *seed capital*, yakni dengan memberikan modal awal untuk kegiatan-kegiatan produktif kelompok seperti *input* untuk produksi pertanian.

Bila kelompok ini berjalan mulus maka dia akan meningkat menjadi kelompok yang dipercaya (*reliable group*). Untuk kelompok-kelompok yang sudah teruji mampu mengelola modal awal yang diberikan (*reliable group*), kepada mereka dapat diberikan pola *revolving*. Kelompok ini dipercaya untuk menggunakan dan

mengelola sejumlah dana atau input produksi dalam bentuk barang (*in kind*) dan kemudian dikembalikan lagi kepada kelompok tersebut sebesar yang dia gunakan. Dana pengembalian tersebut selanjutnya digunakan oleh anggota kelompok lainnya. Dengan asumsi semuanya berjalan baik, maka kelompok ini akan naik peringkat menjadi kelompok yang terpercaya (*credible*).

Berikutnya, kepada kelompok-kelompok yang sudah dapat dipercaya sepenuhnya (*credible*), mulai diperkenalkan dengan kegiatan melalui pola unit simpan pinjam. Dengan adanya pengembalian sebagian dana *revolving* kepada kelompok, memberi peluang untuk memperkenalkan anggota dalam kegiatan unit simpan pinjam dengan menggunakan dana *revolving*. Unit simpan pinjam yang diperkenalkan adalah dengan memanfaatkan jasa koperasi simpan pinjam. Untuk tingkat Propinsi, CECOM telah menginisiasi pendirian Koperasi Primer Simpan Pinjam yaitu KSP Mitra Madani. Unit-unit simpan pinjam menyimpan uangnya di koperasi ini, dengan demikian mitrabinaan dapat menjadi anggota KSP Mitra Madani. Proses pengenalan dalam kegiatan simpan pinjam bagi anggota ini penting karena mengarah pada pola pembiasaan untuk menggunakan pola kredit pada kelompok di tahap berikutnya.

Bagi kelompok yang anggotanya berkembang dengan baik, dalam artian mampu menjalankan usaha produktifnya melalui pola simpan pinjam, maka dia masuk menjadi kelompok pada tahap mandiri (*sustainable group*). Kepada kelompok ini diperkenalkan pola pembiayaan kredit program yakni kredit dengan suku bunga rendah melalui peran KSP Mitra Madani. Dalam kredit program ini diintroduksi bahwa untuk memperoleh modal kredit, kelompok dan atau anggotanya harus menyerahkan assetnya, seperti BPKB, Surat Tanah, dan sebagainya sebagai jaminan kredit kepada KSP. Untuk itu, mereka diminta melakukan kalkulasi usaha yang matang agar tidak mengalami kerugian yang berimbas pada macetnya kredit yang diberikan. Proses ini sangat krusial dalam konteks kemandirian, karena pada akhirnya mereka harus berhadapan dengan pola kredit komersial. Dengan kata lain bahwa ke depannya kelompok ini harus

mampu untuk mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan lain seperti perbankan. Kondisi ini dan keberadaan lembaga keuangan mikro tersebut menjadi *exit strategy* bagi CECOM *Foundation* dalam upaya *Community Development*. Bila sudah sampai tahap ini maka kelompok-kelompok tersebut sudah dapat menjadi jejaring pengembangan masyarakat, sebagai mitra kerja.⁶

3.6. Monitoring dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan programnya, *CSR/Community Development* PT RAPP diarahkan agar terjadi pengembangan sikap dan perilaku dari anggota kelompok mitrabinaan. Selanjutnya, agar tidak ke luar dari perencanaan yang sudah dibuat, maka terhadap semua kegiatan yang tengah dilaksanakan selalu dilakukan monitoring. Monitoring ini dianggap penting untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan program. Pada tahap akhir dilakukan evaluasi terhadap kegiatan program yang telah dijalankan

Dalam kaitan dengan evaluasi program, PT RAPP melakukan evaluasi secara terus menerus untuk melihat dampak atau hasil dari program *CSR/Community Development* yang diluncurkannya. Pelaksanaan evaluasi ini biasanya dilakukan oleh pihak eksternal perusahaan, baik itu eksternal auditor maupun Perguruan Tinggi yang ditugaskan untuk mengukur hasil dan manfaat dari program *CSR/Community Development* yang dilaksanakan PT RAPP. Sebagai contoh, salah satu Perguruan Tinggi yang pernah ditugasi melakukan evaluasi terhadap *CSR/Community Development* PT RAPP adalah Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-UI). Di sini LPEM-UI mencoba melihat dampak ekonomi dari PT RAPP dalam perekonomian Riau. Contoh lain, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶ Purnama, Johan dan Handalan Saifulah, 2008, *Evaluasi Partisipatif Pemberdayaan Kelompok Tani dengan Vectorial Analysis*, CECOM Foundation, Riau, Indonesia.

(PROPER) untuk penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu unsur yang dinilai adalah aspek sosial pemberdayaan masyarakat. Dalam penilaian ini PT RAPP meraih PROPER Hijau dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap lingkungan.

Secara normatif perusahaan melakukan *auditing* terhadap kinerja sosial dan aspek lingkungan perusahaan. Untuk program *Community Development* Direktur CSR membuat laporan pertanggungjawaban kepada manajemen, tentang implementasi program dari hasil monitoring. Perusahaan membuat buku *Seayun Langkah Membangun Riau*, yang bekerja sama dengan Universitas Lancang Kuning, dan disosialisasikan kepada masyarakat, yang berisi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan *Community Development* dan *environmental* dilaporkan dalam *Sustainability Report* kepada *APRIL Fact Sheet* dalam *Warta Riau Complex*, sebuah media komunikasi antara perusahaan dan masyarakat.

3.7. Budget Program CSR

Penentuan anggaran CSR yang dialokasikan oleh PT RAPP tidak berdasarkan pada persentase dari pendapatan atau profit perusahaan, melainkan berdasarkan pada kebutuhan program. Kebijakan ini diambil pihak manajemen mengingat bahwa CSR di perusahaan ini sudah merupakan bagian dari bisnis, sehingga menjadi bagian dari *Total Quality Management* perusahaan. Oleh karena itu program CSR harus tetap dijalankan dalam kondisi apapun, tanpa dibatasi oleh keuntungan perusahaan. Alokasi anggaran untuk kegiatan program CSR/ *Community Development* dari tahun pertama hingga sekarang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan. Bila tahun pertama (1999) anggaran dana yang dialokasikan untuk program pemberdayaan tersebut baru mencapai sebesar Rp.5.000.000.000,- , maka sekarang di tahun 2008 anggaran yang dialokasikan telah mencapai lebih dari Rp.32.000.000.000,- per tahunnya. Anggaran sebesar itu terbagi untuk dua kegiatan besar

yakni CSR yang bersifat *charity* dan dijalankan oleh Departemen CSR PT RAPP, dan *Community Development* yang bersifat *empowerment* yang dilakukan oleh CECOM Foundation.

3.8. Perkembangan Historis Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT RAPP

Pada awal perkembangannya mulai tahun 1992, atau pada **periode pertama** organisasi CSR, *Corporate Social Responsibility* yang diimplementasikan oleh PT RAPP bersifat *Corporate Giving* (karitas) dan bersifat insidental. Hal tersebut dilakukan ketika perusahaan masih dalam tahap pembangunan pabrik dan melakukan penanaman akasia secara besar-besaran, karena baru pada tahun 1995 PT RAPP mulai memproduksi *pulp* secara komersial. Pada periode ini perusahaan baru pada tahap mengenali lingkungannya, sehingga CSR lebih difungsikan untuk meredam keresahan masyarakat yang muncul di sekitar perusahaan melalui berbagai bantuan yang bersifat amal (*charity*). Pada saat itu perusahaan masih berupaya men-*set-up* program pemberdayaan masyarakatnya sehingga belum memiliki pola yang jelas. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan perusahaan, masih dalam periode yang sama, maka menstimulasi munculnya kesadaran bahwa perusahaan akan bertumbuhkembang bila perusahaan mampu menciptakan *corporate image* yang lebih baik. Oleh karena itu CSR PT RAPP yang semula berbentuk karitas pun kemudian berkembang menjadi *Corporate Philantrophy* dengan motivasi memberikan bantuan kemanusiaan. Dengan demikian program CSR yang dikembangkan diarahkan untuk mendongkrak citra perusahaan (*Corporate Image Building*) melalui *Community Relations*.

Baru pada tahun 1999, atau pada **periode kedua** pengorganisasian CSR, PT RAPP mengembangkan program CSR dalam bentuk *Community Development* yang diarahkan untuk *community empowerment* atau pemberdayaan masyarakat sebagai target utamanya. Pada saat tersebut perusahaan sudah mengenal lingkungannya dan juga sudah dikenal oleh masyarakat sekitarnya.

Sejak saat itu perusahaan tidak lagi melihat program CSR semata-mata sebagai pekerjaan amal atau tanggung jawab kemanusiaan saja, melainkan juga sebagai investasi sosial yang dalam jangka panjang akan menguntungkan bagi perkembangan perusahaan. Dengan perkembangan kesadaran PT RAPP dalam menjalankan kewajiban sosialnya kepada masyarakat tersebut tentunya merupakan hal yang sangat positif. Melalui program *Community Development* yang bersifat *community empowerment* yang dilakukan perusahaan, secara tidak langsung terbangun kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan (*trust building*). Di antara kedua belah pihak terjalin hubungan yang bersifat simbiosis mutualistik dan harmonis karena saling menguntungkan antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya. Selanjutnya, dengan adanya *trust building* tersebut membuahkan hasil berupa penerimaan masyarakat (*social acceptance*) terhadap eksistensi perusahaan. Dengan kata lain melalui kegiatan *empowerment* yang dilakukan oleh PT RAPP telah menciptakan penguatan *social capital*.

3.9. Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT RAPP

Dalam menjalankan CSR, PT RAPP memandang bahwa masalah *Human Capital* merupakan isu yang harus ditangani dan diperhatikan dengan baik, karena hal tersebut akan menjadikan perusahaan semakin *sustain*. PT RAPP senantiasa menganut prinsip “tumbuh dan berkembang bersama masyarakat”. Dalam implementasinya prinsip tersebut antara lain diwujudkan dengan memberikan bantuan sosial kepada pelajar setempat berupa beasiswa pendidikan dan beasiswa ikatan dinas di Akademi Teknologi Pulp dan Kertas (ATPK) Bandung. Program beasiswa ATPK Bandung ini sebagai salah satu upaya untuk mencari putera daerah yang menjadi bibit unggul untuk membangun daerahnya masing-masing.

Program ini telah dilakukan PT RAPP sejak tahun 2006 dan jumlahnya relatif besar. Sebagai ilustrasi, untuk program CSR bidang pendidikan pada tahun 2007, PT RAPP memberikan bantuan sebesar

Rp.1.692.900.000,- untuk membantu pelajar dan mahasiswa serta guru honorer.⁷ Menurut *Campus and NGO Relation Head* PT RAPP, penyerahan beasiswa dan bantuan honorarium guru honorer ini merupakan implementasi program pendidikan Riaupulp untuk Tahun 2007. “Program ini sebagai wujud komitmen dan tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) PT RAPP untuk ikut serta berperan dalam membangun dunia pendidikan serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) masyarakat Riau”. Jumlah sebesar itu diberikan dalam bentuk bantuan beasiswa bagi 700 pelajar SD/SMP/SMU sederajat, 15 mahasiswa D3 dan 60 mahasiswa S1 serta bantuan honorarium kepada 200 orang guru honorer. Beasiswa PT RAPP ini khususnya diberikan kepada siswa SD/SMP/SMU sederajat dan mahasiswa D3/S1 yang berprestasi tinggi, namun secara ekonomi tergolong kurang mampu. Sedangkan bantuan honorarium guru honorer dikhususkan untuk tenaga pengajar ataupun guru honorer yang mengabdikan di daerah terpencil di lima kabupaten/kota di Propinsi Riau. Adapun besarnya jumlah bantuan beasiswa untuk pelajar yang diberikan PT RAPP tahun 2007 per orangnya terinci seperti berikut: beasiswa untuk tingkat SD diberikan sebesar Rp.600.000,- per orang/tahun, SMP Rp.900.000,- per orang/tahun, SMU Rp 7.000.000,- per orang/tahun. Sementara itu bantuan honorarium untuk 200 guru honorer diberikan sebesar Rp.2.400.000,- per orang/tahun.

⁷ Lihat Adrizas Asdrizas, 16 Juli 2007, Riau Online, Pekanbaru.



Gambar 6
Mahasiswa D3 penerima beasiswa CSR PT RAPP
bersama tenaga ahli asing, peneliti dan
Pejabat Pembuat Komitmen PMB-LIPI

Khusus untuk beasiswa D3, sebagaimana telah disinggung di atas, PT RAPP memberikan bantuan dalam bentuk beasiswa ikatan dinas untuk mengikuti kuliah pada Akademi Teknologi Pulp dan Kertas (ATPK) Bandung. Beasiswa ikatan dinas ini diberikan kepada lulusan SMU sederajat yang terbaik. Mereka dijaring melalui proses seleksi yang diselenggarakan RAPP yang antara lain selain mensyaratkan nilai raport terbaik selama di SMU, dan mendapat nilai kelulusan terbaik ketika ujian akhir, juga harus berasal dari daerah yang relatif terpencil atau di luar daerah perkotaan. Selanjutnya setelah menyelesaikan pendidikannya perusahaan akan menempatkan mereka untuk bekerja di PT RAPP. Dalam beasiswa ikatan dinas ATPK Bandung ini, seluruh biaya kuliah, uang saku bulanan, uang buku dan pemondokan ditanggung penuh oleh Riaupulp, termasuk biaya transportasi satu kali dalam setahun. Biaya pendidikan ini diberikan selama tiga tahun. Bila dikalkulasi besarnya bantuan untuk masing-masing penerima beasiswa ikatan dinas di ATPK Bandung ini

sebesar Rp.14.460.000 per orang/tahun. Sejak diluncurkan tiga tahun yang lalu (2006), jumlah penerima beasiswa ikatan dinas ini mencapai 30 orang, yakni 15 orang dijangir pada tahun 2006, sepuluh orang diberikan pada tahun 2007, dan lima orang pada tahun 2008. Selain beasiswa ikatan dinas itu, PT RAPP juga memberikan beasiswa magang kepada sepuluh mahasiswa tingkat akhir selama tiga bulan. Untuk beasiswa mahasiswa magang ini diberikan bantuan sebesar Rp.1.200.000,- per orang/bulan selama tiga bulan.

Selain bantuan sosial dalam bentuk beasiswa kepada para pelajar, PT RAPP dalam melaksanakan CSR juga memberikan sumbangan dalam bentuk bangunan sekolah antara lain untuk TK, SD dan SMA; maupun bangunan lainnya seperti pembuatan lapangan olah raga di suatu sekolah.



Gambar 7

Terlihat Gedung SDN 028 Simpang Kualo dan Gedung SMA

Di samping program pemberian beasiswa pendidikan seperti di atas, PT RAPP juga memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri guna mendapatkan pendidikan tentang teknologi *pulp and paper*, dan untuk mendapatkan pendidikan tersebut tentunya melalui uji kompetensi.

Masih terkait dengan CSR bidang pendidikan, pada bulan Agustus 2008 PT RAPP memberi bantuan sebanyak 16 unit komputer, yakni tujuh unit untuk instansi pemerintahan dan sembilan unit untuk sekolah (SD, SMP dan SMU/ sederajat) yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan di empat kabupaten (Pelalawan, Siak, Kampar dan Kuantan Sengingi). Padahal

perusahaan tersebut akhir-akhir ini sedang menghadapi kesulitan seiring dengan terjadinya krisis ekonomi dunia yang berimbas pada menurunnya permintaan pasar dunia terhadap kertas dan pulp hasil produksi PT RAPP. Namun karena adanya komitmen perusahaan untuk membangun dunia pendidikan di Riau dan juga untuk mendorong kelancaran pelayanan publik oleh Pemerintah di tingkat desa di sekitar wilayah operasional perusahaan, maka PT RAPP tetap memberikan bantuan komputer tersebut. Bantuan tersebut diserahkan di Balai Pelatihan Pertanian Usaha Terpadu (BPPUT) PT RAPP Pangkalan Kerinci oleh GM *Social Government Relations* (SGR) yang didampingi Direktur CSR.

Terkait dengan bantuan komputer tersebut Kepala Sekolah SMP 1 Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kuantan Singingi yang mewakili penerima bantuan ketika menyampaikan sambutan dalam acara serah terima bantuan komputer tersebut mengatakan bahwa belum lama ini beberapa siswa dari sekolah yang dipimpinnya juga telah mendapatkan bantuan beasiswa dari PT RAPP, dan saat ini ditambah lagi dengan bantuan komputer. “Kami akan menggunakan bantuan ini sebaik-baiknya dan akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa Riaupulp telah banyak membantu dunia pendidikan dan masyarakat. Mudah-mudahan Riaupulp dapat terus eksis dan bisa segera keluar dari krisis yang sedang dihadapi”. Hal yang relatif sama juga diungkapkan oleh Lurah Pelalawan yang kurang lebih mengatakan bahwa sebagai perusahaan yang besar PT RAPP telah membuktikan kepeduliannya terhadap masyarakat dan pemerintah desa. “Telah banyak perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Riaupulp, mulai dari bantuan alat berat untuk membersihkan kanal desa, bantuan bibit pohon, peralatan olah raga untuk pemuda, beasiswa, peralatan kantor, komputer untuk operasional kelurahan dan banyak lagi. Wajarlah kalau kita semua mendukung keberlangsungan perusahaan yang komit dan peduli terhadap masyarakat sekitar operasional.”⁸

⁸ Lihat RiauInfo edisi 04 Sep 2008 10:28 wib.

Dari sisi lain, kepedulian CSR PT RAPP terhadap kebersihan lingkungan antara lain diperlihatkan dalam penyerahan bantuan satu unit mesin pemotong rumput untuk Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan pada bulan Agustus 2008. Bantuan ini diberikan melalui program *Social Infrastructure Programme* (SIP) untuk mendukung program kebersihan lingkungan RT/ RW di lingkungan Pemerintahan Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat. Rencananya bantuan sejenis juga akan diberikan kepada Kecamatan Pelalawan dan SMA Negeri 1 Pelalawan di Kecamatan Pelalawan.

Terkait dengan isu lingkungan, peraturan pemerintah mewajibkan pemegang IUPHHTI untuk mengalokasikan 10% dari luas konsesinya untuk konservasi. Implementasi peraturan ini tidak menjadi persoalan bagi PT RAPP karena memang sudah sejalan dengan konsep keberlanjutan perusahaan (*Sustainability*) yang selama ini menjadi acuan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini, seperti telah dikemukakan terdahulu, PT RAPP memperhatikan *Triple of Buttom Line 3Ps* (*People, Planet and Profit*). Dalam konteks ini konservasi masuk dalam kategori Planet. Sampai dengan saat ini PT RAPP telah mengalokasikan sebesar 23% dari areal konsesinya untuk konservasi. Luasan tersebut terdiri atas Riparian, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Areal Sumber Daya Genetik dan Areal Kelerengan > 40%.

Dalam kaitannya dengan kegiatan perusahaan untuk konservasi, pada saat ini PT RAPP telah membentuk beberapa Lembaga Konservasi Desa (LKD) di beberapa desa yang ada di sekitar operasional perusahaan. Pembentukan LKD ini dimaksudkan agar perusahaan dan masyarakat sama-sama menjaga hutan alam (areal konservasi) sesuai dengan pengaturan Tata Ruang Pembangunan HTI. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan membangun kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pada tanggal 16 Agustus 2008 PT RAPP mengajak LKD Olak, Sei Mandau, Kabupaten Siak dan Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan untuk

melakukan studi banding guna mempelajari tentang kearifan lokal dalam menjaga hutan.

Adapun lokasi yang dipilih untuk studi banding ini adalah Hutan Ulayat Buluh Cina yang terletak di Desa Buluh Cina, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Lokasi ini dipilih karena keunikan hutan dan danau serta kearifan masyarakat Buluhcina dalam mengelola hutan ulayat telah berhasil mendapatkan penghargaan Satya Bumi dari Gubernur Provinsi Riau sehingga patut dicontoh. Hutan ini meliputi areal seluas 1000 hektar, di mana di dalamnya terdapat delapan danau. Sekitar 1 km sebelum mencapai pinggir hutan terdapat kawasan permukiman khas Melayu. Hutan ini di dominasi oleh pohon-pohon rawa. Di hutan ini banyak ditumbuhi pohon jenis Rengas (*Gluta renghas*) dengan ukuran besar yang diperkirakan berusia ratusan tahun. Selain itu juga ditumbuhi berbagai jenis rotan dengan jumlah yang luar biasa banyak. Semakin jauh ke dalam jalan-jalan setapak tampak bersih menandakan bahwa hutan ini sudah mencapai suksesi primer. Hutan ini memiliki keunikan karena di dalam kawasan hutan ulayat terdapat beberapa danau yang terbentuk secara alami dari proses perubahan alur sungai. Menurut koordinator SATGAS Pengamanan Hutan Ulayat, "Di kawasan danau ini masyarakat diperbolehkan untuk memancing ikan karena memang potensi ikannya juga ada, tetapi tidak diperbolehkan untuk meracun, motas, nyetrum, atau nuba. Barangsiapa yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi adat dan dilaporkan ke polisi".⁹

Melalui studi banding ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya menjaga hutan. Melalui kegiatan ini pula diharapkan bahwa masyarakat dapat memperoleh manfaat dari hutan, yang aksesnya telah dibuka oleh perusahaan kepada masyarakat sekitar hutan, melalui pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu (HHNK). Namun bersamaan dengan itu masyarakat pun diwajibkan menjaga areal konservasi perusahaan. Mereka diwajibkan

⁹ Lihat RiauInfo, 2008, *Riaupulp Ajak LKD Olak dan Segati Study Banding Kearifan Lokal*, edisi 20 Agustus, Pekanbaru.

untuk melakukan penanaman ulang kayu jenis lokal atau jenis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sejauh merupakan MPTS (*Multy Purpose Trees Species*). Selain itu, dalam pemanfaatannya diatur bahwa hanya masyarakat yang tergabung dalam LKD saja yang diizinkan masuk ke areal konservasi, hanya anggota/pengurus LKD yang telah teregistrasi yang dibolehkan untuk pemanfaatan HHNK.

Contoh program CSR lingkungan lainnya yang dilakukan oleh PT RAPP adalah kolaborasi pengelolaan kawasan konservasi antara PT RAPP dan masyarakat Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Kolaborasi yang dibangun adalah bentuk kemitraan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Dalam hal ini PT RAPP membuka akses kawasan konservasi yang berada di dalam konsesinya untuk dijaga dan dikelola bersama dengan masyarakat. Dalam pengelolaan tersebut masyarakat diperbolehkan untuk memanfaatkan HHNK yang ada di dalam kawasan konservasi seperti rotan, buah, tanaman obat, madu sialang dan sebagainya. Sebagai ganjarannya jika terdapat kawasan konservasi yang rusak, maka perusahaan dan masyarakat secara bersama melakukan rehabilitasi guna mempertahankan fungsi tata airnya.

Dalam konteks ini perusahaan bersama masyarakat memiliki pemahaman yang sama bahwa kawasan-kawasan riparian atau sempadan sungai sangat penting peranannya untuk menjaga kelestarian dan melindungi tata air, terutama aliran sungai. Oleh karena itu kegiatan program yang diluncurkan diawali dengan rehabilitasi kawasan riparian atau sempadan sungai yang berada di dalam konsesi PT RAPP di *Estate* Langgam. Lokasi ini dipilih untuk menjadi lokasi kegiatan program, karena hulu dari riparian-riparian tersebut berada di dalam konsesi PT RAPP dan mengalir ke sungai Segati yang melintasi permukiman masyarakat Desa Segati. Masyarakat desa ini pun relatif tergantung dengan sungai. Oleh karena itu program kolaborasi untuk mengelola kawasan konservasi tersebut dilakukan di situ. Dalam kaitan itu mereka berkomitmen untuk melakukan rehabilitasi melalui penghijauan dengan penanaman pohon melinjo. Jenis tanaman ini dipilih selain karena permintaan

masyarakat, juga karena tanaman melinjo memiliki multi fungsi. Selain memiliki fungsi lindung, masyarakat pun bisa memanfaatkan daun, kulit dan buah untuk dibuat sayur, selain itu buahnya juga bisa diolah untuk dijadikan emping.

Dalam kolaborasi di atas prosesnya difasilitasi oleh Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat Riau (FKKM Riau). Salah satu bentuk upaya fasilitasi dalam proses kolaborasinya adalah sebelum acara penanaman, FKKM Riau bekerjasama dengan PT RAPP memberikan pelatihan untuk *capacity building* masyarakat mengenai melinjo, pemanfaatan hasil hutan non kayu, kebijakan kehutanan dan budidaya keramba ikan. Dalam pelatihan itu melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi seperti UNRI dan UNILAK sebagai narasumber. Kemudian dalam acara penanaman bibit melinjo dan anakan alam di kawasan konservasi Sektor Langgam tersebut dihadiri oleh masyarakat Desa Segati yang di koordinasikan oleh LKD Segati, FKKM Riau dan perwakilan pihak perusahaan.¹⁰

Dalam rangka mengimplementasikan kepedulian lingkungan, selain berkolaborasi dengan masyarakat umum, PT RAPP juga menyadari pentingnya membangun kesadaran melalui dunia pendidikan formal yang disebut *Green Edu*. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 28 agustus 2008 PT RAPP Estate Mandau memberikan pendidikan kesadaran dan penyelamatan lingkungan kepada sekitar 30 orang siswa siswi SD-SMP Satu Atap Desa Olak, Kecamatan Sei Mandau, Kabupaten Siak yang dilaksanakan di Kantor Departemen *Environment* Riaupulp Estate Mandau. Sasaran kegiatan *green edu* tersebut adalah menciptakan pemahaman dan kesadaran mereka tentang lingkungan, dengan harapan bahwa kesadaran tersebut terbawa hingga dewasa nanti. Kegiatan ini diselenggarakan selama sehari penuh, mulai dari dalam ruangan sampai *outbond*. Para siswa diberikan pemahaman mengenai hutan, pemanasan global, sampah, serta rantai makanan. Agar menarik bagi para siswa maka penyajian

¹⁰ Lihat RiauInfo, 04 Sep 2008 15:05 wib, LKD Segati Lakukan Penghijauan di Areal Konservasi Riaupulp Sektor Langgam, Pekanbaru.

materinya dilakukan menggunakan konsep *Education Games*. Rangkaian kegiatannya dibuat sedemikian rupa seperti bermain sambil belajar. Sedangkan *outbond* nya dilaksanakan di Situs Budaya Kolam Tujuh Desa Olak yang merupakan tempat yang menjadi akar budaya mereka.¹¹ Kegiatan ini mendapat tanggapan positif dari pihak sekolah, seperti dikatakan oleh Kepala Sekolah SD-SMP Satu Atap Desa Olak, bahwa ia sangat berterimakasih atas kepedulian PT RAPP terhadap pendidikan dengan memberikan pengetahuan tambahan mengenai lingkungan kepada siswa-siswinya. Selanjutnya ia mengharapkan bahwa kegiatan serupa dapat dilaksanakan di masa-masa mendatang.

Selain berbagai bantuan program dan pembinaan seperti di atas PT RAPP juga melakukan kegiatan yang lebih bersifat karitas. Sebagai ilustrasi, selama bulan Ramadhan tahun 2004 PT RAPP, melalui Tim Safari Ramadhan Riaupulp, melakukan kunjungan safari ke sejumlah desa yang berada dalam wilayah operasionalnya. Dalam kesempatan kunjungan tersebut, mereka membawa serta para mubaligh untuk memberikan siraman rohani kepada warga masyarakat yang dikunjungi. Bersamaan dengan itu tim Safari Ramadhan Riaupulp juga memberikan santunan kepada sekitar 4.930 orang anak yatim dan warga miskin yang berada di 203 desa, melalui sektor-sektor (*estate*) yang berada di lima kabupaten, yakni Pelalawan, Siak, Kuantan Singingi, Kampar dan Indragiri Hulu. Di samping itu tim ini juga memberikan bantuan untuk mesjid di desa yang dikunjungi. Adapun jenis bantuan yang diberikan kepada masing-masing anak yatim atau warga kurang mampu adalah berupa paket ramadhan yang jumlahnya setiap desa bervariasi, yaitu antara 15-20 orang.

Khusus di ibukota kabupaten yang dikunjungi, tim ini memberikan bantuan kepada 100 orang anak yatim atau warga kurang mampu yang berada di sana dan memberi bantuan kepada mesjid

¹¹ Lihat RiauInfo, 2 September 2008, *Riaupulp Estate Mandau Gelar "Green Edu" untuk Siswa SD dan SMP*, Pekanbaru.

yang dikunjungi. Kegiatan ini dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat. Masalah kebutuhan yang menyangkut keagamaan ditangani Departemen *Community and Religious Affairs* (CRA), dan berfungsi untuk meningkatkan kerukunan umat beragama dan antar paguyuban.

Menurut PR Manager PT RAPP, kunjungan ke desa-desa di kawasan operasional perusahaan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan PT RAPP setiap bulan Ramadhan. Melalui kunjungan tersebut, silaturahmi yang sudah terjalin baik selama ini dapat terus ditingkatkan untuk mencapai sikap memahami dan saling pengertian antara masyarakat dan perusahaan.

Rutinitas kunjungan seperti di atas masih berjalan hingga sekarang. Sebagai buktinya, CSR PT RAPP yang diwakili oleh *Community and Religious Affair* (CRA) pada 22 Agustus 2008 melakukan pertemuan silaturahmi dengan mubaligh se Pangkalan Kerinci bertempat di Masjid At-Taqwa Riau Kompleks. Silaturahmi ini diikuti oleh 80 orang mubaligh dari Majelis Da'wah Islamiyah, Mubaligh Ikatan Masjid Indonesia dan Mubaligh Ikatan Da'i Indonesia Kabupaten Pelalawan. Sementara dari manajemen PT RAPP hadir, antara lain, *CRA Head* PT RAPP, *Public Relation Manager* PT RAPP, dan beberapa tim manajemen lainnya. Dalam kesempatan itu pihak PT RAPP memberikan paket Ramadhan berupa baju koko dan kain sarung.

Pada hari yang sama ibu-ibu Kompleks PT RAPP yang tergabung dalam wirid akbar yang diadakan sekali dalam satu bulan juga melaksanakan penutupan wirid akbar. Pada kesempatan itu mereka mengumpulkan dana untuk memberi paket bantuan kepada 80 orang anak yatim se Pangkalan Kerinci berupa peci, sarung dan uang tunai sebesar Rp.260.000,-/anak. Total dana yang terkumpul untuk bantuan tersebut sebesar Rp.30.100.000,-.

Selain melakukan kunjungan ke desa-desa dan ibukota kabupaten, tim Safari Ramadhan juga melakukan kegiatan silaturahmi yang sama kepada Pemerintah Daerah di Provinsi Riau, Insan Pers, komponen mahasiswa dan kalangan perguruan tinggi serta tokoh

masyarakat dan tokoh agama. Sebagai contoh, dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1429 H, pada 21 Agustus 2008 PT RAPP menggelar acara silaturahmi dengan unsur Muspida dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pelalawan di Hotel Unigraha Pangkalan Kerinci. Pertemuan silaturahmi ini dihadiri oleh Pejabat Pelaksana Tugas Bupati Pelalawan, Kepala Kejaksaan Republik Indonesia, Ketua Pengadilan, Kapolres, Anggota DPRD, dan unsur pemda lainnya. Di samping itu pertemuan tersebut juga dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat. Acara ini dimaksudkan untuk mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antara PT RAPP dengan unsur pemerintah dan tokoh masyarakat Kabupaten Pelalawan. Sebagai pelaku usaha di Pelalawan, PT RAPP berharap adanya dukungan dari pemerintah dan semua komponen masyarakat agar industri ini dapat terus berjalan dan berkembang semakin besar. Dengan demikian, perusahaan ini dapat terus melanjutkan dan meningkatkan komitmen dan kepeduliannya kepada masyarakat, khususnya yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Tampaknya harapan PT RAPP ini mendapat respons yang positif baik dari kalangan Pemerintah Daerah maupun dari masyarakat. Hal ini terlihat dari pernyataan Pejabat Pelaksana Tugas Bupati Pelalawan yang menyampaikan dukungannya terhadap keberlangsungan perusahaan bubur kertas dan kertas terbesar di Asia itu. Dalam sambutannya ia menegaskan, keberlangsungan suatu perusahaan tentu tidak terlepas dari peran serta dan dukungan dari pemerintahan, komponen masyarakat maupun pihak lainnya. Oleh sebab itu, perlu senantiasa menjaga hubungan baik tersebut karena perusahaan ini tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada dukungan *stakeholders* nya seperti pemerintahan dan tokoh masyarakat.¹² Demikian pula tokoh masyarakat Pangkalan Kerinci, turut menyampaikan apresiasi dan menyampaikan dukungannya bagi keberlangsungan operasional PT RAPP.

¹² Lihat RiauInfo, 21 Agustus 2008, *Riaupulp Silaturahmi dengan Unsur Muspida dan Tokoh Masyarakat Pelalawan*, Pekanbaru.

Kegiatan berupa kunjungan rutin seperti di atas tentunya sejalan “Dengan komitmen perusahaan untuk maju dan berkembang bersama masyarakat, PT RAPP senantiasa berupaya menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan segenap komponen lokal, baik dengan Pemerintah maupun masyarakat,”¹³ Untuk itu CRA PT RAPP terus berupaya untuk meningkatkan semangat *voluntary* kepada setiap warga Riau Kompleks.

3.10. *Community Development Program* PT RAPP (Program Pengembangan Masyarakat PT RAPP)

Sementara itu sedikit agak berbeda dengan program CSR di atas yang lebih bersifat karitas, program *Community Development* yang dilakukan PT RAPP diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat dengan tujuan menciptakan kemandirian masyarakat. Program *Community Development* yang diluncurkan antara lain berbentuk:

3.10.1. *Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Program* (Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/UMKM)

Tujuan utama dari program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini adalah menumbuhkan wirausahawan yang siap mandiri dengan cara meningkatkan kemampuan mereka dalam aspek manajerial dan akses pembiayaan usaha. Dengan kata lain, program ini didesain untuk membantu mitrabinan agar mampu merencanakan dan mengelola usahanya secara mandiri, mulai dari pengelolaan sub-sektor hulu (*in-put* produksi), sub-sektor produksi atau budidaya, sub-sektor hilir (pengelolaan hasil dan pemasaran), sampai dengan sub-sektor pendukung (infrastruktur, training, dan pembiayaan usaha). Pada dasarnya program ini merupakan program layanan yang diberikan kepada mitrabinan usaha pemula, mikro, kecil, dan menengah dalam bentuk pendampingan atau asistensi teknis, pelatihan usaha,

¹³ Lihat “Berita” **Riau Online**, 13 Januari 2004, <http://www.Riau.go.Id>.

konsultasi usaha, temu usaha, kemitraan usaha, dan juga penguatan modal usaha.

Untuk mencapai tujuan di atas, strategi yang dikembangkan adalah:

- Mengidentifikasi dan membantu usaha-usaha masyarakat di sekitar operasional PT RAPP (baik sekitar *Estate*, *Mill* maupun jalan koridor yang dilalui).
- Melakukan integrasi program antara Kios Plus/Usaha Simpan Pinjam yang telah dirintis mitrabina IFS dengan KSP Mitra Madani.
- Memperluas jaringan kerja sama dengan lembaga lain.
- Mentransformasi pola bantuan hibah menjadi *Seed Capital*, *Revolving Fund*, kredit program (*soft loan*) dalam penguatan modal UMKM dampingan.

3.10.2. Small and Medium Enterprises (SMEs) Program (Program Usaha Kecil dan Menengah/UKM)

Program UKM ini bersifat kemitraan. Tujuan dari program kemitraan di lingkup perusahaan yang lebih dikenal sebagai SMEs ini adalah: (a) meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan bagi ekonomi masyarakat *tempatan dalam rangka keberlanjutan usaha*, (b) *memperkuat kapasitas (capacity building)* mitrabinaan yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan dengan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan dalam mengelola usaha, dan (c) mempersiapkan warga tempatan untuk dapat menjadi mitra dalam pola kemitraan usaha dengan PT RAPP.

Kemitraan usaha adalah kerjasama usaha (*in-line*) yang saling menguntungkan dan memperkuat hubungan antara perusahaan dengan pengusaha pemula, kecil dan menengah (*Local Entrepreneur*).

Adapun jenis usaha yang termasuk dalam program SMEs ini adalah *pallet making*, *hauling/logging transport*, *wood harvesting (Acasia)*, *land clearing*, *planting acasia*, *cleaning service*, *employee*

bus/truck, labor supply, civil contracto, loading, cleaning container, wood cutting; landscaping, nursery, black sand coarces/fine; water truck, dan cannal maintenance.

Dalam implementasinya program ini merupakan program layanan berupa: (a) pendampingan usaha, (b) konsultasi usaha, (c) akses permodalan dari lembaga keuangan, (d) pelatihan, (e) identifikasi peluang usaha baru, dan (f) rekrut mitra bina baru.

3.10.3. Integrated Farming System (IFS) (Program Sistem Pertanian Terpadu)

Sistem pertanian terpadu ini merupakan suatu program pemberdayaan yang mengintegrasikan beberapa kegiatan dalam satu paket program. Program ini mengintegrasikan antara sub-sub sektor: pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), perkebunan, peternakan, perikanan yang didukung oleh pengembangan pasar dan industri rumah tangga.



Gambar 8

Peneliti PMB-LIPI mengunjungi anggota kelompok IFS bidang peternakan sapi dan perkebunan salak, didampingi oleh petugas CECOM *Foundation*

Dasar pemikirannya bahwa suatu mata-rantai penting dalam pengembangan pertanian organik adalah ketersediaan *supply organic fertilizer* (kompos) secara berkelanjutan. Komponen utama pemenuhan kebutuhan kompos adalah limbah kotoran ternak. Untuk menghasilkan *supply* limbah kotoran ternak dalam jumlah masal dan berkelanjutan, maka wilayah di mana pertanian organik dikembangkan selayaknya juga merupakan sentra pengembangan ternak. Jika pengembangan pertanian organik berhasil dipadukan dengan pengembangan sub sektor perternakan, apalagi juga berhasil diintegrasikan dengan sub sektor yang lain (perikanan dan industri hilir) maka akan memberikan *multiplying effect* yang luar biasa, baik aspek ekonomi maupun aspek sosial-lingkungan. Artinya melalui pengembangan Sistem Pertanian Organik Terpadu diharapkan menjadi solusi ganda dalam konteks pemberdayaan masyarakat, yaitu dari aspek perekonomian meningkatkan *income generation* masyarakat khususnya kalangan petani marjinal, dan dari aspek sosial-lingkungan akan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan.



Gambar 9

Warga desa berdiri bersama Pejabat Pembuat Komitmen PMB-LIPI di depan kandang tempat menampung kotoran sapi yang akan diolah menjadi kompos.

Model Sistem Pertanian Organik Terpadu ini dikembangkan PPMR PT RAPP di Riau mengingat aspek-aspek mendasar yang menyangkut kualitas tanah di Riau yang pada umumnya berjenis *Podsolik Merah Kuning* (PMK) dan *gambut*. Sifat fisika maupun kimia dari kedua jenis tanah ini tidak layak untuk dijadikan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Jenis tanah PMK adalah jenis tanah yang miskin unsur hara dan sifat fisik yang kompak sehingga menjadi keras saat kering atau liat saat basah, sulit menyerap air dan proses difusi udara kecil. Akibatnya perakaran tanaman sulit menyerap unsur-unsur hara dari dalam tanah dan tanah PMK rentan terhadap erosi. Sedangkan gambut disamping sifat fisiknya yang jenuh air dan lapisan permukaan yang rapuh, secara kimiawi gambut memiliki keasaman tinggi dan miskin unsur hara mikro.

Di luar faktor kondisi tanah, faktor lain yang melandasi dipilihnya program ini yaitu:

- (1) adanya potensi iklim alamiah yang mendukung untuk pengembangan berbagai komoditi pangan dan hortikultura;
- (2) jenis mata pencaharian penduduk pedesaan umumnya di bidang pertanian;
- (3) sektor pertanian merupakan sektor tertua sebagai basis pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga tidak heran bila saat ini hampir 70% rakyat Indonesia, termasuk di Riau, menggantungkan hidupnya sebagai pelaku pertanian dalam berbagai bentuk (*pertanian, perladangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan perdagangan pangan*) baik secara tradisional – konvensional maupun secara industri – modern.

Merujuk pada konsep pertanian berkelanjutan, maka konsep pertanian seharusnya berangkat kepada aspek alamiah, yaitu konsep yang mengadopsi siklus ekosistem sebagai bentuk pembangunan kehidupan terus menerus dalam jangka panjang. Sebuah siklus yang mengintegrasikan seluruh komponen kehidupan alam meliputi manusia, tumbuhan, hewan, dan aspek biokimia lingkungan sebagai sebuah sistem.

Strategi pengembangan program IFS, diarahkan menuju peningkatan taraf kehidupan (*livelihood development*) seiring dengan peningkatan pola pikir (*mindset development*). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan sumber nafkah/ pendapatan usaha dari mitrabinan melalui pengembangan perkebunan rakyat swadaya dan pemasaran produk mitrabinan serta sumber nafkah lainnya (Pertanian, Perikanan dan Peternakan).

Dalam membuat perencanaan dan implementasi program IFS disesuaikan dengan potensi wilayah dan orientasi pasar yang ada. Untuk kelancaran program ini terhadap kelompok binaan diberikan layanan berupa pendampingan dan penguatan kapasitas kelompok sasaran secara *participatory*. Mekanisme pemberdayaan disesuaikan dengan tingkat kemandirian mitrabinan yang bersangkutan. Dalam upaya peningkatan kapasitas mitrabinan dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan fungsi IFS Training Center untuk mengembangkan *attitude, knowledge* dan *skill* para petani mitrabinan.

3.10.4. Training Development and Capacity Building Program

Program ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan baik kualitas pendamping program maupun kelompok sasaran (warga masyarakat) yang menjadi mitrabinan dengan metode yang mudah dipahami. Aspek pelatihan dan pengembangan SDM CECOM diklasifikasikan dalam 3 (tiga) katagori, yakni: (1) Orientasi tentang CECOM dan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat serta perubahan sosial, (2) Keterampilam teknis metodologis, (3) Manajemen dan Kepemimpinan. Dengan begitu diharapkan agar mereka mampu memberikan pelatihan di bidang kewirausahaan. Dalam implementasi programnya selalu diusahakan untuk terus mengembangkan metodologi, modul, kurikulum dan desain pelatihan agar cocok untuk orang dewasa. Untuk kepentingan sarana pelatihan terdapat empat Balai Pelatihan dan Pengembangan Usaha Terpadu (BPPUT) yang terletak di empat kabupaten di Propinsi Riau dan

dikelola oleh CECOM. Dalam rangka mengembangkan *Training Development and Capacity Building Program* ini CECOM juga mendorong tumbuhnya sekolah-sekolah lapangan (SL) yang dikelola secara swadaya mandiri oleh masyarakat, mengembangkan kerjasama, membangun jejaring dengan LPSM lain baik tingkat lokal maupun nasional.

3.10.5. Community Based Business Development (CBB) Program

Program pengembangan usaha berbasis komunitas ini difokuskan kepada aspek pengembangan peluang-peluang usaha yang dapat memperkuat posisi tawar (*bergaining position*) mitrabinan dalam menjalankan usahanya. Baik dalam akses pemenuhan input produksi, keterampilan berproduksi/budidaya, penanganan pasca panen atau pasca produksi, maupun akses pemasaran. Adapun kelompok sasaran dari program ini terutama diarahkan pada mitrabinan yang sudah mandiri (*self-reliant*).

Dalam program ini CECOM sebagai pelaksana program *Community Development* PT RAPP memainkan dua fungsi yakni *pushing power* dengan mendorong tumbuhnya potensi produktif mitrabinan, dan *pulling power* yang diarahkan untuk menarik partisipasi mitrabinan dalam pengelolaan sumberdaya dan peluang yang ada di masyarakat.

3.10.6. Education Program

Tujuan program ini adalah mendorong *collaborative Action* Program. Untuk mencapai tujuan itu diadopsi strategi dasar yakni mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat melalui *Volunteerism and Partnership Program*.

Untuk tahun 2008 strategi dan *action plan* nya adalah sebagai berikut:

Budget plan 2008 untuk *education program* yaitu sebesar Rp.1.700.000.000,- dengan jenis alokasi anggaran yakni:

- (a) Program beasiswa dengan alokasi *budget* sebesar 42%. Program beasiswa diberikan kepada 700 siswa termasuk mereka yang sebelumnya sudah menerima beasiswa dan sedang melanjutkan pendidikannya. Khusus untuk penerima beasiswa baru pada tahun 2008, SMA jumlah penerimanya sebanyak 350 siswa.
- (b) Program non beasiswa dengan alokasi *budget* sebesar 58%. Untuk program ini, prioritas program 2008 diletakkan pada pengembangan Taman Bacaan Kita; Alokasi program honor untuk guru honorer yang diarahkan kepada guru-guru sekolah non negeri atau sekolah-sekolah yang pendiriannya diinisiasi masyarakat, seperti MDA; Program Pengembangan Madrasah yang meliputi:
- Pelatihan Manajemen Madrasah
 - Penguatan Kapasitas Guru
 - Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan.

3.10.7. Community Health Program

Program ini meliputi beberapa kegiatan yaitu:

- (1) Penguatan kapasitas bagi para kader kesehatan desa.
- (2) Kegiatan *pre-emptive, preventive, promotive* di samping *curative* dalam pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pemberian layanan kesehatan gratis untuk masyarakat miskin.

Dimensi program ini adalah Pelayanan Kesehatan: pengobatan massal, imunisasi ibu hamil dan balita, paket gizi untuk ibu hamil dan balita, bedah minor, khitanan massal, operasi katarak, operasi bibir sumbing, penyuluhan kesehatan, dan kerja sama lintas sektoral terus ditingkatkan dengan menyediakan tenaga medis lengkap dengan peralatan dan obat-obatan.

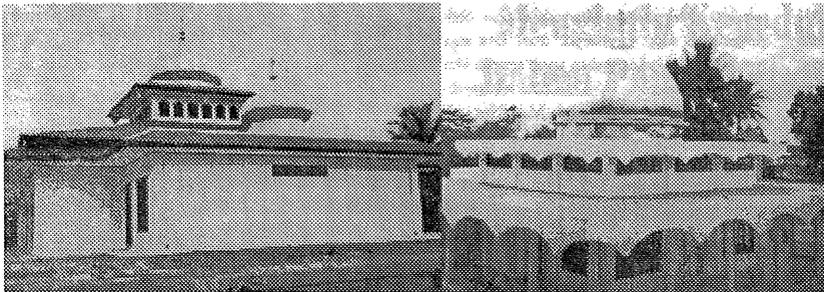
Social Infrastructure Program

Program infrastruktur sosial ini merupakan program yang bersifat pengembangan dalam bidang pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana sosial yang ada di tengah masyarakat. Program ini mengedepankan aspek swadaya masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan infrastrukturnya. Oleh karena itu untuk setiap bantuan yang diberikan oleh PT RAPP kepada *stakeholder* nya akan dituntut aspek keswadaanya.

Dilihat dari jenis programnya, program pemberdayaan ini meliputi beberapa kategori, yaitu:

- (1) Pendidikan
 - a. Pembangunan dan renovasi sarana pendidikan
 - b. Peningkatan peralatan dan perlengkapan pendidikan
- (2) Keagamaan
 - a. Pembangunan dan renovasi rumah ibadah
 - b. Peningkatan peralatan dan peralatan ibadah
- (3) Olah Raga
 - a. Pembangunan dan renovasi tempat olah raga
 - b. Peningkatan peralatan dan perlengkapan sarana olah raga
- (4) Budaya
 - a. Pelestarian dan pengembangan aset-aset budaya daerah
 - b. Pembangunan dan renovasi tempat-tempat budaya
- (5) Infrastruktur
 - a. Pembangunan dan renovasi infrastruktur
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur



Gambar 10
Dua di antara bangunan masjid yang didanai
oleh program pemberdayaan PT RAPP.

Campus and NGO Relation

Program ini ditujukan untuk:

- (a) Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.
- (b) Mendukung kegiatan mahasiswa secara akademis dengan mengembangkan tradisi keilmuan dan pelestarian lingkungan hidup.
- (c) Mendukung aktivitas NGO yang berbasis kampus dalam kegiatan lingkungan hidup dan pendidikan.

3.11. Implementasi *Community Development Program* (CD) PT RAPP

Berkenaan dengan program pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sampai Juni 2008 program ini sudah dapat mengembangkan mitrabinaan (penerima manfaat langsung) sebanyak 158 UMKM. Dalam implementasi programnya mekanisme pemberdayaan diarahkan kepada penguatan manajemen usaha dan penguatan modal usaha melalui pengembangan kredit program untuk UKM. Rata-rata omset usaha mikro dari mitrabinaan mencapai sekitar Rp.5.800.000,- per bulan, dan omset UKM sebesar Rp.84.000.000,- per bulan. Sampai dengan bulan Juni 2008 realisasi kredit program telah bertambah dengan 31 UKM dengan realisasi kredit program sebesar Rp.613.000.000,-. Untuk penyaluran kredit programnya semua melalui KSP Mitra Madani. Sejauh ini tingkat pengembalian kredit relatif baik yakni dengan NPL (*non performing loan*) Juni 2008 sebesar 3,5% dari toleransi maksimal sebesar 5%. Saat ini sedang didorong beberapa mitra untuk memperoleh pinjaman komersil dari Lembaga Keuangan Bank dan atau Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Dalam kaitannya dengan SMEs, pola yang dikembangkan adalah kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat sekitar di mana masyarakat mendirikan perusahaan untuk dapat memasok bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Melalui kerjasama ini perusahaan mendapat benefit berupa terjaminnya ketersediaan bahan

baku yang baik untuk kegiatan produksi perusahaan. Sementara masyarakat mendapatkan pekerjaan rutin sebagai mata pencahariannya. Dengan demikian kerjasama ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak (*win-win solution*). Salah satu ilustrasi mengenai kerjasama ini adalah industri pembuatan pallet yang dibutuhkan dalam *packaging* dan distribusi kertas PT RAPP. Sebelumnya pekerjaan ini dilakukan sendiri oleh salah satu unit dalam PT RAPP. Namun karena banyak permintaan pekerjaan dari masyarakat dan PT RAPP pun ingin turut memajukan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar lingkungannya, maka pekerjaan tersebut dikeluarkan oleh perusahaan dan diberikan kepada masyarakat. Dalam kerjasama ini perusahaan memberikan pekerjaan pembuatan pallet tersebut kepada perusahaan binaan yang berasal dari masyarakat setempat. Untuk mendapat pekerjaan ini tentu saja perusahaan binaan tersebut terlebih dahulu melalui proses pembinaan yang dilakukan oleh unit CSR PT RAPP. Dalam konteks ini masyarakat yang berminat diminta untuk mendirikan perusahaan kecil. Dalam prosesnya mereka dibantu oleh pembina dari PT RAPP. Mereka diberikan pelatihan manajemen, cara pengadaan dan pemilihan bahan baku, teknik pembuatan pallet yang sesuai dengan persyaratan perusahaan, pengetahuan tentang jenis dan ukuran pallet yang notebene mencapai 40 jenis, sistem pengiriman ke perusahaan, sistem penagihan dan pembayaran dan sebagainya. Mereka pun dibantu dalam mendisain dan ketika membangun *workshop* serta pengadaan peralatannya. Satu persyaratan yang penting dalam kaitannya dengan *Community Development* adalah bahwa PT RAPP mensyaratkan perusahaan binaan ini mempekerjakan tenaga lokal. Dengan demikian pemberdayaan yang dilakukan perusahaan meliputi pemberdayaan ekonomi komunitas lokal.

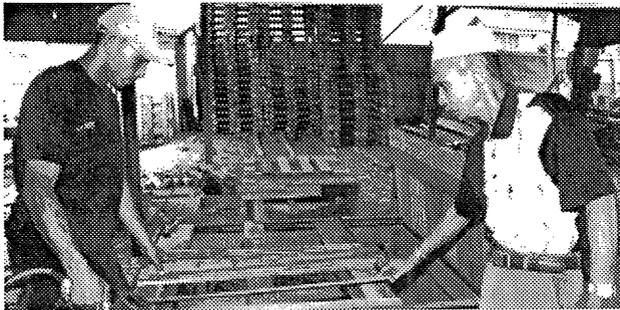
Pada awal pengembangannya hanya ada 3 (tiga) perusahaan yang mau terlibat dalam produksi pallet ini. Di masa kejayaannya pengusaha pallet ini rata-rata dapat memperoleh penghasilan bersih (*net income*) sebesar Rp.20.000.000,- per bulannya, sementara karyawannya digaji sekitar Rp.1.500.000,-. Namun sekarang usaha

pembuatan pallet ini mengalami penurunan karena semakin banyak masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam usaha pembuatan pallet ini. Jumlah perusahaan UKM pallet sekarang mencapai 16 perusahaan, sementara jumlah pesanan pallet dari PT RAPP dapat dikatakan relatif konstan. Bahkan pada saat ini (Oktober 2008) jumlah pesanan pallet tersebut semakin berkurang seiring dengan terjadinya krisis ekonomi dunia yang berimbas pada berkurangnya permintaan kertas dunia, termasuk PT RAPP.

Implikasinya, jumlah *pesanan* yang sudah berkurang ini pun harus didistribusikan kepada lebih banyak UMKM binaan. Namun bagi perusahaan binaan awal yang telah cukup besar, penurunan permintaan yang diterimanya tidak terlalu merisaukan, karena dia seringkali diminta untuk menutup kekurangan pallet untuk dipasok ke PT RAPP dari UMKM lain yang relatif baru yang tidak mampu memenuhi target produksi diberikan PT RAPP. Sebagai contoh, perusahaan pallet milik pak Zamhur yang menjadi salah satu perusahaan pallet binaan perintis di Pangkalan Kerinci dulunya mendapat pesanan rata-rata per bulan sebanyak 5.000 buah pallet dari berbagai ukuran. Sekarang pesanan pallet yang rata-rata diterima per bulan mengalami penurunan menjadi 3.000 buah.

Namun dalam prakteknya dia harus menyediakan pallet ke PT RAPP rata-rata per bulan sebanyak 5.000 buah. Hal ini menjelaskan bahwa dia mendapat pesanan tambahan rata-rata sebanyak 2.000 pallet. Tambahan pesanan tersebut diperoleh karena adanya perusahaan UMKM pallet lainnya yang tidak mampu memenuhi jatah pesanan yang diberikan PT RAPP yang kemudian diberikan kepada perusahaan pak Zamhur. Namun demikian konsekuensinya, terlepas apakah dia mendapat pesanan tambahan atau tidak bagi pak Jamhur, bahwa dia harus selalu memiliki stok pallet ataupun bahan baku pallet tambahan setiap bulannya. Hal semacam ini penting karena sistem pesanan pengiriman pallet dari PT RAPP tidak selalu terjadwal, tergantung dari banyaknya jumlah kebutuhan pallet dari perusahaan dari ke hari. Pesanan tersebut bisa saja datang mendadak dan harus dikirimkan pada hari itu juga.

Selama ini ada 3 perusahaan pallet binaan yang menjadi pegangan pembina dari PT RAPP untuk menutup kekurangan pallet untuk dipasokkan ke PT RAPP yang dialami oleh perusahaan binaan lainnya.



Gambar 11

H. Zamhur sedang memberikan petunjuk kepada karyawannya di bengkel kerja pembuatan pallet, merupakan salah satu jenis usaha dalam Program SMEs.

Sementara itu mengenai Sistem Pertanian Terpadu (*Integrated Farming System*) adalah sebuah model pertanian yang mengintegrasikan tiga sub sektor pertanian dalam arti luas, yaitu peternakan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta perikanan dalam satu lahan. Ketiga sub sektor ini masih diperkuat dengan pengembangan industri rumah tangga (*home industry*) sebagai sektor pendukung kegiatan produksi menuju pasar.

Konsep Sistem Pertanian Terpadu adalah konsep pertanian yang dapat dikembangkan untuk lahan pertanian terbatas maupun lahan luas. Pada lahan terbatas atau lahan sempit yang dimiliki oleh petani, konsep ini menjadi sangat tepat dikembangkan dengan pola *intensifikasi* lahan. Lahan sempit akan memberikan produksi optimal tanpa ada limbah yang terbuang percuma. Sedangkan untuk lahan lebih luas konsep ini akan menjadi suatu solusi mengembangkan pertanian agrobisnis yang lebih menguntungkan. Adapun komoditi

unggulan dapat disesuaikan dengan keadaan suatu daerah pengembangan, baik komoditi pertanian, peternakan, maupun perikanan.

Komoditi utama dalam model ini adalah ternak besar dan dalam hal ini PPMR PT RAPP mengembangkan sapi. Dipilihnya sapi berdasarkan beberapa alasan, yaitu:

- (1) sapi merupakan hewan ternak yang memiliki biomass besar, sehingga menghasilkan kotoran yang cukup banyak untuk keperluan pertanian sebagai bahan baku kompos;
- (2) sebagai hewan yang memiliki biomass besar, sapi relatif memiliki daya tahan (*survival life*) yang lebih baik sehingga dengan pemeliharaan sederhana masih memungkinkan untuk tetap hidup;
- (3) pemeliharaannya relatif mudah, khususnya dalam penyediaan pakan yang dapat diperoleh dari rumput-rumput alam di sekitar permukiman masyarakat atau limbah pertanian;
- (4) dipilihnya sapi juga dimaksudkan untuk meningkatkan populasi ternak sapi di Riau sehingga dapat mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada daging;
- (5) sapi dapat dimanfaatkan tenaganya untuk kegiatan pertanian seperti membajak tanah.

Kegiatan peternakan merupakan kunci dalam sistem pertanian terpadu. Beternak sapi dalam masa 1 tahun pemeliharaan akan menghasilkan pertambahan berat badan yang cukup dengan nilai jual ekonomis. Untuk pembudidayaan dalam masa dua tahun pemeliharaan akan menghasilkan anak. Artinya kegiatan peternakan ini yang didukung ketersediaan hijauan makanan ternak (HMT) ataupun pakan alternatif lain sangat layak dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan petani. Secara harian kegiatan petani ini akan menghasilkan kotoran yang dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan kompos atau bokashi. Selanjutnya kompos tersebut dipergunakan sebagai pupuk organik untuk menyuburkan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta kebun rumput hijauan makanan ternak. Dengan begitu kecukupan bahan organik tanah dapat terpenuhi sehingga penggunaan pupuk organik sebagai

bahan peningkatan kesuburan tanah dapat diminimalisir. Dengan demikian kebutuhan makanan ternak dapat dipenuhi sehingga pertumbuhan berat badan rata-rata ternak dapat terus meningkat. Hal ini menunjukkan pula siklus atau rangkaian bahwa kegiatan ini memberikan nilai efisiensi yang tinggi di mana tidak ada limbah yang terbuang dari kegiatan produksi.

Sementara dalam kegiatan perikanan, kotoran ternak dimanfaatkan untuk pakan ikan dan pupuk dasar (dalam budidaya dengan wadah kolam) guna menumbuhkan *phytoplankton*. Hal ini akan menghemat biaya produksi di mana saat ini untuk kegiatan perikanan dibutuhkan biaya yang cukup besar. Ini berarti kegiatan perikanan yang sejalan dengan peternakan akan memberikan nilai produksi yang lebih ekonomis.

Industri kecil merupakan fraksi pendukung rangkaian tiga sub sistem dari sistem pertanian terpadu yang fungsinya sebagai penampung limbah hasil produksi (*over production*) maupun ditujukan untuk memberikan nilai tambah produksi yang dihasilkan melalui kegiatan sortasi, pengolahan, dan pengepakan (*packaging*). Dengan demikian nilai jual produk tersebut menjadi lebih tinggi di pasaran dan mendapatkan pasar yang lebih baik pula.

Jadi bila dilihat dari siklusnya, lahan pertanian yang subur dengan pemupukan pupuk organik akan menyediakan sumber pakan yang memadai bagi tanaman yang selanjutnya, tanaman dapat menghasilkan produksi tanaman pangan dan hortikultura yang tinggi. Produk dari lahan ini menjadi komoditi dagang yang akan memberikan pendapatan (*income*) tambahan bagi masyarakat tani. Limbah dari hasil produksi pertanian berupa hijauan yang tidak layak dijual atau dikonsumsi dapat digunakan sebagai ransum/pakan ternak. Hijauan lain yang tidak dapat digunakan untuk pakan ternak digunakan kembali untuk campuran pembuatan kompos atau bokashi. Dengan demikian tidak ada lagi limbah produksi (*waste*) yang terbuang dan tidak bermanfaat. Pengelolaan secara terus-menerus dan penguatan dalam bentuk kelompok tani dengan pengembangan agribisnis akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

mendorong terjadinya pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*). Produksi tersebut dapat dijadikan sentra-sentra agribisnis yang menghasilkan produk-produk unggulan untuk kebutuhan pasar lokal maupun untuk tujuan ekspor.

Dalam implementasi pemberdayaan masyarakat melalui Sistem Pertanian Terpadu (*Integrated Farming System*), programnya dimulai dengan pembentukan kelompok tani yang terdiri dari tujuh Kepala Keluarga (KK) petani. Selanjutnya kepada setiap Kepala Keluarga (KK) petani tersebut diberi dua ekor sapi bakalan dalam bentuk hibah yang terdiri dari satu ekor jantan dan satu ekor betina. Namun demikian dalam pemeliharaannya ternak-ternak itu dikumpulkan di satu kandang milik kelompok tani yang bersangkutan agar kotorannya bisa dijadikan pupuk kompos untuk pertanian dan makanan ikan. Lalu petani itu mengembangkan ternak sapi, dan memberikan anak ternak itu kepada petani lain secara bergulir. Pemilihan penerima ternak lanjutan dinilai oleh petani sendiri melalui suatu proses pelatihan keahlian sehingga petani penerima benar-benar sudah memiliki keahlian beternak.



Gambar 12
Pengembangbiakan sapi dalam program IFS

Sampai dengan tahun 2007 Program Sistem Pertanian Terpadu yang dijalankan CECOM *Fondation* telah membina 4.305 orang Kepala Keluarga (KK) petani mitra binaan dan 102 kelompok tani di 104 desa yang tersebar di lima kabupaten dan satu kota yakni Pelalawan, Siak, Kampar, Rohul, Kuansing dan Pekanbaru. Dari jumlah tersebut petani yang aktif sebanyak 3.139 Kepala Keluarga (KK) atau 73% dari total petani yang sudah dibina. Sementara pada tahun 2008 jumlah petani dampingan yang aktif adalah sebanyak 3.305 Kepala Keluarga (KK) atau 73% dari total petani dampingan sebanyak 4.505 Kepala Keluarga (KK). Adapun kelompok taninya (poktan) berjumlah 145 kelompok yang tersebar di 108 desa. Dari jumlah kelompok tani tersebut 40 poktan di antaranya telah berstatus swadaya.

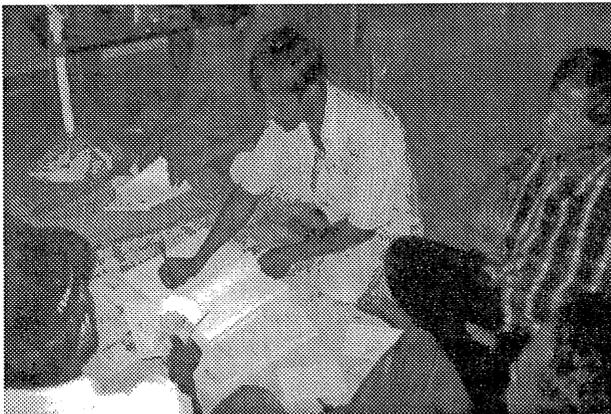
Komoditi pertanian yang dikembangkan sampai Juni 2008, meliputi hortikultura dan tanaman pangan (382 hektar), salak dan tanaman buah lainnya (105 hektar) dan kebun swadaya (547 hektar). Sementara itu ternak sapi yang dikembangkan oleh 911 Kepala Keluarga (KK) di 104 poktan yang tersebar di 83 desa sebanyak 3.471 ekor, baik itu merupakan Hak milik, Gaduhan, ataupun Kredit. Realisasi Kredit Ternak tahun 2007 sebanyak 65 ekor untuk petani 30 Kepala Keluarga (KK) dengan nilai kredit sebesar Rp.225.600.000,-. Sementara itu realisasi Kredit Ternak tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi sebesar 179 ekor sapi dan 25 ekor kambing untuk 81 petani dengan nilai kredit sebesar Rp.948.000.000,-. Melalui program Sistem Pertanian Terpadu ini berhasil meningkatkan kemampuan petani memproduksi *agro-input*, seperti kemampuan memproduksi 933.3 ton kompos, 4.129 batang anakan salak, dan 154 ekor anak sapi. Omzet para mitra bina PT RAPP sudah mencapai ratusan juta rupiah.

Pada pertengahan 2008 telah direalisasikan pembiayaan melalui Kelompok Simpan Pinjam Mitra Madani (KSP MM) sebesar Rp.948.000.000,- untuk program *soft loan* kepemilikan ternak sebanyak 179 ekor sapi dan 25 ekor kambing, serta empat mesin *chopper* plus kandang sejumlah Rp.82.000.000,-. Program pemberian

soft loan tersebut diberikan kepada 81 mitrabinaan dari 25 kelompok tani yang berasal dari 25 desa di lima Kabupaten/kota. Se jauh ini pengembalian pinjaman dari mitrabinaan berjalan lancar dengan NPL 0%. Sebetulnya kebutuhan akan program ini sangat tinggi dari mitrabinaan, namun dana yang tersedia terbatas.

Untuk pembiayaan *Revolving Fund* telah direalisasikan sebesar Rp.227.000.000,- pada 22 kelompok tani dari 22 desa di lima kabupaten/kota. Sementara untuk pembiayaan dengan pola hibah/*seed capital* karena dilakukan secara selektif, maka realisasinya masih belum begitu banyak.

Selama Januari – Juni 2008, ada 11 unit Unit Simpan Pinjam (USP/LKM) berhasil dikembangkan pada 11 kelompok tani dari target 2008 sebanyak 30 unit. Sehingga sampai Juni 2008, telah berjalan 96 USP/ LKM di tingkat Kelompok tani.



Gambar 13

Anggota masyarakat sedang mengadakan pertemuan rutin Simpan Pinjam di Kelompok Tani Panca Karya

Untuk menunjang desa mandiri pangan; CECOM, CSR dan *Estate* Riaupulp dan Dinas TPHI Pemerintah kabupaten. Kampar telah melakukan MoU untuk pencetakan sawah baru seluas 100 hektar di desa Kuntu, dengan pola *joint program - sharing budget*.

Dalam hal ini Pemerintah kabupaten Kampar memiliki komitmen untuk perbaikan irigasi sebesar Rp.680.000.000,-. Sementara PT RAPP memiliki komitmen dalam pencetakan sawahnya dan pendampingan kelompok tani melalui CECOM. Kemudian *Estate* Logas berperan secara teknis pencetakan sawahnya. MoU ini sudah mencapai kemajuan dengan telah selesainya pemetaan dari 100 hektar lahan telah, pengerjaan irigasi sedang dikerjakan, dan alat berat dari *Estate* Logas untuk memulai pencetakan sawah sudah berada di lokasi.

Tahun 2008 program IFS difokuskan pada penguatan kelompok dan kelembagaan untuk menuju kemandirian dan peningkatan keswadayaan dengan melakukan integrasi program melalui penguatan *micro financing* di kelompok tani, mekanisme pemberdayaan fokus kepada *Revolving Fund* dan Kredit Program.

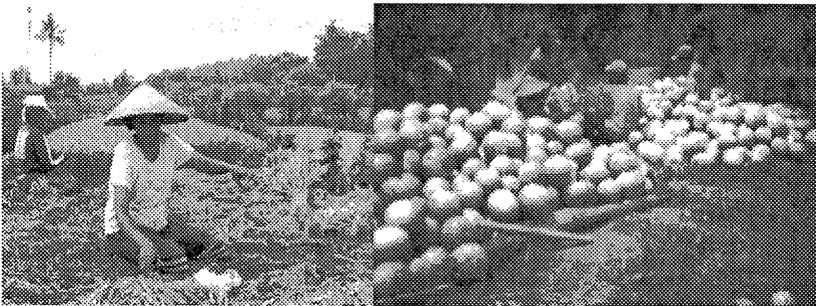
Tidak semua peternak berhasil mengembangkan usaha peternakan tersebut. Ada yang kurang mengurus hewan ternaknya karena urusan lain, dan ada pula yang menjualnya. Mereka yang sengaja menjual ternak dikenakan sanksi pemecatan keanggotaan oleh kelompok dan mengharuskannya menggantinya langsung atau secara berangsur-angsur. Selain itu, ada juga peternak menjual ternak hasil pengembangan biakan yang sudah menjadi miliknya karena terpaksa, seperti untuk biaya pengobatan dan biaya pendidikan anak-anaknya. Meskipun yayasan tidak mempunyai kewenangan untuk melarang, tetapi yayasan selalu mengingatkan agar tidak menjual semua hewan ternak tersebut, supaya usahanya tidak terputus/terhenti.

3.11.1. Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura

Komoditi unggulan dalam kegiatan pertanian adalah komoditi yang mempunyai tingkat permintaan tinggi dan terus-menerus dibutuhkan masyarakat, serta memiliki nilai jual yang cukup baik. Menetapkan sebuah komoditi unggulan di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Penetapan komoditi unggulan tentunya tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, namun memerlukan kajian dan uji coba terus-menerus sehingga nantinya

dapat dilihat komoditi apa yang tepat untuk ditampilkan sebagai sebuah komoditi unggulan. Hampir setiap wilayah baik desa atau kecamatan mempunyai komoditi unggulan dan berbeda satu dengan yang lainnya sesuai kondisi lahan, tingkat permintaan atau daya jualnya. Namun yang menjadi titik krusial dalam mengelola dan menjaga satu wilayah penghasil komoditi unggulan tertentu adalah mengorganisir kelompok tani untuk melakukan perencanaan usaha taninya, khususnya di bidang pola tanam. Artinya jangan sampai keberhasilan satu produk dalam menembus pasar, baik kuantitas maupun kualitas produksi menghancurkan harga jual produk tersebut yang diakibatkan kelebihan produksi (*over production*). Di sinilah pentingnya peran PPMR PT RAPP dalam mendampingi petani agar secara sadar dan mengedepankan kepentingan bersama untuk membagi pola tanam komoditi yang dikembangkan.

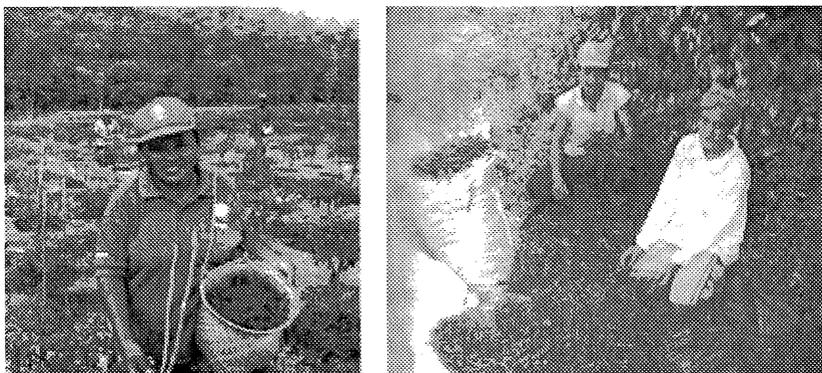
Beberapa komoditi pertanian yang telah berhasil dikembangkan petani menjadi komoditi unggulan di wilayahnya adalah cabe (cabe merah dan cabe rawit), jagung manis, kacang panjang, semangka, sayuran dan salak.



Gambar 14
Kelompok tani program IFS bidang hortikultura
sedang memanen sayur dan buah semangka

3.11.2. Budidaya Cabe

Cabe merupakan salah satu tanaman pangan yang bernilai ekonomis tinggi. Potensi pasar yang cukup luas menyebabkan banyak petani mengusahakan budidaya komoditi ini. Namun demikian tanaman yang bernilai ekonomis tinggi biasanya memiliki risiko kegagalan yang cukup tinggi pula. Risiko kegagalan sering disebabkan oleh hama dan penyakit serta faktor perubahan iklim. Untuk itu diperlukan disiplin dan keuletan yang tinggi dari petani dalam mengusahakan cabe agar memperoleh kuantitas dan kualitas produksi yang optimal.



Gambar 15
Petani cabe program IFS dengan hasil panennya

Cabe dapat dipanen setelah berumur 90 – 100 hari di lapangan dan dapat dipanen dua sampai tiga kali seminggu. Sentra cabe dapat dilihat di Banjar Benai Kabupaten Kuantan Singingi dan sekitarnya, sementara yang menjadikan cabe rawit sebagai komoditi unggulan ada di Sentra Bunut Kabupaten Pelalawan.

3.11.3. Budidaya Kacang Panjang

Penanaman sayuran di desa Bukit Agung dan Desa Makmur telah berjalan secara terus menerus, tanaman sayuran yang berasal dari desa tersebut cukup dikenal oleh masyarakat yang berada disekitar Kecamatan Pangkalan Kerinci karena hasil produksinya setiap hari sudah masuk sampai ke pasar Pangkalan Kerinci. Dengan dikenalnya produksi sayuran dari desa tersebut maka para petani terus menanam sayuran, terutama tanaman kacang panjang. Unggulan petani umumnya menanam kacang panjang karena menurut mereka kondisi tanahnya cocok untuk tanaman ini, perawatannya lebih mudah karena mereka memahami proses budidayanya. Benih yang dipakai adalah benih lokal sehingga mudah didapat dan buahnya tahan lama, tidak mudah layu. Selain itu hasil panennya mudah dipasarkan, dengan harga yang relatif stabil dan tanaman ini cepat menghasilkan (berproduksi). Biasanya lama pemanenan bisa mencapai 10-15 kali panen setiap kali musim tanam. Jika tanaman dirawat dengan baik dan sewaktu panen pemetikan polong dilakukan dengan benar, yaitu polong dipetik sampai ke pangkal polong, maka hasil panennya bisa maksimal sampai lima belas kali panen.

3.11.4. Budidaya Salak Pondoh

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat dengan usaha sistem pertanian terpadu, budidaya tanaman sayuran tidak lagi disangsikan manfaatnya untuk meningkatkan pendapatan keluarga yang bersifat jangka panjang.

Salah satu alternatif pilihan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah mengembangkan budidaya salak, sebagai tanaman jangka panjang dengan tanaman sela (*intercrop*) berupa sayuran dan horikultura lainnya yang bisa dipetik hasilnya dalam waktu relatif singkat. Untuk dapat mewujudkan hasil pemikiran tersebut tentunya petugas lapangan harus dapat menguasai teknik budidaya yang benar. Jenis salak ini merupakan tanaman yang paling cocok untuk dikembangkan dengan pola polikultur. Beberapa

keunggulan salak jenis ini di antaranya adalah tidak mengenal musim buah (dapat berproduksi sepanjang tahun) sehingga dapat menjamin adanya kestabilan harga di pasaran, mulai berproduksi pada umur 2,5 tahun, dan usia produktif tanaman ini relatif lama. Budidaya salak pondoh relatif mudah dilakukan karena bisa hidup di dataran rendah hingga dataran tinggi, dengan tingkat serangan hama dan penyakit relatif kecil. Hal yang paling penting yaitu rasanya disukai banyak orang karena dagingnya yang relatif enak, renyah dan manis.



Gambar 16
Peneliti PMB-LIPI tengah memetik salak hasil program IFS



Gambar 17
Terlihat salak jenis Pondoh yang kecil-kecil buahnya, namun manis rasanya, siap dipanen

Selain dapat dikonsumsi langsung buah salak juga diolah menjadi beberapa jenis makanan seperti manisan salak dan bisa juga dibuat menjadi kripik salak. Kedua jenis makanan ini sangat digemari oleh konsumen, sehingga walaupun terjadi kelebihan produksi atau nilai jual yang menurun, petani dapat membuat buah salak pondok menjadi aneka produk olahan yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Hal inilah yang mendorong PPMR PT RAPP bersama petani mitrabina, untuk mencoba mengembangkan budidaya salak pondoh ini di Riau.

3.11.5. Budidaya Perikanan

Kegiatan budidaya perikanan yang berkembang di desa binaan PPMR adalah budidaya perikanan darat (*fishpond*) dan budidaya perikanan keramba (untuk daerah perairan). Khusus dalam budidaya perikanan darat maka pemberian pupuk dasar (pupuk organik) kolam ikan (*fishpond*) untuk menaikkan kesuburan media kolam tersebut adalah mutlak dilakukan. Pupuk dasar ini berguna untuk menumbuhkan *phytoplankton* yang merupakan pakan ikan terutama untuk benih. Oleh karena itu dengan adanya integrasi antara subsektor dalam sistem pertanian terpadu, kegiatan budidaya dan pembenihan dapat dikembangkan. Lebih lanjut dalam pengembangan perikanan ini masih memerlukan pengembangan pakan-pakan alternatif yang dapat menjadi substitusi atau menjadi pakan tambahan menggantikan pakan buatan yang harganya relatif mahal di pasaran. Pakan alternatif tersebut antara lain ulat belatung yang dikembangbiakkan dengan media *sludge* (limbah proses kelapa sawit), budidaya cacing tanah, dan sebagainya untuk memperkecil biaya (*cost*) produksi. Kegiatan ini selanjutnya diharapkan memberikan nilai keuntungan yang lebih baik bagi petani dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.



Gambar 18
Kelompok tani program IFS bidang perikanan
sedang memanen ikan gurami

3.11.6. Pengembangan Industri Kecil

Sektor industri kecil merupakan wadah untuk menampung hasil-hasil produksi pertanian dalam upaya untuk memberikan nilai tambah maupun akibat kelebihan produksi (*over production*). Melalui sektor ini kegiatan pengolahan pasca panen seperti sortasi, pengolahan, dan pengemasan dapat dilaksanakan sehingga produk-produk yang dihasilkan mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi. Keberadaan sektor ini sangat dibutuhkan dalam upaya mempersiapkan berlimpahnya hasil produksi masyarakat tani tanpa diliputi rasa takut sebagai akibat tidak tertampungnya hasil pertanian mereka di pasar.



Gambar 19
Madu Hutan Riau yang sudah dikemas hasil industri kecil dalam program IFS, siap dipasarkan di bawah label “Rumah Madu”.

3.11.7. Sapi

Sistem pemeliharaan yang dilakukan mitrabina PPMR PT RAPP ada dua macam yaitu penggemukan (*fattening*) dan budidaya (*breeding*). Bagi kelompok tani yang menerima program penggemukan, maka setiap anggota memelihara sebanyak dua ekor sapi jantan berumur satu tahun untuk digaduhkan. Penggaduhan ini bertujuan untuk membesarkan dan menggemukan sapi tersebut sampai berumur dua tahun dan jika harganya relatif tinggi maka dapat dilakukan pelelangan. Bila hasil penimbangan dua ekor sapi tersebut mencapai 450 kg maka untuk petani penggaduh tersebut diberikan dua ekor bakalan (sapi yang akan digaduhkan) berumur satu tahun sebagai hak milik petani tersebut, sedangkan sisa penjualan dibelikan untuk digulirkan ke mitra yang belum menerima sapi.

Bagi petani yang menerima program budidaya, setiap anggota memelihara tiga ekor sapi bakalan (satu pejantan dua betina). Perguliran yang dilakukan dalam sistem budidaya ini ada dua cara

yaitu: (1) mengembalikan dua ekor bakalan hasil dari budidaya tersebut, atau (2) mengembalikan pejantan yang mereka pelihara minimal 1,5 tahun. Hal ini bertujuan agar betinanya sempat dikawini oleh pejantannya. Hasil penjualan pejantan tersebut dibeli kembali sapi bakalan untuk digulirkan.

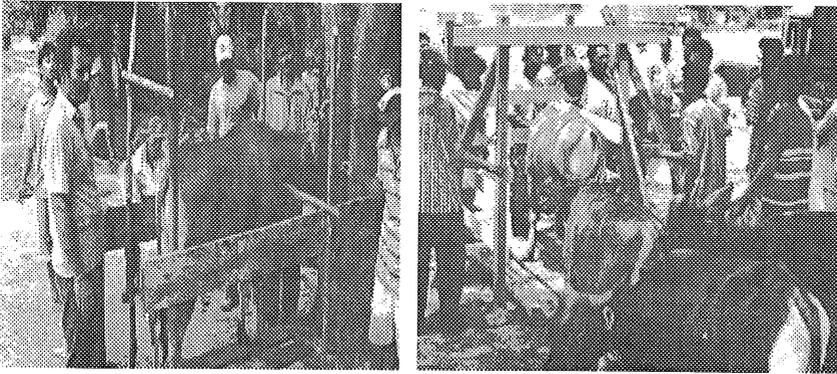
Selain kebijakan, pemilihan dua alternatif tersebut dikembalikan ke dalam musyawarah kelompok, yang mana kiranya dianggap petani lebih menguntungkan. Ini berarti segala keputusan di tentukan oleh kelompok.

Dalam pemilihan calon penerima sapi pun harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Pengalaman awal, ketika kelompok belum solid dan usaha pertanian belum berjalan, terjadi kecolongan karena di beberapa desa ketika masih gaduhan mereka disiplin memeliharanya. Namun ketika sudah menjadi hak milik pekerjaan yang krusial adalah mencegah mereka agar tidak menjual ternaknya tanpa koordinasi dengan kelompok tani dan PPMR PT RAPP.

Penjualan sapi bukan tidak boleh dilakukan tetapi setiap kelompok tani harus bermufakat berapa kemampuan mereka memelihara sapi dan berapa lahan yang mereka kelola sehingga kebutuhan akan kompos akan terpenuhi, serta bagaimana agar jumlah sapi di desa mereka menjadi meningkat.

3.11.8. Pelelangan Sapi

Pelangan biasa dilakukan ketika harga sapi tinggi saat menjelang *Idul Adha* (lebaran haji). Sapi Bali peliharaan petani mitrabina PPMR PT RAPP merupakan salah satu jenis sapi yang banyak diminati para pedagang sapi maupun masyarakat yang akan berqurban. Rata-rata berat sapi yang dilelang berkisar antara 180 sampai 300 kg dan telah mencapai umur minimal dua tahun.



Gambar 20

Pemeriksaan kesehatan sapi hasil penggemukan dalam program IFS oleh dokter hewan CECOM *Foundation* sebelum ditimbang dan dilelang.

Pelelangan yang dilakukan biasanya dengan cara mencari beberapa orang pembeli yang sanggup membeli dengan tunai. Bila pembelinya lebih dari 1 orang maka dilakukan pelelangan, pemenang lelang adalah pembeli dengan harga tertinggi. Pembeli sapi lelang wajib membayar paling lama 1 minggu, hal ini dilakukan agar petani mitrabina dapat segera membeli kembali bakalan sapi pengganti.

Pendampingan dan monitoring bagi mitra tetap menjadi bagian tugas yang harus terus dilaksanakan hingga wujud kemandirian terealisasi. Pemahaman tentang pola pemeliharaan ternak yang tepat pada sebahagian mitra bina telah dapat di transformasikan, sementara sebahagian lain masih membutuhkan pendampingan yang intensif hingga mereka memahami tentang pentingnya ternak sebagai salah satu sumber pembangunan kesejahteraan keluarga. Dalam membina masyarakat yang penuh dinamika memerlukan pengetahuan yang komprehensif dan tindakan yang arif karena selalu terdapat perbedaan pemikiran serta kepentingan antara individu maupun kelompok.

3.11.9. Pendampingan

Pendampingan dan monitoring dalam pemeliharaan sapi bagi mitrabina dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan mereka memelihara ternaknya secara benar dan menghindari terjadinya penjualan tanpa koordinasi. Pada awal proses pendampingan untuk mengetahui kemampuan tersebut, pendamping wajib mengunjungi mitrabina dari rumah ke rumah yang tujuannya agar tahu persis kemampuan tersebut. Jika saat kunjungan petaninya tidak di rumah maka harus dicari waktu yang tepat karena *yang dibina bukan sapinya tetapi petaninya*. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa untuk penyuluhan sebaiknya dilakukan pada sore hari atau pada hari jum'at mereka biasanya istirahat.

Perlu dimengerti bahwa memberikan pendampingan dan penyuluhan pada kelompok yang sudah solid dengan kelompok yang baru terbentuk dan masih lemah sangatlah berbeda. Kalau kelompok yang sudah solid, pendamping hanya membuat kesepakatan pada hari apa dan pos-pos mana saja di desa untuk dilakukan penyuluhan. Apalagi bila sudah ada kader kesehatan hewan, maka pihak pendamping dan kader kesehatan hewan akan bersama-sama melakukannya.

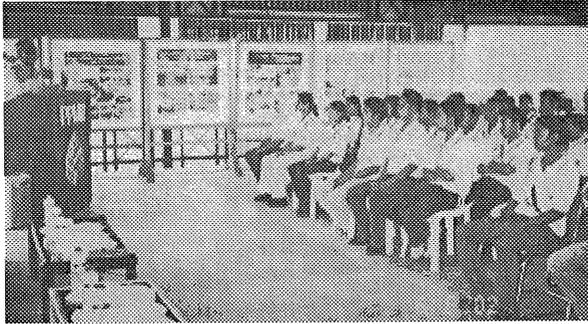


Gambar 21

Seorang tenaga pendamping dari CECOM Foundation sedang memberikan motivasi dan pengarahan kepada warga yang terlibat dalam program IFS.

Kasus penyakit dan gejala penyakit yang banyak ditemukan adalah kembung, cacingan, mencret dan penyakit kulit, sementara penyakit infeksi saluran pernafasan dan pencernaan sesekali saja ditemukan. Saat penyuluhan kepada petani biasanya lebih banyak diperkenalkan bahan-bahan obat yang ada di sekitar mereka, sehingga ketergantungan akan obat medis dan tenaga medis menjadi menurun. Sebagai contoh buah sawo muda yang dapat menghentikan mencret, kunyit dan bawang putih yang berfungsi sebagai antisetis dan antibiotik alami.

Mengenai implementasi *Training Development and Capacity Building Program*, selama ini telah dilakukan 31 kali pelatihan untuk mitrabinaan baik internal maupun eksternal dengan total peserta 528 orang. Dari 31 kali pelatihan maupun studi banding pihak eksternal, tidak semuanya menggunakan anggaran yang telah ditetapkan karena ada juga yang pembiayaan pelaksanaan kegiatannya berasal dari pihak ketiga yang bekerja sama dengan CECOM *Foundation*. Baru delapan kali pelatihan yang menggunakan anggaran dari CECOM. Selama ini implementasi dari perencanaan program *training development* dan *capacity building* selalu tercapai secara efisien dan efektif. Sebagai contoh, meskipun sampai bulan Juni 2008 realisasi anggaran untuk program ini baru mencapai 49% dari total anggaran sebesar Rp.373.000.000,- namun demikian jumlah pelatihan dan peserta pelatihan telah melebihi dan hampir mencapai target yang ditetapkan. Sampai bulan Juni 2008 untuk kegiatan *training* reguler telah mencapai 90%. Dengan rincian kegiatan meliputi *training* mitrabinaan IFS sebanyak 11 Kali (55%), sosialisasi flu burung oleh TD dan CB sebanyak lima kali (25%), kesehatan lingkungan melalui kegiatan integrasi program 2 kali (10%) . Di samping itu *training* untuk pihak eksternal telah mencapai 260%, yaitu sebanyak 13 kali dari lima kali dalam perencanaan (BRCS satu kali, Dinas TPHI Kampar satu kali, PT INCO satu kali dan 10 kali di desa – desa dampingan (Dinas TPHI Kampar).



Gambar 22

Peserta pelatihan manajemen KUD, Tata Boga, Ukiran dan Mekanik Elektro sedang mengikuti pembukaan pelatihan di BLPT PPMR Pangkalan Kerinci

Untuk mencapai hasil program supaya optimal, para tenaga yayasan juga ditingkatkan kemampuannya melalui training tentang manajemen, kepemimpinan, *achievement motivation training*, teknik pendampingan kelompok swadaya masyarakat (TPKS), teknik pendampingan masyarakat (PTM), dan masukan-masukan dari dan diskusi dengan Divisi CSR PT RAPP. Mereka kemudian juga mentransformasikan kemampuan tersebut kepada para *field officer*. Tugas sesungguhnya dari *field officer* adalah memberikan dorongan motivasi kepada mitrabinaan untuk tetap menjaga semangat usaha/program, dan melakukan pemantauan tentang hambatan-hambatan yang mereka alami untuk dilaporkan kepada yayasan. Tugas pendampingan ini begitu penting untuk menjaga agar relasi dan ritme komunikasi masyarakat binaan dengan yayasan/perusahaan tetap terpelihara dengan baik. Untuk itu, para tenaga *field officer* mengunjungi mitrabinaan mereka setiap hari. Karena jumlah anggota mitra binaan pada setiap kelompok cukup banyak hingga mencapai maksimum 30 orang, maka kunjungan kepada setiap anggota diperkirakan setiap dua minggu. Inilah sesungguhnya yang menjadi *ultimate goal* program CSR/*Community Development* tersebut. Sementara itu, hal-hal yang berkenaan langsung dengan teknis

pengelolaan usaha ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang masing-masing, seperti tenaga ahli pertanian, peternakan, dsb.

Kebutuhan pihak eksternal dalam pelaksanaan *training* maupun pendampingan menuntut kesiapan *trainer* CECOM *Foundation* untuk terus menambah kompetensi keilmuan maupun jam terbang, baik dalam dilatih maupun melatih mitra dampingan. Oleh karena itu penambahan kapasitas *trainer* baru CECOM *Foundation* merupakan sebuah kegiatan penting yang harus dilaksanakan. Dari target pencetakan *trainer* baru di tahun 2008 sebanyak sepuluh orang, telah dilakukan perbanyakan jam terbang *trainer* sebanyak 6 orang.

Untuk implementasi *Capacity Building*, pada awal tahun ini CB bekerjasama dengan *UNICEF AI Project* Sumatera, CECOM melakukan *public awareness Avian Influenza*, terutama kepada keluarga mitrabinaannya. Pada tahap awal telah dilatih 60 orang *Field Officer* dan *Asisten Field Officer* tentang penanggulangan wabah flu burung ini. Di samping itu staf CECOM juga mendapatkan pelatihan tentang teknik evaluasi untuk evaluasi UMKM. CECOM juga telah mengikut sertakan 13 orang stafnya untuk mengikuti pelatihan *Emotional and Spiritual Quotient (ESQ)* profesional di Pekanbaru.



Gambar 23

Puluhan *Field Officer* CECOM mengikuti pelatihan tanggap flu burung di Gedung BPPUT PT RAPP Pangkalan Kerinci

Mengenai implementasi *Community Health Program*, orientasi program 2008 mengalami pergeseran, yaitu dari kuantitatif dan kuratif menjadi kualitatif - preventif. Program kualitatif-preventif diarahkan kepada desa-desa dampingan yaitu antara lain: sanitasi, kakus sehat, kesling, *extention program*.

Sementara itu program kuantitatif-kuratif dan rehabilitatif diarahkan kepada desa-desa di wilayah operasional PT RAPP yang baru. Dalam melaksanakan program kerjanya sebanyak mungkin melibatkan kerjasama dengan pihak terkait dan mendorong partisipasi masyarakat. Pengembangan partisipasi dalam Program Kesehatan Masyarakat dilakukan melalui kepemimpinan sosial dari kelompok tani mitrabinaan IFS. Pada dasarnya orientasi program yang diimplementasikan bersifat regular kuratif yang berorientasi kuantitatif, yaitu: *mobile clinic*, *minor operation*, imunisasi dan paket gizi.

Jenis layanan kesehatan yang diberikan meliputi pengobatan massal, sunatan massal, operasi katarak, imunisasi dan termasuk pemberian paket gizi. Pada tahun 2007, melalui *CECOM Foundation*, program ini telah dijalankan di lebih dari 100 desa yang tersebar di lima kabupaten yang merupakan daerah operasi PT RAPP. Sepanjang tahun 2007 pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PT RAPP tersebut telah melayani sekitar 25.000 pasien. Sementara itu untuk tahun 2008, sampai bulan Juni akumulasi jumlah pasien yang dilayani dalam bentuk pemberian pengobatan, paket gizi dan sunatan sebanyak 8.364 orang di 47 desa yang menjadi daerah operasional PT RAPP. Sedangkan untuk program kesehatan masyarakat yang bersifat *Promotive* dan *Preventive*, seperti: *extention program* dan sanitasi lingkungan (kakus) baru pada tahap persiapan sosial dan menyusun model yang rencananya diimplementasikan pada semester II tahun 2008.



Gambar 24

Pengobatan massal dan imunisasi, merupakan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PT RAPP melalui CECOM Foundation.



Gambar 25

Operasi katarak juga merupakan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PT RAPP melalui CECOM Foundation.

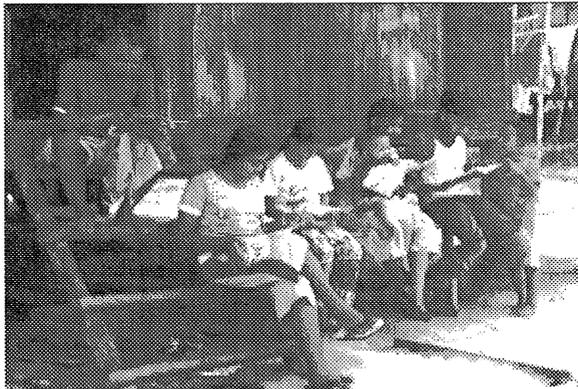
Dalam hal *education program*, implementasinya meliputi:

1. Program Taman Bacaan Kita (TB Kita)

PT RAPP terus mengembangkan Program Taman Bacaan guna meningkatkan kreativitas anak-anak yang ada di sejumlah kawasan operasional estate. Untuk tahap awal sudah dibangun sebanyak 100 taman bacaan yang tersebar di seluruh Riau. Setiap taman bacaan dilengkapi dengan 200 judul buku. Sampai saat ini telah terbentuk sebanyak 200 unit dari 300 unit yang direncanakan. Rata-rata anggota per TB Kita sebanyak 60 anak. Capaian ini masih rendah dikarenakan:

- (1) Belum optimalnya pola *marketing* dan rekrutmen “relawan”. Untuk memaksimalkan program pemberdayaan ini, PT RAPP merekrut relawan yang berasal dari guru atau pendidik.
- (2) Luasnya *covering area* (11 kab/kota) dibanding ketersediaan jumlah SDM yang ada.
- (3) Orientasi sumberdaya lebih diarahkan kepada revitalisasi TB Kita yang ada (status aktif 93%) serta kegiatan *book raising*. *Workshop* relawan TB Kita untuk wilayah Pelalawan dan Siak sudah dilaksanakan di bulan Pebruari 2008. Untuk wilayah Kuansing dilakukan di bulan Juni 2008. Salah satu *output*

workshop tersebut adalah terbentuknya Forum Komunikasi antar Relawan (LINKAR 1000 Buku). Saat ini para relawan telah melakukan gerakan *book raising* dan telah terkumpul buku sumbangan masyarakat mencapai 2.445 eksemplar.



Gambar 26

Warga masyarakat desa sedang menikmati bacaan koleksi perpustakaan “Taman Bacaan Kita” yang disediakan oleh CECOM Foundation.

Di tahun 2008 ini akan di *set-up* TB Kita di seluruh *Estate/Mill* Riaupulp. Realisasi sudah tiga *estate* (Baserah, Logas, Mandau). Untuk *Estate* yang lainnya sudah disosialisasikan, tinggal menunggu konfirmasi kesiapan dari *estate* untuk di *set-up* TB Kita.

2. Program Beasiswa bagi siswa SD sampai Mahasiswa

Adapun program yang dilakukan adalah beasiswa Talenta Riaupulp bagi para mahasiswa. Beasiswa ini diarahkan untuk menjangkau mahasiswa yang bertalenta dan potensial untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja PT RAPP sesuai jurusan yang dibutuhkan perusahaan. *Talent scouting* ini berjumlah 49 mahasiswa. Namun demikian perusahaan tidak hanya memberikan beasiswa semata, karena terhadap para mahasiswa tersebut ditindak-lanjuti dengan memberikan pelatihan agar mahasiswa yang bersangkutan memiliki tanggung jawab, termotivasi, mempunyai semangat yang tinggi yang

pada gilirannya membentuk satu perilaku yang positif. Dalam implementasinya PT RAPP bersama CECOM *Foundation* secara khusus menyelenggarakan *Motivation Training* di Hotel Furaya Pekanbaru dengan Tema *Training Personal Character Development Program (PCDP)* bagi 76 mahasiswa yang menerima beasiswa Talenta Riau. *Training* ini ditujukan untuk memberikan pembekalan berupa pengetahuan tentang *soft skill* agar mahasiswa memiliki sikap mental (*attitude*) yang baik. Sementara itu untuk program beasiswa SD – SMP – SMA tahun 2008 hingga saat ini telah finalisasi, menunggu konfirmasi jadwal penyerahan donasi dari CSR PT RAPP.

3. Demikian pula kontribusi honorarium untuk guru honorer telah finalisasi, menunggu konfirmasi jadwal penyerahan donasi dari CSR PT RAPP

Untuk *Community Based Business Development (CBBB)* PPMR (tahun 2003) menggunakan pendekatan Program Peternakan Sapi Potong melalui Program Penggemukan dan Budidaya Sapi. Dalam program ini dikembangkan 2.841 ekor untuk 1.114 Kepala Keluarga (KK). Selain itu juga dikembangkan program perikanan dalam dua jenis, budidaya kolam dan budidaya keramba. Pada tahun 2003, bibit ikan yang didistribusikan 102.500 ekor untuk 60 orang petani ikan.

Sejak dibentuknya *CECOM Foundation*, program implementasi berupa Gaduhan Ternak Sapi K2I hasil program kerjasama antara *CECOM Foundation* dengan Pemerintah Provinsi Riau. Dalam hal ini dilakukan kerjasama penggaduhan sapi untuk mitrabinaan *CECOM* sebanyak 500 ekor senilai Rp.3.000.000.000,- untuk 23 Poktan yang terdiri dari 126 Kepala Keluarga (KK) dan tersebar di 21 Desa dalam 6 Kabupaten. Sampai bulan Juni 2008 telah di realisasi sebanyak 165 ekor sapi. Untuk itu masih akan direalisasikan sebanyak 335 ekor sapi lagi. Sapi yang digaduhkan tersebut semuanya berasal dari Kabupaten Dompu, Propinsi NTB.

Adapun pendistribusiannya difokuskan kepada mitrabinaan CECOM *Foundation*, yakni sebagai berikut:

- (1) Pekanbaru 100 ekor untuk 25 KK
- (2) Kampar 100 ekor untuk 25 KK
- (3) Pelalawan 80 ekor untuk 20 KK
- (4) Kuansing 130 ekor untuk 33 KK
- (5) Siak 30 ekor untuk 8 KK
- (6) Rohul 60 ekor untuk 15 KK

▪ **Potensi pendapatan berkisar Rp.200.000.000,- – Rp.250.000.000,-**

Selain gaduhan ternak sapi atas kerjasama dengan Pemerintah daerah, PT RAPP juga menjalankan program gaduhan sendiri yang dilaksanakan oleh CECOM *Foundation*. Dalam hal ini sapi yang digaduhkan sebanyak 300 ekor dan didistribusikan di 13 kelompok tani dampingan, yang terdiri 82 Kepala Keluarga (KK) di 12 Desa. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- (1) Kel. Maju Sejahtera, desa Tapung, kabupaten Kampar 17 ekor 6 KK
- (2) Kel. Bina Usaha, desa Tanah Tinggi, kabupaten Kampar 32 ekor 8 KK
- (3) Kel. Awal Mandiri, desa Lb. Dalam, kabupaten Siak 20 ekor 5 KK
- (4) Kel. Perak Jaya, desa Perak Jaya (SP7), kabupaten Siak 45 ekor 15 KK
- (5) Kel. Jaya Makmur, desa Gb. Makmur, kabupaten Siak 32 ekor 8 KK
- (6) Kel. Lembu Mukti, desa Hangtuah, kabupaten Kampar 28 ekor 8 KK
- (7) Kel. Margo Mulyo, desa S. Kumbang, kabupaten Kampar 24 ekor 6 KK
- (8) Kel. Rizki Madiri, desa G. Sari, kabupaten Kampar 32 ekor 8 KK
- (9) Kel. Dayun Mandiri, desa Dayun, kabupaten Siak 20 ekor 5 KK
- (10) Kel. Barokah Rawang, desa Kao, kabupaten Siak 18 ekor 5 KK
- (11) Kel. Pancakarya, desa Maharatu, kabupaten Pku 6 ekor 2 KK
- (12) Kel. Mustang Jaya, desa Maharatu, kabupaten Pku 7 ekor 3 KK
- (13) Kel. Sari Tani, desa Kulim, kabupaten Pku 25 ekor 6 KK

▪ **Potensi Pendapatan berkisar Rp.100 – 120 juta**

Selain gaduhan sapi, untuk mendukung program penggemukan sapi, program *Community Development* PT RAPP juga

mengembangkan teknologi aplikatif mesin pencacah pelepah kelapa sawit untuk pakan ternak yang disebut mesin *Chooper*. Saat ini petani telah memesan 10 unit dan diperkirakan akan bertambah sesuai dengan kebutuhan mitrabinaan dan non mitra. Adapun mesin chopper untuk petani in terbagi dalam 2 tipe yakni:

- (1) *Chooper starter* @ Rp.17.500.000,-
- (2) *Chooper* engkol @ Rp.16.000.000,-

Dalam implementasi program *Community Based Business Development* (CBBDD) ini juga dikembangkan usaha madu. Untuk kepentingan bisnis, madu yang dihasilkan dimasukkan dalam kemasan sebagai berikut:

- (1) Kemasan Merk Foresbi (F270) dalam botol segi enam. Tahun ini sudah terjual sebanyak 1.044 botol
- (2) Kemasan Merk Foresbi (F250) dalam botol gepeng, terjual 607 botol
- (3) Madu curah olah, terjual 127 kg

▪ **Omset sampai bulan Juni Rp.53.000.000,-**

Bisnis lain yang dikembangkan adalah kemitraan budidaya semangka. Dalam hal ini dilakukan kerjasama penanaman semangka dengan mitrabinaan yang terdapat di dua desa, yaitu:

- (1) Desa Gabung Makmur dengan lahan seluas 1 hektar
- (2) Dusun Pangkalan Delik, dengan lahan seluas 1 hektar

Kerjasama ini dilakukan dengan pola bagi hasil (profit); 60% untuk mitra, 40% untuk CECOM *Foundation*.

Selain itu CECOM *Foundation* juga membangun kerjasama kemitraan pemasaran pupuk. Dalam hal ini CECOM *Foundation* bekerjasama dengan Kelompok Tani Suka Makmur untuk pemasaran pupuk kepada mitrabinaan di Marpoyan Pekanbaru. Seperti di atas kerjasamanya dengan pola bagi hasil (profit); 60% untuk mitra, 30% untuk CECOM *Foundation*, 10% untuk sosial.

Kerjasama lainnya adalah kemitraan budidaya ayam potong. Kerjasama budidaya ayam potong ini dilakukan dengan mitrabinaan

di desa Sp. Pongkai dengan kapasitas 10.000 ayam untuk 1 kandang. Pola bagi hasilnya (*profit*) adalah 60% mitra, 30% CECOM, 10% sosial.

Dalam konteks CSR PT RAPP juga memberikan peluang kepada para karyawan yang berasal dari warga Melayu Riau untuk membentuk wadah organisasi. Untuk itu telah terbentuk Ikatan Keluarga Melayu Riau (IKMR) RAPP. Dalam Visi dan Misinya organisasi ini memiliki tugas sebagai pelindung dan pengayom seluruh anggota di tanah Melayu yang berdaya guna, baik sebagai karyawan maupun dampak lingkungan yang berdekatan dengan perusahaan. Awalnya gagasan pembentukan IKMR RAPP ini berasal dari gagasan para karyawan senior PT RAPP yang merupakan putra Melayu, karena melihat kenyataan relatif banyak putra Melayu yang bekerja di PT RAPP namun banyak di antaranya yang tidak mengenal satu sama lain. Oleh karena itu pada tahun 1998 mereka mendirikan organisasi IKMR RAPP. Melalui pendirian organisasi IKMR RAPP, diketahui bahwa anggota warga putra Melayu cukup besar. Hal ini tampak jelas dari jumlah anggota IKMR RAPP yang sampai dengan tahun 2008 ini jumlahnya sudah mencapai 650 orang yang terdistribusi di 10 sektor PT RAPP.

Dalam konteks *Community Development* dapat dikatakan bahwa secara internal eksistensi organisasi IKMR RAPP ini menjadi wadah perjuangan bagi orang-orang Melayu yang bekerja di PT RAPP. Dengan kata lain organisasi ini secara implisit mampu mendorong memberdayakan masyarakat lokal dalam memperjuangkan dan memperoleh hak-haknya di perusahaan yang bersangkutan dalam kesetaraan. Sementara itu dalam konteks yang lebih eksternal, anggota organisasi ini merasa memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat dengan memfasilitasi penyelesaian masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat dengan perusahaan, dan atau sebaliknya. Organisasi IKMR RAPP melihat bahwa peran sebagai mediator tersebut sangat penting dan strategis karena dapat membantu pihak perusahaan sebagai tempat bekerja, dan tanah Melayu sebagai tempat operasional perusahaan. Dengan berperan

sebagai mediator bagi pihak perusahaan dan masyarakat bila terdapat persoalan di kedua belah pihak, maka organisasi ini dapat membantu mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak (*win-win solution*).

Nampaknya semangat *Community Development* baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam organisasi IKMR RAPP ini relatif berjalan baik. Sebagai ilustrasi, kondisi ini tampak ketika dilaksanakan *Muyawarah Besar IV* yang dilaksanakan bulan Maret 2008. Mereka melakukan berbagai kegiatan baik yang berimplikasi internal maupun eksternal seperti kegiatan budaya yang diikuti berbagai budaya lokal, pameran produk khas Riau, sunatan massal, berbalas pantun, dan seminar yang mendatangkan para tokoh masyarakat Riau yang berkompeten serta memiliki pengetahuan tentang perkembangan zaman yang penuh dengan dinamika, dengan narasumber mantan Rektor Universitas Riau.



Gambar 27
Anak-anak yang mengikuti sunatan massal,
yang diadakan oleh CD PT RAPP.

Pada tahun 2005 program *Community Development* yang diimplementasikan oleh PT RAPP sudah menjadi yang terbaik dibandingkan dengan berbagai perusahaan lain yang juga melaksanakan *Community Development* di propinsi Riau. Karena keberhasilan PT RAPP dalam mengembangkan CSR, maka mulai banyak yang mengundang manajer CSR PT RAPP untuk berbicara

soal CSR di berbagai forum, lokal dan internasional. Melalui interaksi dengan berbagai kalangan yang dilakukan di berbagai forum tersebut tentunya juga menguntungkan perusahaan karena secara tidak langsung membantu proses sosialisasi program CSR PT RAPP pada tataran nasional.

Secara politis, tampaknya kondisi tersebut juga telah mendapat pengakuan. Dikatakan demikian karena ternyata DPRD Riau menganggap penting melakukan *hearing* antara Komisi II DPRD Riau dengan pihak manajemen PT RAPP yang dilaksanakan pada Juli 2005. Dalam kesempatan *hearing* tersebut Ketua Komisi II DPRD bermaksud untuk menggali lebih dalam masalah program *Community Development* yang kabarnya terbaik. Pada kesempatan tersebut hadir pimpinan PT RAPP yakni Direktur RAPP, didampingi *General Social Security Licences*, PR Manager RAPP, PR Head *Foresry* dan pimpinan lainnya.¹⁴

Pengakuan sebagai pengelola *Community Development* terbaik juga dapat dikatakan telah diberikan oleh berbagai perusahaan lain. Cukup berhasilnya program CSR PT RAPP mengundang banyak perusahaan lain untuk mempelajarinya. Hal ini tampak dengan banyaknya perusahaan lain yang telah melakukan studi banding mengenai program *Community Development* ke PT RAPP. Sampai tahun 2005 saja sudah 74 perusahaan yang mencoba mempelajari program dan pola pelaksanaan *Community Development* PT RAPP untuk kemudian diadopsi dan dikembangkan di perusahaan yang melakukan studi tersebut.

Tidak hanya dalam skala domestik, keberhasilan program CSR yang dilakukan oleh PT RAPP juga sudah mendapat penghargaan dunia. Dalam kaitan ini Forum Asia untuk CSR memberikan penghargaan *Award Excellency Poverty Allevation* atau pengentasan kemiskinan pada tanggal 28 September 2007 di Ho Chi Minh City, Vietnam. Menurut Direktur CSR PT RAPP penghargaan internasional yang diterima PT RAPP ini merupakan hasil kerja

¹⁴ Lihat "Berita" online, 02 Mei 2005, <http://www.Riau.go.Id>.

perusahaan dalam menerapkan program CSR bersama masyarakat sejak tahun 1999. Perusahaan ini dinilai berhasil dalam mengimplementasikan program *Community Development* melalui pertanian terpadu, perikanan, dan peternakan.

BAB IV

ANALISIS

Deskripsi terdahulu pada Bab III memperlihatkan bahwa PT RAPP memiliki pemahaman yang jelas mengenai CSR dengan mengadopsi definisi CSR dari *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD). Implikasinya, PT RAPP telah memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui pelaksanaan program CSR/*Community Development*. Yang menarik adalah bahwa kesadaran tentang perlunya CSR tersebut justru datang dari *owner* yang sekaligus menjadi *Top Management*. Padahal, pada umumnya *owner* perusahaan bisnis hanya berorientasi pada *profit* semata. Adanya komitmen dari *owner* tersebut dapat diduga menjadi *push factor* yang sangat kuat bagi perusahaan untuk melakukan berbagai program CSR. Namun tampak bahwa sebenarnya semakin kuatnya komitmen perusahaan terhadap implementasi CSR juga disebabkan karena ada tuntutan/tekanan dari luar. Indikatornya sangat jelas yakni dengan melihat PT RAPP menjadi anggota WBCSD tentunya ada kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR sebagai persyaratan untuk diterima di WBCSD.

Selain itu mengingat pasar yang dipenetrasi produk PT RAPP ini adalah pasar internasional, dapat diduga ada tekanan dari dunia internasional agar PT RAPP menjalankan CSR. Dugaan ini muncul karena dewasa ini semakin menguat kesadaran internasional terhadap pentingnya perusahaan memperhatikan masalah kelestarian lingkungan. Sekarang ini semakin banyak *buyers* yang ingin membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kondisi sosial dan lingkungan di daerah operasionalnya. Sudah muncul kriteria bahwa untuk memasuki pasar-pasar tertentu disyaratkan bahwa perusahaan bersangkutan telah melakukan CSR. Oleh karena itu untuk dapat melakukan penetrasi pasar internasional, PT RAPP harus melaksanakan CSR, yang menandakan bahwa ia

concern dengan isu lingkungan. Bila dicermati lebih jauh, tampaknya CSR PT RAPP didasari dua landasan utama. *Pertama*, perusahaan ini bergerak di dalam bisnis yang berbasis SDA, memiliki jaringan luas, berhubungan dengan masyarakat yang sebagian besar tergolong miskin, tingkat pendidikan yang rendah, dan tingkat kesehatan yang rendah. *Kedua*, karena adanya tuntutan dunia yang semakin kuat terhadap perlunya memperhatikan lingkungan. Melihat realitas tersebut berarti sebenarnya CSR PT RAPP berevolusi sebagai hasil dinamika pergulatan kepentingan internal perusahaan dan eksternal baik dalam tataran nasional maupun global.

Namun yang perlu diapresiasi adalah bahwa pihak *owner* dan *Top Management* sangat responsif terhadap berbagai kepentingan yang terkait dengan CSR, sehingga mereka memasukkan CSR sebagai *business case*. Hal ini penting karena kesuksesan suatu program CSR pertama-tama akan sangat tergantung pada komitmen dan pemahaman *owner* dan *Top Management* tentang CSR. Dapat dikatakan bahwa *owner* dan *Top Management* PT RAPP memiliki motivasi yang kuat untuk membesarkan dan mensukseskan bisnis perusahaannya. Untuk itu, selain masalah yang terkait dengan produksi, PT RAPP harus memperhatikan kedua hal di atas sebagai landasan dilaksanakannya CSR. Dikatakan demikian, karena bila tidak melakukan CSR diprediksi akan timbul keresahan di kalangan masyarakat sekitar yang pada gilirannya dapat mengganggu operasi perusahaan. Selain itu akan timbul pula reaksi negatif dari pasar dunia yang tentu saja berimplikasi pada terganggunya keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, dengan adanya kesadaran tersebut dapat diduga bahwa PT RAPP sangat serius dengan program CSRnya dan akan tetap berupaya maksimal agar program CSR terus dijalankan.

Keseriusan PT RAPP dalam melaksanakan CSR dapat pula dilihat dari pengorganisasiannya. Secara organisasional untuk mengembangkan program CSR ini, PT RAPP sejak pendiriannya sudah membentuk sebuah direktorat sendiri dengan jumlah staf sekitar 100 orang. Hal ini dianggap penting dan mendesak (*urgent*) dengan konsiderasi bahwa masyarakat yang menjadi sasaran

CSR harus diberi pendampingan karena tanpa itu upaya pemberdayaan akan cenderung sia-sia. Oleh karena itu diperlukan organisasi yang lebih terfokus dalam menangani program CSR.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak main-main dengan komitmennya terhadap implementasi CSR. Deskripsi tersebut memperlihatkan bahwa konsep *Community Development* yang dikembangkan di PT RAPP sudah dijadikan fokus utama dalam aktivitas perusahaan. Tampaknya PT RAPP memandang bahwa program CSR yang dijalankan perusahaan bukan hanya sebagai pekerjaan karitas untuk membantu lingkungan sosial ala kadarnya untuk meredam keresahan sosial dari masyarakat sekitar, melainkan sudah bergerak lebih jauh menjadi investasi sosial yang dalam jangka panjang akan dapat meningkatkan baik citra maupun profitabilitas perusahaan. Sebagai contoh, dengan mengembangkan kegiatan yang sedapat mungkin terkait dengan *supply chain* perusahaan tentunya akan dapat menghasilkan efisiensi biaya yang signifikan dan lebih jauh dapat lebih menjamin kontinuitas supply yang dibutuhkan perusahaan. Penanganan program CSR secara terfokus diharapkan dapat menciptakan berbagai keberhasilan dalam upaya memberdayakan masyarakat di sekitar perusahaan. Melalui keberhasilan CSR ini diharapkan akan kondusif bagi keberlanjutan perusahaan sebagaimana diharapkan oleh pihak *owner* dan *Top Management* perusahaan.

Sejauh ini keberhasilan yang dicapai PT RAPP terealisasikan karena perusahaan ini bukan hanya melaksanakan program *Community Development* tetapi juga memberikan bimbingan terhadap masyarakat yang menerimanya, terutama dalam bentuk pembinaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Lebih dari itu, bagi masyarakat yang sudah berhasil pun masih tetap diberikan pelatihan. Keberhasilan perencanaan dan implementasi program *Community Development* yang bersifat menyeluruh tersebut tentunya sangat dimungkinkan mengingat setiap tahun PT RAPP menyiapkan dana yang relatif besar untuk program *Community Development* ini, yaitu kurang lebih mencapai Rp.34.000.000.000,-.

Namun prinsip inti yang dijadikan acuan untuk implementasi program *Community Development* bukan berapa besar dana yang disediakan dan didistribusikan, tapi bagaimana keberhasilannya dalam membina masyarakat. Kalau hanya memberikan uang tentunya tidak susah, tapi bagaimana dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk masyarakat secara efisien dan efektif. Bagi PT RAPP ukuran sukses dari program *Community Development* adalah semakin berkurangnya jumlah orang miskin. Jadi indikatornya adalah *reducing poverty* (pengurangan angka kemiskinan) dan meningkatkan jumlah binaan. Dengan demikian diharapkan dapat menghindari terjadi atau timbulnya konflik sosial. Oleh karena itu PT RAPP tidak melihat bahwa CSR merupakan bagian dari *public relations*, meskipun bila dikelola dengan baik akan menguntungkan bagi pencitraan perusahaan

Salah satu tugas Departemen CSR adalah menjadikan program CSR terintegrasi dengan departemen terkait, dan menempatkan CSR sebagai kebutuhan bagi semua pihak, melalui pendekatan partisipatif. Penugasan tersebut menegaskan bahwa PT RAPP memahami betul persyaratan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, yang salah satunya adalah dilakukannya koordinasi di antara berbagai bagian yang kegiatannya bersentuhan dengan masyarakat. Dengan menjadikan CSR sebagai kebutuhan bagi semua pihak dalam organisasi perusahaan adalah analog dengan pendapat dari *Group of experts on Community Development* dari PBB sebagaimana dikemukakan dalam kerangka konseptual bahwa *to improve the economic, social and cultural conditions of communities to integrate these communities into the life of the nation, and to enable them to contribute fully to national progress*. Cara ini secara tidak langsung dapat meningkatkan partisipasi dari departemen lainnya untuk membantu pelaksanaan program CSR yang menjadi tugas khusus dari Departemen CSR dan menjadikannya sebagai kewajiban dari perusahaan secara keseluruhan.

Keseriusan PT RAPP melaksanakan CSR semakin tampak dengan dibentuknya Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat (YPPM/CECOM *Foundation*) di luar PT RAPP pada tanggal 1 Juli

2005. Dengan dikembangkannya yayasan tersebut, maka memungkinkan untuk mengajak lebih banyak lagi pihak di luar Riaupulp untuk berpartisipasi melaksanakan kegiatan CSR ini, demi mengentaskan kemiskinan di Riau.¹ Pembentukan CECOM *Foundation* membawa implikasi bahwa lembaga ini dapat lebih bebas dan mandiri dalam penyusunan program, anggaran, sumber pendanaan, dan rekrutmen tenaga SDM sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. CECOM *Foundation* menjadi wadah yang ideal untuk lebih mengembangkan fungsi dan jangkauan tugas (*leveraging*) dalam memberikan layanan sumberdaya dukungan bagi masyarakat dampingan agar mereka mampu memberdayakan diri sendiri. Dengan demikian upaya pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara lebih efisien dan efektif. Dengan pijakan tersebut dapat dikatakan bahwa keberadaan CECOM *Foundation* merupakan bentuk totalitas perusahaan dalam membangun kepercayaan (*trust building*) kepada *stakeholders*-nya.

Hal menarik dan penting dalam pengorganisasian ini adalah adanya *field officer* pada CECOM *Foundation* sebagai tenaga *outsourcing* yang diambil dari masyarakat tempatan yang telah dibina dan memiliki kompetensi. Melakukan hal ini, merupakan hal yang sangat positif dalam konteks pemberdayaan. Dikatakan demikian karena secara konseptual, dalam *Community Development*, masyarakat yang bersangkutanlah yang harus memberdayakan dirinya sendiri. Sementara pihak perusahaan dan pihak luar hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu meningkatkan kemampuan masyarakat tempatan agar mampu memberdayakan dirinya, baik melalui peningkatan *knowledge*, *skill*, maupun dengan menyediakan fasilitas. Oleh karena itu, dengan adanya *field officer* dari masyarakat lokal tersebut dapat diharapkan, selain memudahkan akses komunikasi bagi perusahaan, pada gilirannya nanti ketika perusahaan

¹ Lihat Sinar Harapan, Kamis, 16 Maret 2006, "Kurangi Kemiskinan" dan hasil wawancara mendalam dengan Deputy CSR PT RAPP dan personal CECOM Oktober 2008.

sudah memandirikan mitrabinaannya, masyarakat tempatan (melalui *field officer*) dapat terus melanjutkan pemberdayaan dirinya sendiri.

Hal penting yang perlu diapresiasi dalam konteks pengorganisasian adalah bahwa proses pembentukan CECOM *Foundation* melibatkan berbagai *stakeholders*. Hal ini mengindikasikan bahwa CECOM *Foundation* dibentuk secara partisipatif, sehingga sangat mungkin bahwa program yang dikembangkan, yang tercermin dalam struktur organisasinya, merupakan hasil dari jaring aspirasi para *stakeholders*, termasuk masyarakat tempatan. Oleh karena itu tidak mengherankan bila program *Community Development*-nya mendapat respons yang positif dari masyarakat.

Keunggulan lain dengan dibentuknya CECOM *Foundation* adalah terbukanya peluang untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Terlepas apakah kerjasama tersebut berbentuk kerjasama program atau kerjasama pendanaan, yang jelas akan memberikan manfaat berupa efisiensi dan atau efektivitas baik bagi CECOM *Foundation* maupun PT RAPP. Dikatakan demikian karena dengan jumlah pendanaan yang tetap, melalui kerjasama dengan pihak luar tersebut dapat memperluas jangkauan program pemberdayaan, atau, bila programnya tidak diperluas, maka CECOM *Foundation* hanya mengeluarkan dana yang lebih kecil karena sebagian ditanggung oleh pihak luar, sehingga menjadi *profit* bagi CECOM *Foundation* yang diperlukan untuk membayar karyawannya. Sementara bagi PT RAPP kerjasama tersebut tidak merugikan, bahkan bila terjadi perluasan program pemberdayaan dapat dikatakan menguntungkan karena bagaimanapun posisi CECOM *Foundation* berada dalam koordinasi dan pengendalian dari Departemen CSR PT RAPP. Selain itu, masyarakat pun tahu bahwa CECOM *Foundation* adalah pelaksana program CSR dari PT RAPP, sehingga program yang diimplementasikan karena adanya kerjasama dengan pihak luar, tetap akan memberikan *image* positif dalam pencitraan perusahaan.

Dari sudut pandang *organization development* kondisi tersebut mengindikasikan bahwa PT RAPP selalu berupaya mencari format terbaik yang tepat untuk menjalankan program CSR/*Community Development* yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan aktual yang dihadapi. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa PT RAPP memiliki komitmen yang tinggi terhadap penyelenggaraan CSR/*Community Development* agar memberikan manfaat yang optimal baik untuk masyarakat tempatan maupun perusahaan itu sendiri. Hal ini juga menunjukkan bahwa PT RAPP cukup responsif terhadap tuntutan diselenggarakannya CSR/*Community Development*, baik dari masyarakat tempatan, LSM, pemerintah maupun dunia internasional.

Memang ada persoalan yang dihadapi oleh karyawan CECOM *Foundation* menyangkut kelangkaan dalam pekerjaannya, karena mereka sudah berada di luar PT RAPP. Meskipun sampai saat ini, khususnya untuk SDM yang semula merupakan karyawan PT RAPP, kesejahteraan mereka setara dengan kesejahteraan karyawan PT RAPP, namun mereka menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja lebih tinggi ketika perusahaan menghadapi kendala keuangan. Pada penghujung tahun 2008 ini PT RAPP menghadapi kesulitan keuangan seiring dengan penurunan produksi dan pemasaran bubur kertas dan kertas akibat krisis ekonomi dunia. Kondisi ini mulai berdampak dengan dilakukannya pengurangan terhadap jumlah anggaran program pemberdayaan yang belum direalisasikan tahun ini. Bila kondisi keuangan perusahaan semakin memburuk, bukan mustahil dilakukan pengurangan terhadap jumlah pegawai CECOM *Foundation*. Oleh karena itu, untuk mengeliminasi kemungkinan PHK, manajemen CECOM *Foundation* dituntut untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak luar yang menghasilkan *profit* untuk yayasan ini.

Dilihat dari manajemen perencanaan, dari deskripsi yang telah dikemukakan, tampak jelas bahwa baik Departemen CSR PT RAPP maupun CECOM *Foundation* memiliki konsep perencanaan yang tertata dengan baik. Dikatakan demikian karena perencanaan

programnya telah memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mengatur bahwa dalam penyusunan program harus mengikuti mekanisme Penetapan Program, Penentuan Anggaran, dan Pelaporan Kegiatan CSR. Dengan adanya mekanisme yang jelas maka akan memudahkan dalam melakukan monitoring dan pengawasan sebagai bentuk evaluasi program. Dalam mekanismenya, penyusunannya menggunakan pendekatan *bottom-up* dengan menampung usulan hasil musyawarah yang muncul dari masyarakat dan disampaikan kepada *estate manager*. Sementara perusahaan hanya berperan sebagai fasilitator saja. Dengan demikian pada dasarnya ada partisipasi aktif dari masyarakat di dalam memberdayakan dirinya. Hal ini penting karena pada akhirnya mereka harus terbiasa dengan kemandirian.

Sementara itu dengan menggunakan metode pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan *Participatory Rapid Rural Appraisal* (PRRA) dalam merancang program *Community Development*, dan seleksinya pun dilakukan melalui media lokakarya, maka diduga dapat menghasilkan satu usulan program yang betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat, tidak hanya berdasarkan keinginan masyarakat saja yang belum tentu menyentuh kebutuhan dasarnya. Dari hasil seleksi melalui lokakarya untuk melihat aspirasi dan kebutuhan masyarakat tersebut barulah dibuat *action plan* dengan fokus pada aspek *community empowerment*. Selain itu PT RAPP juga membuka peluang untuk menyusun program pemberdayaannya secara *top-down*. Hal ini tentunya sah-sah saja sejauh pendekatan ini tidak menjadi yang utama dalam menyusun program pemberdayaan. Dikatakan demikian karena bisa saja gagasan tersebut tidak terpikirkan kepentingannya oleh masyarakat, sementara perusahaan melihat bahwa program yang digagas substansial dalam upaya mengentaskan kemiskinan ataupun perubahan sikap masyarakat. Oleh karena itu perusahaan perlu membuat program tertentu dalam upaya memberdayakan masyarakat.

Proses tersebut di atas mengindikasikan bahwa dalam perencanaan program CSR/*Community Development*nya PT RAPP memperhatikan elemen dasar yang harus ada dalam konsep

pengembangan masyarakat, yakni adanya proses *bottom-up* yang asli, adanya instruktur yang terpercaya, dan koordinasi dengan badan lainnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelaksana CSR/ *Community Development* PT RAPP memiliki pemahaman yang ideal dan dioperasionalkan dalam prakteknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program CSR/ *Community Development* PT RAPP telah berjalan dalam proses dan arah yang benar (*on the right track*), sehingga sangat wajar bila CSR/ *Community Development* PT RAPP selama ini telah meraih berbagai penghargaan baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat, perencanaan program CSR/ *Community Development* PT RAPP diarahkan untuk mengubah dan mengembangkan kesadaran, cara dan arah berpikir, serta pola sikap hidup positif bagi komunitas yang mengikuti program pemberdayaan ini. Hal ini substansial karena PT RAPP ingin memberdayakan masyarakat dari yang semula marjinal menjadi masyarakat mandiri. Yang menjadi sasaran program adalah komunitas marjinal dalam masyarakat Riau yang berada di 9 kabupaten dan 2 kota, khususnya yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Hal ini membuktikan di dalam merencanakan programnya, CSR/ *Community Development* PT RAPP berada pada *track* yang benar sebagaimana yang diinginkan oleh konsep pemberdayaan, yaitu mengarah pada pemandirian masyarakat, tidak tergantung pada perusahaan. Dan untuk itu salah satu persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat adalah perubahan/pengembangan kesadaran, cara, pola pikir, dan pola sikap hidup positif dalam menghadapi perubahan dan tantangan ke depan agar mereka lebih mandiri dan memiliki pola yang lebih tertata.

Hal esensial dalam konteks perencanaan *Community Development* ini adalah bahwa di dalam perencanaannya CECOM *Foundation* telah merancang program *Community Development* yang berbasis kelompok, khususnya dalam pengembangan kelompok-kelompok tani mitrabinaan. Selain itu itu CECOM *Foundation* juga memiliki komunitas yang terdefiniskan secara jelas untuk

menentukan komunitas sasaran programnya yaitu komunitas marginal dalam masyarakat Riau yang berada di 9 kabupaten dan 2 kota, khususnya yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. CECOM *Foundation* membagi kelompok masyarakat dampingan ke dalam 5 tahap perkembangan kelompok. *Pertama*, kelompok *subsisten* yang merupakan kategori terbawah di dalam perkembangan kelompok. *Kedua*, kelompok *potensial* yang telah memiliki basis kelembagaan kelompok untuk mencapai kemandirian. *Ketiga*, kelompok *reliable*, yaitu kelompok yang dipercaya karena sudah membuktikan potensinya. Keempat, kelompok *credible*, yakni kelompok yang telah melewati tahapan kelompok sebelumnya dengan baik, dan kelima, kelompok *sustainable (self reliant)* yaitu kelompok yang sudah dapat mandiri.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Departemen CSR dan CECOM *Foundation* memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep *Community Development* yang antara lain mensyaratkan adanya kerjasama saling tolong menolong di antara anggota masyarakat sendiri. Kategorisasi kelompok tersebut mengindikasikan bahwa *Community Development /CSR PT RAPP* sudah memiliki desain yang jelas mengenai bagaimana pentahapan pemberdayaan kelompok yang dilakukannya dari mulai kelompok dasar sampai dengan kelompok mandiri. Hal ini juga tampak dari jenis bantuan permodalan yang diberikan kepada kelompok-kelompok tersebut yang berbeda satu sama lain tergantung dari kategori kelompoknya. Sebagai contoh, kelompok *subsisten* diberi bantuan dengan pola hibah. Sementara untuk kelompok-kelompok *reliable* yang sudah teruji mampu mengelola modal awal, diberikan pola *revolving*. Hal ini jelas menunjukkan bahwa program bantuannya sangat terancang dengan baik. Dikatakan demikian karena kelompok *subsisten* dalam realitasnya memang tidak memiliki kemampuan untuk meretas lingkaran ketidakberdayaan atau kemiskinan, sehingga tidak tepat bila bantuan yang diberikan merupakan bantuan kredit. Sementara untuk kelompok *reliable* yang sudah menunjukkan kemampuan dalam mengelola bantuan yang diberikan, maka perlu diberi bantuan dengan

pola *revolving* karena mereka harus mulai dibiasakan untuk memiliki tanggungjawab yang dibutuhkan pada saat pemandirian kelompok. Dengan adanya rancangan *Community Development* yang tertata tersebut, implikasinya program *Community Development* perusahaan ini sangat fokus dan terarah dengan baik, sehingga dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Selain memiliki program dan mekanisme perencanaan yang tertata, tampak jelas bahwa dalam implementasi program *Community Development*, PT RAPP juga melaksanakan monitoring dan evaluasi. Dari sudut pandang manajemen, dengan dilakukan monitoring terhadap program yang tengah dijalankan, maka jalannya proses program dapat dipantau. Dengan begitu, ketika suatu program mengalami hambatan ataupun menyimpang dari perencanaan yang sudah dibuat, maka dapat segera dicarikan solusinya atau dilakukan koreksi. Implikasinya tentu saja dapat menciptakan efisiensi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program karena jalannya program dapat tekontrol dengan baik.

Di samping melakukan monitoring, deskripsi terdahulu juga memperlihatkan bahwa Departemen CSR maupun *CECOM Foundation* kerap melakukan evaluasi terhadap program CSR/*Community Development*. Dari sisi pengelolaan program, tindakan evaluasi ini tentu saja sangat penting. Dikatakan demikian karena keberhasilan suatu program antara lain dapat diketahui ketika dilakukan evaluasi program. Hal ini menjadi lebih penting lagi karena pemberdayaan berarti menyangkut keberlanjutan program, sehingga capaian yang diperoleh pada tahun ini akan sangat bermanfaat untuk *input* bagi perencanaan program tahun berikutnya. Oleh karena itu kegiatan evaluasi program perlu dilakukan secara rutin di setiap akhir implementasi program karena hasil evaluasi ini akan berdampak baik pada perbaikan kualitas program maupun eksistensi dan keberlanjutan program di tahun berikutnya, mengacu pada pemahaman tersebut maka dapat dikatakan bahwa PT RAPP telah menerapkan fungsi manajemen program pemberdayaannya dengan baik.

Besarnya komitmen PT RAPP dalam melakukan CSR/*Community Development* dapat pula dilihat dari sistem anggaran (*budgeting*) dan besarnya anggaran (*budget*) yang dialokasikan untuk program CSR/*Community Development*. Terkait dengan hal ini, paparan di muka memperlihatkan bahwa penentuan anggaran CSR yang dialokasikan oleh PT RAPP tidak berdasarkan pada persentase dari pendapatan atau *profit* perusahaan, melainkan berdasarkan pada kebutuhan program. Kebijakan ini diambil pihak manajemen mengingat bahwa CSR di perusahaan ini sudah merupakan bagian dari bisnis, sehingga menjadi bagian dari *Total Quality Management* perusahaan. Oleh karena itu program CSR harus tetap dijalankan dalam kondisi apapun, tanpa dibatasi oleh keuntungan perusahaan. Sistem *budgeting* dan kebijakan seperti itu tentu saja sangat ideal untuk program pemberdayaan, karena seringkali program pemberdayaan yang dijalankan suatu perusahaan terputus di tengah jalan sebagai akibat tidak adanya komitmen dari perusahaan terhadap *Community Development*. Namun demikian dengan sistem *budgeting* seperti ini pun tetap ada risiko yang harus dihadapi, yakni ketika terjadi perubahan komitmen pada *owner* dan *Top Manajemen*. Dengan terjadinya perubahan tersebut sangat mungkin alokasi budget program *Community Development* menurun drastis, terutama ketika terjadi penurunan terhadap profit yang diperoleh perusahaan. Selain itu, dengan sistem *budgeting* semacam itu menjadi tidak ada acuan yang memberi sinyal tentang jumlah alokasi dana pemberdayaan yang akan diberikan pada tahun berikutnya karena kebijakannya cenderung sangat subyektif, tergantung dari *owner* dan atau *Top Management* perusahaan. Jadi dalam konteks kepastian alokasi anggaran program akan lebih baik bila ditentukan besaran persentase minimal dari *profit* yang diperoleh perusahaan pada tahun yang lalu. Selebihnya dari itu baru diserahkan kepada kebijakan *owner* ataupun *Top Management*.

Memang bila melihat *track* anggaran program CSR/*Community Development* dari tahun pertama hingga sekarang terjadi peningkatan yang signifikan setiap tahun. Seperti telah diungkapkan, anggaran dana yang dialokasikan untuk program

pemberdayaan tersebut pada tahun pertama mencapai sebesar Rp 5.000.000.000,- dan pada tahun 2008 anggaran yang dialokasikan telah mencapai lebih dari Rp.32.000.000.000,-. Namun hal tersebut sangat dipengaruhi oleh komitmen pihak *owner* dan *Top Management* PT RAPP serta keberlanjutan dan peningkatan perolehan *profit* yang selama ini dialami oleh perusahaan. Hal ini tampak jelas ketika di penghujung tahun 2008 terjadi gejolak ekonomi dunia yang menuju pada resesi ekonomi dunia dan berimbas pada penurunan produksi dan laba perusahaan, maka PT RAPP pun segera melakukan revisi terhadap alokasi anggaran program *CSR/Community Development* perusahaan dengan mengurangi dan atau membatalkan beberapa program *Community Development* yang diperkirakan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Melihat kondisi ini, maka ada baiknya sistem *budgeting* anggaran program *Community Development* minimal ditetapkan berdasarkan persentase profit dan dikombinasikan dengan sistem sekarang untuk penambahan jumlah anggarannya. Dengan demikian dapat lebih menjamin kepastian alokasi anggaran *CSR/Community Development* karena anggaran yang diberikan untuk program *CSR/Community Development* diambil dari persentase *profit* yang terealisasi pada tahun lalu.

Tingginya komitmen PT RAPP terhadap program *CSR/Community Development* dapat pula dilihat dari sejarah perkembangan CSR yang berkembang secara gradual. Ketika perusahaan masih dalam tahap pembangunan pabrik atau pada periode pertama organisasi CSR, *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diimplementasikan oleh PT RAPP bersifat *Corporate Giving* (karitas) dan bersifat insidental sehingga CSR lebih difungsikan untuk meredam keresahan masyarakat yang muncul di sekitar perusahaan melalui berbagai bantuan yang bersifat amal (*charity*). Selanjutnya pola *CSR/Community Development* berkembang menjadi bantuan kemanusiaan (*Corporate Philanthropy*) yang diarahkan untuk meningkatkan citra perusahaan (*corporate image*). Kemudian pada periode kedua pengorganisasian CSR (mulai tahun 1999), PT RAPP mengembangkan program CSR yang

diarahkan untuk *community empowerment* dalam bentuk *Community Development* atau pemberdayaan masyarakat. Pada periode tersebut perusahaan melihat program CSR sebagai investasi sosial yang dalam jangka panjang akan menguntungkan bagi perkembangan perusahaan.

Latar belakang perkembangan Program *Community Development* PT RAPP seperti diuraikan di atas menunjukkan bahwa implementasi program *Community Development*, sebagaimana yang dijalankan saat ini, tidak terjadi secara tiba-tiba, namun dikembangkan secara sistematis. Program *Community Development* tersebut berangkat dari bentuk yang paling sederhana dan pragmatis yang bertujuan semata-mata untuk menarik simpati masyarakat lokal. Tujuan sesungguhnya bukanlah untuk mengentaskan, apalagi memberdayakan masyarakat lokal, melainkan sebuah strategi bisnis untuk memungkinkan perusahaan beroperasi tanpa resistensi dari masyarakat. Dari perspektif dunia usaha, kebijakan ini tidak salah karena orientasi bisnis dan sasaran jangka pendek perusahaan pada awal berdiri adalah membangun landasan yang kukuh agar perusahaan tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Perkembangan perusahaan yang relatif cepat telah mendatangkan kesadaran baru bagi pihak manajemen, bahwa pencapaian yang diperoleh perusahaan berikaitan erat dengan kontribusi lingkungan dalam menyediakan bahan baku bagi operasi dan produksi, yang sejatinya merupakan bagian tak terpisahkan dari kepemilikan dan kepentingan masyarakat lokal. Dengan perkembangan kesadaran PT RAPP dalam menjalankan kewajiban sosialnya kepada masyarakat tersebut tentunya merupakan hal yang sangat positif. Melalui program *Community Development* yang bersifat *Community Empowerment* yang dilakukan perusahaan, secara tidak langsung terbangun kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan (*trust building*). Di antara kedua belah pihak terjalin hubungan yang bersifat simbiosis mutualistik dan harmonis karena saling menguntungkan antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya. Selanjutnya, dengan adanya *trust building* tersebut membuahkan hasil berupa penerimaan masyarakat (*social*

acceptance) terhadap eksistensi perusahaan. Dengan kata lain kegiatan *empowerment* yang dilakukan oleh PT RAPP telah menciptakan penguatan *social capital*.

Bila dicermati lebih jauh pada tataran implementasi, tampaknya CSR PT RAPP tidak identik dengan *Community Development*. Bahkan ada kecenderungan bahwa CSR berbeda dengan *Community Development*. Dalam hal ini program CSR lebih terarah pada bantuan yang cenderung bersifat karitas namun terfokus pada investasi sosial, seperti antara lain meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perbaikan lingkungan, dan sebagainya. Sementara *Community Development* lebih terarah pada pemberdayaan yang berimplikasi pada peningkatan ekonomi masyarakat atau pengentasan kemiskinan.

Tujuan utama program *Community Development* PT RAPP sebagaimana diinginkan oleh pemiliknya adalah untuk mengentaskan kemiskinan penduduk di sekitar wilayah operasi perusahaan. Perusahaan ini memiliki sejumlah *estate* seluas 10.000-20.000 hektar. Dalam Mekanisme Pengajuan Proposal/Program *Community Development*, setiap *estate* dapat mengajukan permohonan bantuan *Community Development* kepada Kantor Pusat (*Head Office*) di Pangkalan Kerinci sesuai kebutuhan berdasarkan masukan/musyawarah masyarakat dalam musrenbang. Dalam hal ini perusahaan berfungsi sebagai koordinator. Perusahaan akan menilai proposal yang diajukan dalam lokakarya yang diadakan sekali setahun selama tiga hari untuk memberi kesempatan kepada seluruh *estate manager* mempresentasikan usulan-usulan kegiatan. Lokakarya tersebut diikuti oleh Humas, *Top Manager*, dan para pakar yang diundang untuk memberikan penilaian. Program *Community Development* akan diprioritaskan kepada masyarakat yang tinggal di *estate* yang bersentuhan langsung dengan operasi perusahaan berdasarkan konsep *citizenship*, sementara masyarakat di luar wilayah operasi perusahaan juga menerima program *Community Development* berdasarkan prinsip *community*.

Proposal dari koordinator yang mewakili masyarakat di sekitar *estate* diajukan setahun sekali ke bagian Humas selambat-lambatnya akhir Oktober dan November untuk diproses/diseleksi, yang selanjutnya diteruskan ke *estate manager* untuk diseleksi lagi, dan akhirnya ke *Head Office*. Pada bulan Desember ditentukan jenis kegiatan maupun besaran anggarannya untuk dilaksanakan pada bulan Januari. Meskipun dominan berdasarkan usulan dari masyarakat, kegiatan *Community Development* juga bisa dilakukan berdasarkan kebijakan perusahaan (*head office*), terutama yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan khusus, seperti beasiswa ikatan dinas sebagai *selected project* terhadap siswa-siswa SMA, bazaar/pasar murah Ramadhan, dan kegiatan untuk menunjang aktivitas paguyuban karyawan berdasarkan suku bangsa/etnik di setiap departemen.

Perhatian PT RAPP terhadap masalah *human capital* masyarakat lokal menggambarkan konsistensi perhatiannya terhadap satu pilar dari tiga pilar utama dalam konsep pengembangan perusahaan, yaitu '*people*' atau masyarakat lokal. Penanganan terhadap persoalan ini dilakukan oleh perusahaan dalam pendekatan jangka panjang, yang diimplementasikan dalam program pendidikan melalui bantuan beasiswa. Dari dimensi filosofis dan idealisme, program CSR pendidikan PT RAPP ini menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan masyarakat lokal merupakan bagian dari upaya membangun pola pikir (*mindset*) ke depan yang konstruktif. Bagi perusahaan, hal ini merupakan satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan, sehingga tanggung jawab pembangunan daerah dan masyarakat Riau di masa depan akan berada di tangan putra daerah sendiri dan tidak selamanya bergantung kepada bantuan dari PT RAPP.

Implementasi program CSR melalui pemberian bantuan beasiswa dilakukan oleh PT RAPP dalam bentuk yang cukup progresif. Ini ditandai dengan bantuan beasiswa ikatan dinas bagi mahasiswa ATPK, sehingga mereka dapat langsung bekerja di perusahaan ini setelah menyelesaikan pendidikan. Meskipun dengan demikian PT RAPP memperoleh nilai tambah (*value added*) dari CSR

pendidikan dalam bentuk yang progresif seperti ini, pemberian bantuan beasiswa tersebut tidak dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

PT RAPP menyadari bahwa pembangunan SDM masyarakat lokal tidak cukup hanya dengan menyalurkan bantuan beasiswa. Karena itu, perusahaan juga memberikan bantuan fasilitas sebagai sarana yang menunjang keberhasilan pendidikan.

Besaran dan keragaman bantuan pendidikan yang diberikan PT RAPP dan ruang lingkungannya secara relatif cukup memadai. Meskipun demikian, bantuan CSR pendidikan itu tentu tidak dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan SDM dan pendidikan masyarakat lokal secara menyeluruh. Karena itu, peran PT RAPP adalah sebagai penggerak (*trigger*) pembangunan, yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat lokal dan pemerintah daerah.

Berbagai ilustrasi terdahulu memperlihatkan bahwa masalah lingkungan hidup menjadi salah satu bidang yang penting dalam program CSR PT RAPP, karena disadari bahwa lingkungan, baik langsung maupun tidak langsung, mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat dan kontinuitas aktivitas perusahaan. PT RAPP menyadari bahwa keberlangsungan suatu dunia usaha tidak terlepas dari aspek sosial kemasyarakatan dan kelestarian lingkungan. Sebagai contoh, dengan menjaga lingkungan yang bersih maka menjadi kondusif bagi kesehatan masyarakat sehingga mereka dapat beraktivitas dengan baik dan lebih produktif yang dibutuhkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi mereka. Dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat sekitar perusahaan tentunya juga kondusif bagi keberlangsungan operasi perusahaan karena, secara tidak langsung, perbaikan ekonomi masyarakat tersebut akan meminimalisasi gangguan masyarakat terhadap perusahaan yang pada gilirannya memperlancar operasi perusahaan. Selain itu program CSR di bidang lingkungan yang dilakukan perusahaan juga akan meningkatkan citra perusahaan yang pada gilirannya berdampak pada lebih diterimanya produk perusahaan itu di masyarakat. Perlu diingat

bahwa sekarang ini kesadaran konsumen akan pentingnya menjaga lingkungan sudah semakin tinggi sehingga mereka cenderung lebih memilih untuk membeli produk dari perusahaan yang ramah lingkungan, ketimbang sebaliknya. Karena itu perusahaan ini selalu berusaha meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat di sekitar operasional perusahaan.

PT RAPP juga melaksanakan program CSR yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan sebagai manifestasi dari perhatian terhadap pilar penting lainnya, yaitu *planet* atau lingkungan. Dalam mengimplementasikannya, perusahaan melihat bahwa pelestarian lingkungan tidak akan efektif jika dilakukan sendiri. Keterlibatan masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* yang juga mempunyai kepentingan dengan lingkungan, sangat dibutuhkan. Karena itulah perusahaan mengambil inisiatif untuk mendirikan Lembaga Konservasi Desa (LKD) sebagai suatu strategi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara perusahaan dan masyarakat. Selain membentuk LKD, perusahaan cukup jeli melihat keadaan dengan melakukan koordinasi dan mengajak FKKMR turut terlibat. Keterlibatan FKKMR dianggap penting karena perusahaan percaya bahwa efektifitas usaha pelestarian lingkungan akan mendatangkan hasil yang maksimal jika pihak lain yang mempunyai perhatian terhadap lingkungan juga dilibatkan.

Tidak semua CSR PT RAPP bersifat program tematik, seperti CSR pendidikan dan CSR lingkungan. Perusahaan ini juga mengakomodasi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebiasaan dan budaya mereka melalui kegiatan-kegiatan CSR karitas yang bersifat temporer dan pragmatis sebagaimana dinyatakan di atas. Antusiasme yang diberikan masyarakat dan pemerintah daerah membuktikan CSR karitas berhasil mendatangkan dua manfaat sekaligus kepada perusahaan, yaitu penunaian tanggung jawab sosial dan pendekatan diri dengan masyarakat. Penerimaan dan respon positif dari masyarakat menunjukkan bahwa program CSR karitas berkontribusi

secara signifikan terhadap eksistensi dan kontinuitas aktivitas perusahaan.

Program *Community Development* yang terfokus pada pengembangan MSME (*Micro, Small, and Medium Enterprises*) memperlihatkan bahwa PT RAPP memiliki visi yang jelas untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui pengembangan MSME ini perusahaan berupaya untuk mengaktualisasikan keinginannya bahwa *Community Development* yang diimplementasikan dapat membantu mengentaskan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat di sekitar daerah operasi PT RAPP. Untuk itu perusahaan memberikan bantuan yang relatif menyeluruh kepada mitrabinan, baik dalam kategori usaha pemula, mikro, kecil, maupun menengah. Bantuan tersebut meliputi pendampingan atau asistensi teknis, pelatihan usaha, konsultasi usaha, temu usaha, kemitraan usaha, dan juga penguatan modal usaha. Langkah PT RAPP dalam melakukan program *Community Development* yang menyeluruh tersebut tentu saja sangat kondusif untuk membangkitkan kemampuan kewirausahaan masyarakat karena aspek-aspek yang dibantu tersebut pada umumnya merupakan kelemahan masyarakat golongan ekonomi lemah. Namun demikian yang perlu digaris bawahi adalah harus ada target dan *time frame* yang jelas kapan bantuan itu mulai diberikan, bagaimana perkembangan usahanya dan kapan diperkirakan MSME tersebut dimandirikan. Hal ini penting untuk proses monitoring dan evaluasi keberhasilan program pemberdayaan yang dilakukan, dan untuk *feedback* terhadap perbaikan program di masa yang akan datang.

Bila dilihat dari implementasinya, tampak bahwa program *Community Development* MSME ini relatif berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya realisasi kredit program, di mana pada tahun 2008 saja sudah bertambah dengan 31 UKM dengan realisasi kredit program sebesar Rp.613.000.000,- . Di samping itu tingkat pengembalian kredit pun relatif baik yakni dengan NPL (*non performing loan*) 3,5 % dari toleransi maksimal sebesar 5%. Artinya MSME yang dikembangkan telah memiliki kemampuan yang

memadai dalam pengelolaan usahanya sehingga mereka secara ekonomi lebih berdaya.

Secara konseptual, perencanaan dan pelaksanaan program *Community Development* PT RAPP dalam bidang pengembangan usaha yang dikenal dengan sebutan Small and Medium Enterprises (SMEs) menggambarkan terobosan perusahaan dalam bidang ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Dari aspek ekonomi, program SMEs berpotensi kuat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal ke taraf yang lebih baik. Nilai pendapatan masyarakat lokal yang menjadi mitra binaan dalam program SMEs akan meningkat karena ada sumber pendapatan baru selain sumber pendapatan tetap dari sektor pertanian dan sektor informal lainnya. Dari aspek budaya, pengenalan program SMEs merupakan lompatan besar bagi masyarakat lokal di sekitar wilayah industri PT RAPP yang pada umumnya hidup sebagai petani dan pekerja/buruh lepas. Dengan program SMEs, mereka mulai merambah dan menekuni ranah penghidupan baru sebagai pengusaha meskipun identitas budaya sebagai petani tidak mereka tinggalkan begitu saja.

PT RAPP meluncurkan program SMEs tidak dengan terbuka begitu saja dan membiarkan masyarakat mencar-cari sendiri bentuk usaha yang sebaiknya mereka lakukan. Program SMEs dilakukan oleh perusahaan dengan perhitungan yang sangat cermat untuk mengantisipasi agar kemudian ia tidak menjadi kotraproduktif terhadap pola kehidupan ekonomi masyarakat. Karena itu, program SMEs dilakukan secara penuh dengan memberikan semua prasyarat yang diperlukan, seperti modal, bimbingan dan pelatihan usaha, dan pangsa pasar untuk menampung hasil usaha mereka, yaitu perusahaan itu sendiri sebagai konsumennya. Beragam usaha dan produk yang mereka hasilkan seperti dinyatakan di atas sepenuhnya merupakan pesanan dan kebutuhan perusahaan.

Paparan di atas menunjukkan bahwa dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dikenal dengan SMEs yang diluncurkan Departemen CSR PT RAPP, relatif berhasil. Hal ini tampak dari tingkat partisipasi masyarakat dalam usaha pembuatan

pallet yang semakin meningkat. Bila pada awal pengembangannya hanya ada tiga perusahaan yang mau terlibat dalam produksi pallet, sekarang telah ada 16 perusahaan yang terlibat dalam usaha ini. Keberhasilan tersebut juga diperlihatkan oleh relatif besarnya *income* yang dihasilkan dari usaha pallet ini yang di awal pengembangannya mencapai Rp.20.000.000,- per bulannya, sementara karyawannya digaji sekitar Rp1.500.000,-. Dan *income* yang baik itu pula yang menjadi *pull factor* bagi masyarakat yang lain untuk terjun dalam usaha pallet tersebut. Namun sayang sekarang usaha pembuatan pallet ini mengalami penurunan, di samping karena semakin banyaknya masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam usaha pembuatan pallet yang jumlah ordernya relatif konstan, sekarang ini PT RAPP juga mengalami stagnasi atau bahkan penurunan dalam bisnisnya seiring dengan terjadinya resesi ekonomi dunia.

Meskipun usaha SMEs tersebut mengalami penurunan, hal yang penting dalam program SMEs ini adalah bahwa PT RAPP telah membantu para pengusaha kecil dan menengah tersebut melalui pembinaan yang baik. Mereka diberikan pelatihan manajemen, cara pengadaan dan pemilihan bahan baku, teknik pembuatan pallet yang sesuai dengan persyaratan perusahaan, pengetahuan tentang jenis dan ukuran pallet, sistem pengiriman ke perusahaan, sistem penagihan dan pembayaran dan sebagainya. Dengan demikian sebenarnya mereka telah memiliki kompetensi dalam melakukan usaha. PT RAPP telah memperkuat kapasitas (*capacity building*) SMEs yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan dengan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan dalam mengelola usaha. Persoalannya adalah tinggal bagaimana agar mereka tidak menggantungkan diri pada bisnis pallet dari PT RAPP sehingga bisa melakukan ekspansi besar yang pada gilirannya dapat memandirikan mereka.

Yang menarik dari pendekatan ekonomi PT RAPP dalam program SMEs adalah pengenalan bentuk usaha baru kepada masyarakat tanpa menghilangkan sumber pencaharian utama mereka, sehingga tidak berdampak negatif dengan munculnya kejutan budaya

(*cultural shock*) sebagaimana umum terjadi pada setiap pengenalan program-program pemberdayaan masyarakat. Malahan, nilai pendapatan dari usaha ekonomi yang baru itu bisa melampaui nilai pendapatan dari sektor pertanian yang mereka tekuni selama ini. Program *Community Development* PT RAPP dalam bentuk program SMEs sejatinya tidak bermaksud untuk mengubah karakter dan budaya penghidupan asli masyarakat lokal. Program SMEs dimaksudkan oleh perusahaan untuk menganekaragamkan jenis usaha masyarakat dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan.

Hal lain yang penting dalam konteks *Community Development* adalah bahwa PT RAPP mensyaratkan perusahaan binaan ini mempekerjakan tenaga lokal. Dengan demikian pemberdayaan yang dilakukan perusahaan pada dasarnya tidak bersifat individual, melainkan pemberdayaan ekonomi komunitas lokal. Kondisi ini tentu saja sangat kondusif dalam mengakselerasi pemberdayaan masyarakat.

Masalah yang kurang kondusif dalam pemberdayaan SMEs ini adalah bahwa dalam konteks pengembangan SMEs tampaknya upaya pengembangan dan pembinaan usaha, lebih diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan perusahaan RAPP. Hal ini tampak jelas ketika pengembangan usaha dari masyarakat lokal dikaitkan dengan *supply chain* dari PT RAPP seperti usaha pembuatan pallet, usaha transportasi, *cleaning service*, *wood cutting*, dan sebagainya. Selain itu proses memperoleh pekerjaan pun tidak didasarkan pada proses profesional seperti melalui proses tender atau sistem seleksi yang ketat, melainkan berdasarkan proses penunjukan langsung. Implikasi dari perlakuan semacam ini tanpa disadari tentunya memasung pengembangan usaha dari SMEs tersebut. Selama ini mereka cenderung dimanjakan sehingga tidak memiliki kemampuan untuk berkompetisi dengan perusahaan SMEs lain untuk mendapatkan pekerjaan dari perusahaan besar di luar PT RAPP. Implikasi lainnya tentu menciptakan ketergantungan yang berlebihan dari SMEs terhadap PT RAPP yang pada gilirannya berpeluang menjadi bom waktu ketika

suatu saat perusahaan ini tidak lagi memberikan pekerjaan kepada SMEs tersebut.

Dalam rancangan program *Community Development*, PT RAPP membuat program yang relatif menyeluruh dalam arti mulai dari hulu berupa kegiatan produksi hingga ke hilir berupa kegiatan pemasarannya. Sebagai contoh dalam program *Community Development* pertanian maka selain memasok bahan dasar untuk proses penanaman atau produksi, termasuk di dalamnya pembinaan teknis dan pelatihan, terhadap hasil produksi pertanian maupun yang lainnya pun oleh RAPP sudah disiapkan pasarnya. Kegiatan yang dikerjakan di bidang lingkungan antara lain menyiapkan lahan tanpa bakar, mencegah kebakaran hutan, sertifikasi hutan tanaman lestari dan lain-lain. Kegiatan yang dikembangkan pun sedapat mungkin terkait dengan *supply chain* perusahaan, sehingga melibatkan banyak departemen lain di perusahaan.

Program *Community Development* IFS yang diluncurkan PT RAPP tampaknya relatif berhasil. Indikasinya, antara lain, tampak dari tingkat pengembalian pinjaman untuk program *soft loan* kepemilikan ternak plus kandang dan mesin *chopper* dari mitrabiinaan berjalan lancar dengan NPL 0%. Indikasi lainnya, keberhasilan IFS tersebut telah menuai hasil berupa semakin meningkat kepercayaan pihak ketiga kepada mitrabiinaan. Hal ini diperlihatkan dengan adanya dana Kemitraan dari PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) yang telah disalurkan kepada kelompok ini sebesar Rp.196.000.000,- juta untuk 21 Mitrabiinaan. Bahkan direncanakan pada tahun 2008 ini akan disalurkan lagi dana kemitraan PT PNM sebesar Rp.900.000.000,- dalam bentuk kredit lunak bagi mitrabiinaan. Indikasi lain diperlihatkan oleh Dinas Peternakan Propinsi Riau yang telah berkomitmen menyalurkan modal usaha penggaduhan sapi sebanyak 500 ekor untuk 126 KK atau setara dengan Rp.3.000.000.000,-. Selain itu, sampai saat ini jumlah sapi yang disalurkan dari program K2I sebanyak 165 ekor. Keberhasilan IFS ini telah menarik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *British Red Cross Society* (BRCS) yang dibentuk untuk membantu masyarakat

Aceh pasca tsunami melakukan studi banding ke PT RAPP. LSM tersebut mengajak 12 orang petani yang menjadi perwakilan dari 60 kelompok tani binaan BRCS di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk menambah pengetahuan dalam bidang *Integrated Farming System* (IFS).

Pemilihan ketiga bidang kegiatan dalam program IFS, yaitu peternakan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dan perikanan, tersebut tampaknya sudah diperhitungkan dengan cermat karena terbukti sesuai dengan keadaan lingkungan alam, keinginan masyarakat setempat, dan permintaan pasar. Masyarakat lokal, termasuk yang berstatus sebagai buruh lepas, sangat antusias dengan ketiga jenis program dalam IFS lantaran mereka sudah terbiasa dengan kehidupan sebagai petani dan peternak. Sejauh ini, kebutuhan bahan pangan masyarakat Riau masih dipasok dari daerah tetangga, yaitu Sumatera Barat. Meskipun program IFS tidak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara luas, kehadiran dan keberhasilan program *Community Development* PT RAPP ini sekurangnya-kurang mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan masyarakat di wilayah sekitarnya, khususnya kebutuhan akan daging sapi dan sayur-mayur.

Selain itu, program IFS berhasil mendatangkan nilai tambah (*value added*) karena satu jenis program dengan jenis yang lain saling berkait dalam siklus saling membutuhkan, sehingga biaya usaha menjadi kecil. Seperti dijelaskan di atas, sektor peternakan memberikan kontribusi pupuk kompos kepada sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura melalui kotoran hewan ternak, sementara sisa-sisa produksi pertanian dapat diolah kembali menjadi pakan ikan.

Masyarakat lokal sangat diuntungkan dengan program IFS. Selain sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan, masyarakat mitrabinaan yang menjadi pesertanya juga memperoleh pendampingan untuk memungkinkan mereka menjalankan program tersebut secara maksimal. Meskipun demikian, tidak semua mitrabinaan yang terlibat berhasil. Secara prinsip, kegagalan sebagian

mitrabinaan terletak bukan pada kesesuaian program melainkan pada diri yang bersangkutan karena tidak konsisten dan bersungguh-sungguh menjalankannya. Oleh karena itu, secara umum program IFS sebaiknya diteruskan oleh PT RAPP melalui CECOM *Foundation*, sementara kelemahan-kelemahan yang ada dijadikan pelajaran dan bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan.

Yang relatif kontradiktif, meskipun PT RAPP memiliki komitmen untuk maju dan berkembang bersama masyarakat, dan senantiasa berupaya menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan segenap komponen, baik dengan Pemerintah maupun masyarakat, namun nyatanya tetap saja masih terjadi konflik yang relatif besar dengan masyarakat yang berakhir dengan penyerangan yang dilakukan oleh pihak *security* RAPP terhadap masyarakat desa Gading permai di kecamatan Kampar Kiri Kab.kampar. Desa Gading Permai merupakan hasil pemekaran dari desa Mentulik Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang menjadi bagian dari wilayah PT RAPP yang telah menerima sertifikasi PHTL dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Bahkan menurut LSM Jikalauhari², “kekerasan seperti ini telah berulang kali dilakukan *security* RAPP dalam merespon konflik-konflik sosial dan agraria yang ada disekitar konsesi kebun kayu RAPP”. Untuk lebih jelasnya dapat disimak dari pernyataan sikap bersama dari masyarakat korban dan organisasi non-Pemerintah se Riau yang antara lain mendeskripsikan bahwa “Konflik tanah berawal dari proses penguasaan sepihak lahan masyarakat desa gading permai (ketika itu masih gabung dengan desa mentulik kecamatan langgam Kabupaten Pelalawan) oleh pemegang HPH PT. SIAK RAYA TIMBER (izin perpanjangan menhut no. 802/kpts-VI/1999, 30 juni 1999). Konflik semakin meruncing seiring dengan tuntutan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit. Sebenarnya masyarakat masih berharap supaya HPH PT SIAK RAYA TIMBER rela menyerahkan secara baik-baik ke masyarakat ketika izin konsesi

² Ahmad Zazali, www.jikalauhari.org

perusahaan habis, tetapi jauh dari harapan masyarakat ternyata pada tanggal 30 juni 1999, Menteri Kehutanan justru memberikan izin perpanjangan. Parahnya lagi, pada tahun 2002 dengan tanpa sepengetahuan masyarakat HPH PT SIAK RAYA TIMBER melimpahkan lahannya ke PT RAPP untuk dikonversi menjadi kebun kayu akasia (HTI).

Sejak dikuasai PT RAPP situasi di lapangan menjadi semakin memanas, *security* RAPP dibawah manajemen SGI mulai sering melakukan aksi-aksi untuk menakuti masyarakat supaya meninggalkan lahan yang eksistingnya telah ditanami oleh KELOMPOK USAHA TANI GADING PERMAI menjadi perkebunan Kelapa sawit dengan sistem bapak angkat dengan seorang pengusaha bernama AYAU. Luas yang sudah ditanami masyarakat mencapai 200 hektar dari 2000 hektar total lahan masyarakat diklaim RAPP. Di saat bersamaan RAPP juga sedang melakukan pembersihan lahan untuk ditanami kayu akasia, dan pada 27 Februari 2006 pihak RAPP melaporkan ketua kelompok tani, HAJI USMAN MAUN dan AYAU ke Polres Kampar dengan tuduhan memelopori pembangunan kebun sawit secara illegal. Kemudian pada tanggal 13 April 2006 keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Kampar.

Pada tanggal 1 Mei 2006 lalu, terjadi insiden yang tak terelakkan. RAPP mengerahkan ratusan securitynya untuk mengusir masyarakat dengan cara menyerang, memukul dan merusak 1 mushola dan 20 pintu rumah bedeng kemudian membakarnya. Masyarakat yang mencoba melawan ditangkap dan bajunya dibuka serta disepak. Padahal sesuai dengan janji dari karyawan RAPP bernama Jhon Kenedy, Daulay dan Diky pada hari-hari sebelumnya, pada tanggal 1 mei itu akan diadakan musyawarah dengan masyarakat.

Dari kejadian ini, masyarakat harus menanggung kerugian materil dan kehilangan tempat tinggal, karena yang mampu diselamatkan dari kobaran api hanya pakaian di badan. Perlengkapan rumah tangga, pakaian, uang, emas milik masyarakat sebagian besar

hangus dilalap api, serta perlengkapan mushola seperti toa, karpet dan Al Quran. Bisa disimpulkan bahwa penyerangan dan amuk security RAPP ini merupakan tindakan yang sudah terencana, karena di saat penyerangan dilakukan pihak RAPP telah menyediakan Ambulance untuk mengantisipasi jatuhnya korban.”³

Mengingat beberapa kali kekerasan yang telah dilakukan oleh PT RAPP terhadap masyarakat petani Riau maka tidak heran bila masyarakat LSM tersebut beranggapan bahwa program *Community Development* yang dilakukan oleh perusahaan ini lebih ditujukan untuk membangun citra baik RAPP ketimbang mensejahterakan masyarakat. Upaya tersebut “tidak lebih dari sebuah upaya untuk menutupi kebobrokan dan kekejaman terhadap rakyat Riau yang masih tetap dipeliharanya hingga saat ini. Sebut saja peristiwa balam merah tahun 2001, peristiwa penyerangan di Desa Koto Baru tahun 2005, dan terakhir yang tak kalah kejamnya peristiwa penyerangan dan amuk oleh *security* RAPP “bersebo” terhadap masyarakat petani desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar pada Senin, 1 Mei 2006”.

³ lihat di www.jikalahari.org. ; Direktur eksekutif Walhi Riau; Koordinator JIKALAHARI; Direktur HAKIKI; Koordinator AMAR; Direktur Yayasan Elang; Direktur Kaliptra; Direktur KBH Riau; Direktur LKHD; Direktur LALH; Koordinator Yayasan BALI; KAR; Direktur LBH Pekanbaru; Ketua Persyarikatan Rakyat Riau; Pjs. Direktur Riau Mandiri; (9 Mei 2006); PERNYATAAN SIKAP BERSAMA MASYARKAT KORBAN DAN ORGANISASI NON PEMERINTAH SE-RIAU ATAS PENYERANGAN DAN AMUK SECURITY PT.RAPP TERHADAP PETANI DESA GADING PERMAI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU, Pekanbaru.

BAB V

KESIMPULAN

Areal HTI PT RAPP menghadapi beberapa persoalan yang terkait dengan pelanggaran terhadap:

- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/KPTS-II/2001 tentang kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi.
- b. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Penjelasan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, pasal 28

Dalam operasinya PT RAPP memperhatikan pelestarian lingkungan yang ditandai dengan diraihnya ISO 14001. Selain itu dalam proses produksinya menggunakan teknologi tinggi untuk meminimalisasi dampak lingkungan sesuai dengan standar nasional dan internasional. Membuat sustainability report dengan kerangka acuan Global Reporting Initiative (GRI).

Meskipun begitu, dan sering dibantah oleh PT RAPP, namun masih banyak dugaan dari masyarakat LSM yang mencurigai bahwa PT RAPP dalam memenuhi kebutuhan bahan bakunya memanfaatkan kayu hasil illegal logging sehingga mengorbankan kelestarian lingkungan.

Jauh sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perusahaan melaksanakan *Community Development*, PT RAPP telah lebih dulu melaksanakan program sosial kemasyarakatan dalam koridor

Corporate Social Responsibility (CSR) sejak perusahaan berdiri pada tahun 1992. Program CSR ini dilaksanakan atas kesadaran dan kemauan manajemen dan atau pemiliknya yang menempatkan masyarakat sebagai bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan aktivitas perusahaan. PT RAPP menganggap program CSR makin penting seiring dengan tuntutan dunia industri mensyaratkan perusahaan industri memperhatikan aspek lingkungan di mana perusahaan beroperasi, melalui program CSR, agar hasil produksi dapat memasuki pasar dalam maupun luar negeri.

Pada tahap pertama pengorganisasian CSR yang berlangsung dari tahun 1992 hingga tahun 1998, program CSR dilaksanakan secara sederhana dalam bentuk karitas (amal) dan kedermawanan (*philanthropy*) dengan maksud untuk membangun citra perusahaan dan mengatasi resistensi dari masyarakat. Kegiatan CSR dalam bentuk program *Community Development* baru dilaksanakan pada tahap kedua tahun 1999 dengan tujuan selain untuk memberdayakan masyarakat lokal juga untuk membangun kepercayaan (*trust building*) dan penerimaan (*social acceptance*) masyarakat terhadap perusahaan. CSR dalam bentuk yang baru ini mengakibatkan terciptanya penguatan modal sosial dalam masyarakat. Perkembangan ini menunjukkan tingginya kesungguhan PT RAPP dalam melaksanakan CSR sebagai bagian dari bisnis perusahaan sehingga termasuk dalam *total quality management*, yang pelaksanaannya dilakukan oleh sebuah departemen tersendiri.

CSR PT RAPP didasari 2 landasan utama. *Pertama*, perusahaan ini bergerak di dalam bisnis yang berbasis SDA, memiliki jaringan luas, berhubungan dengan masyarakat yang sebagian besar tergolong miskin, tingkat pendidikan yang rendah, dan tingkat kesehatan yang rendah. *Kedua*, karena adanya tuntutan dunia yang semakin kuat terhadap perlunya memperhatikan lingkungan. Jadi CSR PT RAPP berevolusi sebagai hasil dinamika pergulatan kepentingan internal perusahaan dan eksternal baik dalam tataran nasional maupun global. Namun yang perlu diapresiasi adalah bahwa pihak *owner* dan *top management* sangat responsif terhadap berbagai

kepentingan yang terkait dengan CSR, sehingga mereka memasukkan CSR sebagai *business case*.

Kesungguhan PT RAPP semakin jelas dengan pembentukan Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) yang populer dengan sebutan *CECOM Foundation*. Melalui yayasan ini, penyusunan program pemberdayaan masyarakat, anggaran, sumber pendanaan, dan rekrutmen pengelolanya dapat dilakukan dengan leluasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pembentukan yayasan ini terbuka peluang untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pemberdayaan masyarakat secara maksimal.

Selain itu, yayasan juga memiliki konsep perencanaan yang tertata dengan baik sesuai *Standard Operating Procedure (SOP)* yang di dalamnya diatur mekanisme penetapan program, penentuan anggaran, dan pelaporan kegiatan *Community Development*. Mekanisme tersebut mensyaratkan usulan program yang disampaikan kepada *estate manager* dilakukan menggunakan pendekatan berdasarkan usulan dari masyarakat (*bottom-up*), sementara program *Community Development* dirancang untuk diterapkan oleh kelompok menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal (PRA)* dan pendekatan *Participatory Rapid Rural Appraisal (PRRA)*. Program *Community Development* yang sudah dirancang tersebut diseleksi melalui media lokakarya untuk menghasilkan program *Community Development* yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mengubah dan mengembangkan kesadaran, cara berpikir, dan sikap hidup positif mereka agar menjadi masyarakat yang mandiri. Untuk mencapai kemandirian tersebut, *CECOM Foundation* membentuk program yang disesuaikan dengan 5 tahapan kelompok yaitu : kelompok *subsisten*, kelompok *potensial*, kelompok *reliable*, kelompok *credible*, dan kelompok *sustainable (self reliant)*. Guna memperoleh hasil yang efektif dan efisien, yayasan juga melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan program yang dibangun atas dasar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan implementasinya.

Dalam implementasi, PT RAPP telah menyusun program-program *Community Development* yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal. Program-program pemberdayaan tersebut meliputi program pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM/MSME = *Micro, Small, and Medium Enterprises*) yang bertujuan untuk menumbuhkan wirausahawan yang siap mandiri dengan cara meningkatkan kemampuan mereka dalam aspek manajerial dan akses pembiayaan usaha; Program Kemitraan yang dikenal sebagai SMEs (*Small and Medium Enterprises*) yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan dan kemandirian mitrabinaan; Program Sistem Pertanian Terpadu atau *Integrated Farming System (IFS)* yang mengintegrasikan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan Perikanan dalam satu paket program untuk menambah sumber nafkah/pendapatan (*secondary income*) agar taraf kehidupan (*Livelihood*) mitrabinaan meningkat; *Training Development and Capacity Building Program* untuk meningkatkan kualitas pendamping program maupun kelompok mitrabinaan; *Community Based Business Development Program (CBBDD)* untuk pengembangan peluang-peluang usaha yang dapat memperkuat posisi tawar (*bergaining position*) mitrabinaan yang sudah mandiri (*self reliant*) dalam menjalankan usahanya; *Education Program* untuk mendorong *collaborative Action* melalui *Volunteerism and Partnership Program*; *Community Health Program* untuk penguatan kapasitas kader kesehatan desa dan pemberian layanan kesehatan gratis untuk masyarakat miskin; *Social Infrastructure Program* yang bersifat pengembangan dalam bidang pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana sosial yang ada di tengah masyarakat; dan *Campus and NGO Relation* untuk mengembangkan pendidikan.

Terhadap aktivitas CSR/*Community Development* PT RAPP, secara umum respon masyarakat terhadap program yang diluncurkan cukup positif. Masyarakat lokal, terutama yang menjadi sasaran program *Community Development* memberikan penilaian yang cukup positif terhadap program *Community Development* perusahaan. Tanggapan positif mereka berikan terhadap semua program

Community Development, termasuk program beasiswa. Banyak masyarakat yang ingin terlibat sebagai kelompok sasaran dan diterima oleh perusahaan menjadi mitra binaannya. Namun demikian tidak semua berhasil karena berkaitan erat dengan karakter masyarakat yang cenderung ingin cepat senang tanpa usaha dan kerja keras.

Program bantuan beasiswa mendapat sambutan yang sangat positif baik dari masyarakat maupun dari Pemerintah daerah, karena persoalan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, baik Pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pemerintah daerah Riau merasa sangat terbantu dalam upayanya memajukan pendidikan di Riau, Mereka mengharapkan bahwa bantuan ini dapat diberikan secara berkesinambungan dan kalau mungkin semakin ditingkatkan di masa yang akan datang. Dengan demikian masyarakat yang relatif terpendil yang secara ekonomi tidak beruntung pun memiliki harapan dapat menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi.

Masyarakat nampak puas dengan program penggemukan sapi, karena harga jualnya relatif cukup tinggi. Sapi-sapi tersebut biasanya dijual untuk memenuhi kebutuhan lokal, seperti untuk hari raya qurban. Hasil kegiatan pertanian, seperti sayuran, dapat mereka salurkan ke pasar-pasar dan hotel-hotel atas rekomendasi perusahaan. Khusus untuk produksi madu, perusahaan yang maju ke supermarket yang ada, karena mereka belum bisa dan belum tentu dapat diterima oleh manajemen supermarket.

Meskipun demikian, masih terdapat persoalan dalam interaksi antara PT RAPP dengan masyarakat sekitar terkait dengan penggunaan tanah ulayat yang melebihi kesepakatan dan biaya pancung alas yang tidak dibayarkan, serta tuntutan masyarakat untuk mendapatkan CSR. Sekurang-kurangnya pernah terjadi satu dua kasus unjuk rasa disebabkan konflik masyarakat dengan perusahaan tentang status tanah atau lahan milik perusahaan yang telah dibeli dari masyarakat, tetapi diklaim kembali oleh ahli warisnya setelah orangtua mereka yang menjualnya meninggal. Akan tetapi pada umumnya masyarakat bersikap objektif dalam menyikapi konflik tersebut, dengan memberi penyadaran kepada mereka yang terlibat agar melihat masalah secara

jernih dan menyelesaikannya dengan bijaksana. Dalam hal ini, perusahaan cenderung memenuhi tuntutan mereka dengan tujuan agar konflik tidak meruncing.

Sementara itu respon masyarakat luar terhadap program *Community Development* PT RAPP juga positif. Dunia luar mengenal PT RAPP justru karena program CSR-nya, bukan PT RAPP sebagai produsen bubur kertas dan kertas. Keingin-tahuan dunia luar terhadap perkembangan program dan implementasi *Community Development*, termasuk lingkungan, semakin tinggi melebihi dari aktivitas bisnis perusahaan seperti produksi, harga kertas, dsb.

Mengenai peranan Pemerintah Daerah dan kalangan LSM dalam keikutsertaannya dalam perencanaan dan pelaksanaan *Community Development* yang dilakukan oleh perusahaan, pihak perusahaan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan identifikasi potensi dan permasalahan wilayah, menetapkan komoditi yang cocok di daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan, dan menyusun program bersama. Sementara itu LSM dilibatkan dalam lokakarya penyusunan perencanaan program yang dijadikan basis penilaian tentang kelayakan program pemberdayaan yang akan dilakukan PT RAPP. Perusahaan melalui *CECOM Foundation* juga menerima kerjasama dengan pihak lain, seperti adanya bantuan 500 ekor sapi dari Dinas Peternakan Provinsi Riau kepada masyarakat yang diberikan melalui *CECOM Foundation*.

PT RAPP selalu berupaya mencari format terbaik yang tepat untuk menjalankan program CSR/*Community Development* yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan aktual yang dihadapi. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa PT RAPP memiliki komitmen yang tinggi terhadap penyelenggaraan CSR/*Community Development* agar memberikan manfaat yang optimal baik untuk masyarakat tempatan maupun perusahaan itu sendiri. Hal ini juga menunjukkan bahwa PT RAPP cukup responsif terhadap tuntutan diselenggarakannya CSR/*Community Development*, baik dari masyarakat tempatan, LSM, Pemerintah maupun dunia internasional.

Ada 5 elemen penting yang sangat kondusif yang mendukung kesuksesan dari *Community Development* yang dilakukan PT RAPP, yakni :

- (1) Adanya komitmen dari *owner* untuk melakukan CSR dan atau *Community Development* yang maksimal
- (2) Dimilikinya konsep, metodologi, dan pola pemberdayaan yang benar
- (3) Dimilikinya otoritas penuh oleh *CECOM Foundation* untuk merencanakan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat
- (4) Dilakukannya *empowerment* terhadap personal *CECOM Foundation* melalui upaya peningkatan kapasitas (*capacity building*), studi banding dan sebagainya
- (5) Dukungan *budget* yang memadai untuk menyusun program pemberdayaan yang relatif idealis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrizas Asdrizas, 16 Juli 2007, Riau Online, Pekanbaru.
- Atlas Indonesia dan Dunia*, CV Pusaka Agung Harapan, Surabaya
- Alfred, Chandler (1962). *Strategy and Structure*, Cambridge MIT Press.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, (2006), *Pendataan Penduduk/Keluarga Miskin 2005*.
- Beauchamp, Tom L. & Norman E. Bowie, editor (1997). *Ethical Theory and Business*, Fifth Edition, Prentice Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey.
- Berita" online, 02 Mei 2005, <http://www.Riau.go.Id>
- BPS, (2006), *Riau Dalam Angka*, Bapeda Provinsi Riau.
- BPS, (2007), *Riau Dalam Angka*, Bapeda Provinsi Riau.
- , 2006, *Pendapatan Regional Riau Menurut Lapangan Usaha 2001-2005*.
- Buletin Alam Sumatera, Vol. I No. 4, hal. 10.
- Cavanagh, John and Sarah Anderson (1999). *Field Guide to the Global Economy*, New York: New Press.
- Coleman, James (1988). "Social Capital in the Creation of Human Capital", *American Journal of Sociology*, Vol. 94.
- Craig, G. dan M. Mayo (ed.) (1995). *Community Empowerment: A Reader in Participation and Development*, London: Zed Books.
- Departemen Sosial RI, (2000), *Pemetaan Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha*, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- Edmonton Alberta (1999). *Community Development Brochure*.
- Eaton, Joseph W (ed.) (1986), *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional: Dari Konsep ke Aplikasi*,

Diterjemahkan oleh Pandam Guritno dan Aldi Jeni, UI Press, Jakarta.

FWI, (2004), *Peta HTI & Kawasan Konservasi*, Dishut Provinsi Riau, 2003.

Fulmer, Robert M. (1988). *The New Management*, Fourth Edition, Macmillan Publishing Company, USA.

Greenomics, (2008), *RAPP Kelebihan Bahan Baku*, Jakarta, Antara 25/3.

Hay, Robert and Ed Gray (March 1974). "Social Responsibilities of Business Managers," *Academy of Management Journal*.

Jikalahari, 15 Januari 2007, *Tanggapan Sertifikasi Bertahap Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari PT RAPP Sektor Pelalawan di Kabupaten Pelalawan dan Siak Propinsi Riau*, PHTL RAPP Pelalawan.

Jikalahari, *RTRWP & Masa Depan Hutan Alam Riau: Sebuah Masukan dan Bahan Pertimbangan Untuk Revisi Perda No. 10 Tahun 1994 Tentang RTRWP Riau*, Hal 7, www.jikalahari.org.

Kretzmann, J. and McKnight, J (1993). *Building Communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*, Chicago. IL: ACTA Publishers.

Khisna, Anirudh, dan Elizabeth Shrader (1999). "Social Capital Assessment Tool", Makalah yang dibawakan pada "Conference on Social Capital and Poverty Reduction", The World Bank, Washington, D.C., 22-24 Juni, 1999.

Media Indonesia, 4 April 2003.

Nadj, Shobirin (2002). "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Konteks Otonomi Daerah", Makalah dalam *Workshop Otonomi Daerah dan Akuntabilitas Publik dalam Perspektif Lokal*, Kedeputan Ilmu Pengetahuan Sosial Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK-LIPI), Jakarta, 20 Agustus 2002.

- Peter, T. dan Waterman (1982), *In Search of Excellence*, Harper and Row, New York.
- Purnama, Johan dan Handalan Saifulah, (2008), *Evaluasi Partisipatif Pemberdayaan Kelompok Tani dengan Vectorial Analysis*, CECOM Foundation, Riau, Indonesia.
- RiauInfo, (2008), *Riaupulp Ajak LKD Olak dan Segati Study Banding Kearifan Lokal*, edisi 20 Aug, Pekanbaru.
- RiauInfo, 04 Sep 2008 15:05 wib, *LKD Segati Lakukan Penghijauan di Areal Konservasi Riaupulp Sektor Langgam*, Pekanbaru.
- RiauInfo, 2 September 2008, Riaupulp Estate Mandau Gelar “Green Edu” untuk Siswa SD dan SMP, Pekanbaru.
- Riau Terkini, 2007, RAPP dan IKPP Bantah Terlibat Illog, 26 November.
- Situs Portal Resmi Yayasan Satu Dunia, Juli 2008, *Pencabutan/Pembekuan Ijin Konsesi HTI RAPP Dan Tangkap Para Pejabat Yang Terlibat Illegal Logging Di Riau*, Siaran Pers Illegal Logging Watch, Jakarta.
- Subardja, Achmad Dj, Ir. dkk. (2004), *Akuntabilitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup*, Riset Kompetitif Pengembangan IPTEK, LIPI, Jakarta.
- Sutikno dan Maryunani (2006), *”Ekonomi Sumber Daya Alam”*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- Tahajuddin, Ujud. dkk, (2003), *Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Dalam Implementasi Otonomi Daerah : Peluang, Kendala dan Implikasi*, Pengembangan Riset Kompetitif Program Isu, LIPI, Jakarta.
- Tahajuddin, Ujud, et al (2005), *”Community Development Industri Petrokimia”*, Internal Report, Pranata Pola Cipta, Jakarta.
- Tahajuddin, Ujud, ed. (2006), *Peran Community Development Perusahaan Industri dan Dampaknya Pada Masyarakat*

- Sekitarnya : Studi Kasus di PT. Ades Waters Indonesia dan PT. Aqua Golden Mississippi, LIPI Press, Jakarta.
- Tempo, 16/09/2007, dikutip dari Harian Komentor, *CSR: Antara Profit, Masyarakat dan Lingkungan*(4), Tampanatu PF Sompie.
- UN ad hoc Group of experts on Community Development (1963). *Community Development and National Development*. New York, NY: UN.
- Van Rees, W. (1991). Neighbourhood, the State and Collective Action, *Community Development Journal*. Vol. 26, No. 2,
- Widianarko, Budi. (2005). "Air : Hak Asasi Versus Komodifikasi", *Renai, Kajian Politik Lokal dan Sosial Humaniora*, Tahun V, No.1.
- Woolcock, Michael dan Deepa Narayan. (2000). "*Social Capital: Implications for Development Theory, Research and Policy*", The World Bank Research Observer, Vol. 15, No. 2. , 2000.
- Zulkarnain, Iskandar dkk. (2005). *Konflik di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung: Persoalan dan Alternatif Solusi*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lipi Press, Jakarta.
- Zazali Ahmad, www.jikalahari.org.
- Surat Kabar:
- *Kompas*, Rabu, 22 Februari, 2006.
 - *Kompas*, Kamis 23 Februari, 2006.
 - *Sinar Harapan*, Kamis, 16 Maret 2006, "Kurangi Kemiskinan"